



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

TA. 2023

(AUDITED)





BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu misi pemerintahan Indonesia yang juga sejalan dengan tujuan MDGs saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan upaya konkrit adalah mendorong dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi setiap pengelola keuangan daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan misi tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan.

Dalam Kerangka Manajemen Pemerintahan, proses penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berujung pada tahapan evaluasi dan pelaporan yang dalam konteks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah yang penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Beberapa ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara telah memberikan penjelasan secara teknis dan normatif atas Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya mengamanatkan bahwa “Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).” Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Secara teknis normatif Standar Akuntansi Berbasis Akrual



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

telah di-*breakdown* melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Penyajian laporan keuangan terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Berpijak pada landasan hukum tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Manggarai berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan laporan keuangan ini didasarkan pada beberapa ketentuan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan standar penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, dengan demikian setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparan dan kesinambungan antargenerasi dengan pengertian sebagai berikut.

- a. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan secara periodik;
- b. Manajemen adalah membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
- d. Kesinambungan antargenerasi (*intergenerational equity*) adalah membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

1.1.2 Tujuan

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi.

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif. menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan. sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai.

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Arus Kas;
- i. Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
- j. Perubahan Ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
- w. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- x. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- y. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- z. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- ff. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- ll. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
- mm. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /Pmk.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
- nn. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023;
- oo. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Nomor 14 Seri F Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2006 Nomor 14 Seri F Nomor 11));
- pp. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tanggal 11 Mei Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tanggal 11 Mei Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- rr. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- ss. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- tt. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tanggal 11 Mei Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- uu. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- vv. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pada BUMD;
- ww. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- xx. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- yy. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);
- zz. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14);
- aaa. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai;
- bbb. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 73 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai; dan
- ccc. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 74 Tahun 2023 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Kinerja APBD
- 2.4. *Mandatory Spending* dalam Penyusunan APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Capaian Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP
- 4.5. Kebijakan Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan SAL
 - 5.2.1. Perubahan SAL
- 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Pos Luar Biasa
 - 5.4.5. Surplus/Defisit
- 5.5. Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1. Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Keuangan

BAB VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar, Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemda Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 sebesar 19,69%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,44%;
- c. Gini *Ratio* Tahun 2023 sebesar 0,291%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,48%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,79%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,42%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) Tahun Tahun 2023 sebesar Rp5.502,19 miliar rupiah; dan
- h. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRBADHK) Tahun Tahun 2023 sebesar Rp3.270,86 miliar rupiah.

Gini *Ratio* dan Inflasi tidak dapat diuraikan sebagai bagian dari kinerja Ekonomi Makro Kabupaten Manggarai dengan pertimbangan:

- 1.1. Kota-kota di dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi atau obyek survei inflasi adalah Kota Kupang, Kota Maumere dan Kota Waingapu. Inflasi NTT 2023 di Bawah Target Nasional. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menekan angka inflasi lebih rendah dari inflasi secara nasional pada 2023. Inflasi di NTT mencapai 2,42 persen sejak Desember 2023. Sedangkan secara nasional mencapai 2,61 persen; dan
- 1.2. Indikator Gini *Ratio* tidak tersedia dalam data BPS Kabupaten Manggarai, sedangkan data BPS Provinsi NTT dan BPS Nasional hanya menyediakan data terbatas untuk Indikator Gini *Ratio* Provinsi NTT dan Gini *Ratio* Nasional.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil persentase penduduk miskin (P-0). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Manggarai (%)	19,84%	19,69%	0,15
2	Kabupaten Manggarai (jiwa)	69,68	70,00	(0,32)
3	Provinsi NTT (%)	20,05%	19,96%	0,09
4	Nasional (%)	9,54%	9,36%	0,18
5	Peringkat Provinsi	14	14	0
6	Peringkat Nasional	434	434	0

Sumber Dokumen: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2024

Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 mencapai 19,84% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 69,68 (ribu jiwa). Angka ini pada Tahun 2023 menurun menjadi 19,69% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 70,00 (ribu jiwa) sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yakni 18,88%, maka capaian Tahun 2023 ini berada di atas target RPJMD. Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Tahun 2023 ini lebih baik dari keadaan Provinsi NTT namun masih di atas angka Nasional, sehingga dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang harus tetap menjadi prioritas dan memastikan agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat kegiatan agar persentase/angka kemiskinan ini dapat terus ditekan hingga mencapai persentase/angka yang minimal.

Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai	3,34	4,63	(1,29)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT	3,74	3,33	0,41
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	0,03
4	Peringkat Provinsi	14	14	0
5	Peringkat Nasional	107	39	68

Sumber Dokumen: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2024

Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Manggarai	0,83	1,48	(0,65)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi NTT	0,93	0,80	0,13
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,41	0,23	0,18
4	Peringkat Provinsi	14	8	6
5	Peringkat Nasional	3	4	(1)

Sumber Dokumen: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2024

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, Pengangguran Terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Manggarai	3,49	2,44	1,05
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	3,54	3,14	0,40
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	5,86	5,32	0,54
4	Peringkat Provinsi	8	17	(9)
5	Peringkat Nasional	245	254	(9)

Sumber Dokumen: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2024

TPT di Kabupaten Manggarai Tahun 2023 sebesar 2,44 %. TPT Kabupaten Manggarai Tahun 2023 lebih rendah dari TPT Provinsi NTT (3,14%), walaupun masih lebih rendah dibanding TPT Nasional (5,32%).

2.1.3 Gini Ratio

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Manggarai Tahun 2023 adalah sebesar 0,29 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5. Tingkat Gini Ratio Kabupaten Manggarai

No.	Gini Ratio	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,31	0,29	0,29	0,00
2	Tingkat Provinsi	0,339	0,34	0,325 (Per Semester 1)	4,41
3	Tingkat Nasional	0,382	0,34	0,388 (Per Semester 1)	(14,11)
4	Peringkat Provinsi	1	-	-	-
5	Peringkat Nasional	27	19	15	4

Sumber Dokumen: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2024

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Manggarai yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,29. Tidak terdapat perubahan Gini Ratio Tahun 2022 dengan Gini Ratio Tahun 2023. Gini Ratio Kabupaten Manggarai Tahun 2023 lebih rendah sebesar 0,035 jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan lebih rendah sebesar 0,098 jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional. Peringkat Gini Ratio Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan menjadi peringkat ke empat untuk Peringkat Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia/IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Manggarai Tahun 2022 mencapai 67,88 poin dengan kategori sedang sementara di tahun 2023 naik mencapai 68,48 sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten/Kota	67,88	68,48	(0,59)
2	Provinsi	65,90	66,68	(0,78)
3	Indonesia/Nasional	72,91	73,55	(0,64)
4	Peringkat Provinsi	11	8	3
5	Peringkat Nasional	494	494	Tetap

Sumber Dokumen: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2024

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan sebesar (0,59) poin pada tahun 2023 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), Harapan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 mencapai 67,63 tahun lebih lama 0,25 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2022 mencapai 67,38 tahun. Kemudian, Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,63 tahun dengan harapan lama sekolah 13,71 tahun. Sementara, Standar Hidup PNB per kapita Tahun 2023 sebesar Rp7.903,00 juta naik dari Rp7.580,00 juta dari tahun sebelumnya.

IPM Kabupaten Manggarai pada saat ini berada pada urutan 8 dari 22 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada pada urutan 494 di tingkat nasional dari 548 Kab/Kota yang ada di Indonesia pada tahun 2023.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat. sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (Rp)	2.296,77	2.391,36	2.391,36
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,30	2,21	3,79
3	Peringkat Provinsi	16	13	13
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-

Sumber Dokumen: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2024

Selama kurun waktu 2020-2021, perekonomian Kabupaten Manggarai mengalami penurunan sangat signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, namun mengalami sedikit kenaikan menjadi 2,21% pada tahun 2022. Pada kurun waktu yang sama. Pertumbuhan Ekonomi Nasional bahkan menjadi minus sebesar -2,07% dan meningkat menjadi 3,69% di tahun 2021. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,83% bertumbuh menjadi 2,51% pada tahun 2021. Sementara, Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Tahun 2023 belum dirilis oleh BPS.

2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Tingkat Inflasi Kabupaten Manggarai Tahun 2023 adalah sebesar 3,19%. Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode secara makro dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB terdiri dari: (1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan (2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku



PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Rincian Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Manggarai

No	Jenis Pengeluaran	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.198.217,92	3.415.902,42	3.630.291,24
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	206.392,13	226.445,80	249.668,76
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.302.938,55	1.297.168,82	1.357.235,97
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.152.117,97	2.229.015,04	2.428.720,60
5	Perubahan Inventori	58.328,00	58.303,81	56.433,89
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	8.629.696,43	8.607.851,11	8.517.262,30
	PDRB	4.810.272,76	5.097.268,75	5.502.194,53

Sumber Dokumen: Kabupaten Manggarai dalam Angka, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2021 sebesar Rp4.810.272,76, pada Tahun 2022 meningkat menjadi Rp5.097.268,75 dan Tahun 2023 naik menjadi Rp5.502.194,53.

PDRB ADHK Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PDRB ADHK Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Rincian Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Manggarai

No	Jenis Pengeluaran	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.234.545,21	2.298.394,72	2.368.466,82
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	133.725,85	141.349,90	150.170,20
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	791.235,87	764.314,09	785.152,18
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.366.849,26	1.356.538,99	1.441.446,22
5	Perubahan Inventori	41.846,94	41.487,93	40.022,83
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	9.233.331,83	9.286.718,60	9.223.029,89
	PDRB	3.064.116,72	3.151.385,99	3.270.869,90

Sumber Dokumen: Kabupaten Manggarai dalam Angka, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHK Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2021 sebesar Rp3.064.116,72, pada Tahun 2022 meningkat menjadi Rp3.151.385,99 dan Tahun 2023 naik menjadi Rp3.270.869,90.

2.1.7.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Manggarai

Struktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	1.046.912,10	1.139.346,20	1.211.04240
2	Pertambangan Dan Penggalian	119.486,60	127.668,20	138.488,00
3	Industri Pengolahan	17.261,60	18.564,30	21.513,40
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	5.338,90	6.117,80	7.091,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	5.610,60	5.801,50	6.295,90
6	Konstruksi	693.405,80	715.719,70	799.970,70
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	445.292,90	495.871,80	571.493,80
8	Transportasi Dan Pergudangan	161.548,00	175.025,30	197.790,20
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	15.978,70	19.821,80	23.908,80
10	Informasi Dan Komunikasi	493.246,00	526.954,20	554.363,40
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	347.314,00	381.902,80	392.894,40
12	Real Estate	99.251,30	107.526,50	115.847,00
13	Jasa Perusahaan	6.268,90	6.761,00	7.308,50
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	723.617,70	728.248,40	759.590,80
15	P-Jasa Pendidikan	367.763,40	374.382,20	405.742,90
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	99.533,50	103.002,40	114.915,10
17	Jasa Lainnya	162.442,70	164.554,50	173.938,00
18	Produk Domestik Regional Bruto	4.810.272,80	5.097.268,80	5.502.194,50
19	Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	0,00	0,00	0,00
20	PDRB Provinsi	70.540.660,00	72.695.280,00	72.695.280,00
21	PDRB Nasional	11.120.077.900,00	11.710.397.800,00	11.710.397.800,00
22	Peringkat Provinsi	16	13	13
23	Peringkat Nasional	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2.1.7.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai



Sumber Dokumen: Kabupaten Manggarai dalam Angka, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar 5,09%, Tahun 2019 turun menjadi sebesar 5,00%, pada Tahun 2020 turun menjadi -0,89%, pada Tahun 2021 naik menjadi 1,30%, pada 2022 meningkat menjadi 2,21%.

Selanjutnya per masing-masing sektor sebagai sebuah indikator untuk menilai pertumbuhan sektor-sektor potensial, cepat maju dan cepat tumbuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Manggarai

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,86	2,71	3,57
2	Pertambangan dan Penggalian	-15,37	1,88	3,66
3	Industri Pengolahan	-1,30	-3,83	4,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18,49	0,50	9,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,12	10,55	0,54
6	Konstruksi	-5,46	4,15	-0,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,66	1,61	6,75
8	Transportasi dan Pergudangan	-1,58	0,48	2,61
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	-32,94	11,62	19,03
10	Informasi dan Komunikasi	5,41	1,87	3,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,70	3,23	1,07
12	Real Estate	-3,83	1,20	2,01
13	Jasa Perusahaan	-30,29	-13,79	4,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,14	-3,67	0,10
15	Jasa Pendidikan	0,02	-0,03	-0,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,04	3,26	2,17
17	Jasa Lainnya	-12,47	-0,07	0,91
	PDRB	-0,89	1,30	2,21

Sumber: Kabupaten Manggarai dalam Angka, 2023



2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada beberapa prinsip antara lain partisipatif atau melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin anggaran dan keadilan anggaran, serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran. Di samping itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga memperhatikan berbagai temuan aparat pemeriksa baik internal maupun eksternal sebagai referensi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah. Secara umum kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Penetapan Pendapatan Daerah dilakukan melalui perkiraan pendapatan yang dapat dicapai, terukur dan rasional dengan mempertimbangkan potensi Kabupaten Manggarai dan realisasi penerimaan tahun 2023. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan realisasi penerimaan PAD Tahun 2023, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Manggarai;
- 3) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Bank telah memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen. telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima; dan
- 7) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan. kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang penganggaran dana Perimbangan sebagai berikut:

- 1) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023;
- 2) Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023;
- 3) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
- 4) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;
- 5) Rincian Alokasi Dana Alokasi Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
- 6) Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Uraian penganggaran atas Lain-Lain pendapatan Daerah Yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran penerimaan hibah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 bersumber dari Hibah IPDM-IP. Hibah PHJD dan Hibah Air Minum Pedesaan yang bersumber dari APBN yang telah didasari pada Perjanjian.
- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS. dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya terdistribusi pada beberapa SKPD. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

a. Belanja Operasi

Penganggaran Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan kenaikan yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- d) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah atas persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai sejalan dengan Ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- f) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru dianggarkan setelah dipastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi dana Tunjangan profesi dan Tambahan Penghasilan Guru dan tunjangan khusus guru dari APBN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta *monitoring* dan evaluasi pemberian hibah dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09).

b. Belanja Modal

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Manggarai memperhatikan hal-hal yaitu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Kabupaten Manggarai digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah terdistribusi pada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Penganggaran Belanja Transfer berpedoman pada Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Manggarai menganggarkan belanja bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta beberapa Peraturan Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Merujuk pada beberapa ketentuan tersebut diatas, pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari dana Transfer setelah dikurangi dana DAK, serta



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

mengalokasikan dana transfer Desa dari APBN sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp27.222.536.988,07.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk: 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 2) penyertaan modal daerah. 3) pembentukan Dana Cadangan; 4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Capaian Target Pendapatan Daerah

Dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.264.481.714.832,00 terealisasi 96,18% atau sebesar Rp1.216.213.398.172,35 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Daerah	1.264.481.714.832,00	1.216.213.398.172,35	96,18
Pendapatan Asli Daerah	151.208.677.479,00	124.626.655.943,35	82,42
Pendapatan Pajak Daerah	35.465.202.893,00	23.729.337.459,76	66,90
Pendapatan Retribusi Daerah	17.489.737.955,00	9.001.027.062,42	51,46
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.567.584.252,00	5.567.584.252,00	100,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.686.152.379,00	86.328.707.169,17	93,14
Pendapatan Transfer	1.109.373.037.353,00	1.087.761.742.229,00	98,05
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.057.152.991.720,00	1.052.370.973.217,00	99,55
Dana Perimbangan	923.361.385.720,00	918.579.367.217,00	99,48
Dana Insentif Daerah (DID)	5.809.126.000,00	5.809.126.000,00	100,00
Dana Desa	127.982.480.000,00	127.982.480.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.220.045.633,00	35.390.769.012,00	67,77
Pendapatan Bagi Hasil	52.220.045.633,00	35.390.769.012,00	67,77
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.900.000.000,00	3.825.000.000,00	98,08
Pendapatan Hibah	3.900.000.000,00	3.825.000.000,00	98,08

2.3.2 Capaian Target Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan dana untuk Belanja dan Transfer Daerah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp1.351.483.548.640,00 sampai dengan akhir tahun anggaran per 31 Desember 2023, terealisasi 94,40% atau sebesar Rp1.275.854.681.732,48 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Daerah	1.351.483.548.640,00	1.275.854.681.732,48	94,40
Belanja Operasi	856.706.951.464,00	788.068.796.446,48	91,99
Belanja Pegawai	456.885.437.576,00	429.160.625.973,00	93,93
Belanja Barang Dan Jasa	337.979.446.818,00	302.918.207.257,43	89,63
Belanja Bunga	5.800.000.000,0	5.799.999.999,99	100,00
Belanja Hibah	42.630.250.470,00	37.194.158.116,06	87,25
Belanja Bantuan Sosial	13.411.816.600,00	12.995.805.100,00	96,90
Belanja Modal	296.123.858.591,00	290.872.850.601,00	98,23
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan Dan Mesin	52.614.219.107,00	50.726.852.239,00	96,41
Gedung Dan Bangunan	63.894.495.732,00	62.631.878.165,00	98,02
Jalan. Irigasi Dan Jaringan	176.957.894.052,00	175.128.999.197,00	98,97
Aset Tetap Lainnya	2.642.249.700,00	2.385.121.000,00	90,27
Aset Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	3.604.625.600,00	72,09
Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	3.604.625.600,00	72,09
Transfer Daerah	193.652.738.585,00	193.308.409.085,00	99,82
Bagi Hasil	5.295.494.085,00	4.951.164.585,00	93,50
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.295.494.085,00	4.951.164.585,00	93,50
Bantuan Keuangan	188.357.244.500,00	188.357.244.500,00	100,00
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	188.357.244.500,00	188.357.244.500,00	100,00

2.4. *Mandatory Spending* dalam Penyusunan APBD Kabupaten Manggarai

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam postur APBD seperti diantaranya persentase belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, pengawasan, perlindungan sosial dampak pandemi, kenaikan inflasi dan kenaikan BBM serta penjelasan atas capaiannya. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.4.1. *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah dan pembangunan gedung perpustakaan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD Induk TA 2023 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp419.690.869.000,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.279.330.540.011,00 atau sebesar 32,81%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp420.590.047.154,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.351.483.548.640,00 atau sebesar 31,12%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
a. Belanja pada Dinas Pendidikan	419.700.869.000,00	418.161.885.634,00
1) BELANJA OPERASI	354.454.828.115,00	355.876.470.518,00
a) Belanja Pegawai	240.910.726.197,00	250.699.634.378,00
b) Belanja Barang dan Jasa	26.788.380.170,00	77.695.293.230,00
c) Belanja Hibah	82.235.721.748,00	27.051.542.910,00
d) Belanja Bantuan Sosial	4.530.000.000,00	430.000.000,00
2) BELANJA MODAL	65.236.040.885,00	62.285.415.116,00
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.019.362.004,00	14.822.138.938,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.216.678.881,00	47.463.276.178,00
b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:		
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	14.405.000,00	4.605.000,00
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	14.780.000,00	8.780.000,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	150.000,00	150.000,00
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	41.220.000,00	37.870.200,00
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	7.830.000,00	4.230.000,00
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan CAPaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.800.000,00	1.800.000,00
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	16.650.000,00	8.600.000,00
8) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	240.655.976.197,00	250.441.884.378,00
9) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	102.485.700,00	102.485.700,00
10) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.900.000,00	11.690.000,00
11) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	9.500.000,00	9.500.000,00
12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada	2.700.000,00	2.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
13) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4.640.000,00	4.640.000,00
14) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.576.000,00	2.576.000,00
15) Sub Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	9.240.000,00	9.240.000,00
16) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	100.000,00	100.000,00
17) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	973.000,00	973.000,00
18) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	8.400.000,00	8.400.000,00
19) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	9.350.000,00	9.800.000,00
20) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	560.000,00	560.000,00
21) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	12.650.000,00	12.650.000,00
22) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	385.000,00	685.000,00
23) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	67.500.000,00	68.775.000,00
24) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	37.000.000,00	37.000.000,00
25) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.890.000,00	1.890.000,00
26) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.892.742.500,00	1.092.742.500,00
27) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	6.133.810.133,00	6.002.460.872,00
28) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.177.175.000,00	2.209.256.713,00
29) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	965.700.000,00	964.197.119,00
30) Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	257.498.963,00	268.320.236,00
31) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah pada	4.285.791.200,00	3.288.598.987,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
32) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3.483.997.900,00	2.951.351.947,00
33) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	63.090.000,00	62.977.727,00
34) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	85.000.000,00	84.940.096,00
35) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.864.617.004,00	1.674.187.033,00
36) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.550.000.000,00	200.000.000,00
37) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	7.600.425.000,00	5.600.360.000,00
38) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	151.106.500,00	195.956.500,00
39) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindaklanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	289.569.000,00	289.569.000,00
40) Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	273.175.600,00	276.880.000,00
41) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	95.347.200,00	355.098.000,00
42) Sub Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	42.515.331.148,00	43.848.928.811,00
43) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	234.581.800,00	253.961.800,00
44) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3.505.242.485,00	3.465.449.674,00
45) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	8.561.800.000,00	8.791.800.000,00
46) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4.802.045.000,00	3.637.301.450,00
47) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3.167.134.600,00	2.927.461.160,00
48) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.656.960.000,00	1.641.777.805,00
49) Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	497.635.000,00	647.627.001,00
50) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	8.138.165.000,00	7.954.926.064,00
51) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah pada	3.140.592.200,00	2.584.097.760,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
53) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	270.450.000,00	177.897.131,00
54) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.392.900.000,00	2.323.040.287,00
55) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil peserta Didik Sekolah Menengah Pertama pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.950.000.000,00	200.000.000,00
56) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.285.722.500,00	2.238.016.200,00
57) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	174.094.800,00	294.324.700,00
58) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	321.210.000,00	321.210.000,00
59) Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	385.365.050,00	400.563.550,00
60) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	69.085.000,00	69.085.000,00
61) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	28.161.860.000,00	28.718.166.429,00
62) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	17.020.000,00	62.141.000,00
63) Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.902.066.900,00	1.643.869.392,00
64) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	257.386.900,00	252.822.886,00
65) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	57.100.000,00	57.092.210,00
66) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	96.840.000,00	96.828.820,00
67) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.100.000,00	211.879.000,00
68) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	248.110.200,00	323.402.603,00
69) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	315.716.500,00	488.575.000,00
70) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	500.000.000,00	496.276.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
71) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	6.095.460.000,00	6.427.870.000,00
72) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	371.371.300,00	228.983.333,00
73) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.360.000,00	1.360.000,00
74) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	400.000.000,00	375.050.000,00
75) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Pendidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	65.916.500,00	105.660.500,00
76) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan pada satuan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.962.990.000,00	2.064.590.000,00
77) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan pada satuan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	50.000.000,00	95.434.800,00
78) Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	150.000.000,00	256.470.400,00
79) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	20.923.603.920,00	19.475.165.920,00
80) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00
81) Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Sukarelawan Pemuda pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	200.000.000,00	206.800.000,00
82) Sub Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta sekolah Olahraga yang di selenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	500.000.000,00	749.553.460,00
83) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	100.000.000,00	110.106.000,00
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	419.690.869.000,00	420.590.047.154,00
Total Belanja Daerah	1.279.330.540.011,00	1.351.483.548.640,00
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	32,81%	31,12%



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2.4.2. Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, besaran alokasi anggaran Kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD Daerah dan Puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD Daerah dan Puskesmas.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional satu RSUD Daerah, 23 Puskesmas termasuk Puskesmas pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa yang juga berdampak kepada tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan dan petugas kesehatan lainnya.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Induk TA 2023 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp213.740.930.200,00 dari nilai belanja daerah senilai 1.279.330.540.011,00 atau sebesar 16,71%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
a. Belanja pada Dinas Kesehatan		
1) BELANJA OPERASI	350.000.000,00	149.716.345.286,00
a) Belanja Pegawai	0,00	57.505.150.190,00
b) Belanja Barang dan Jasa	0,00	79.879.378.496,00
c) Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00
2) BELANJA MODAL	0,00	11.981.816.600,00
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	22.386.950.852,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	16.766.919.802,00
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	4.047.349.050,00
b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain:	55.410.592.871,00	56.721.677.800,00
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	0,00	8.545.610,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	54.195.092.871,00	55.648.632.190,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	9.600.000,00	64.200.000,00
4) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	4.040.000,00	4.040.000,00
5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	0,00	15.564.000,00
6) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	62.203.500,00	35.659.500,00
7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	7.440.000,00	1.740.000,00
8) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	64.966.500,00	64.966.500,00
9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.150.000,00	23.150.000,00
10) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.550.000,00	7.550.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
11) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	249.000.000,00
12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.050.000,00	39.380.000,00
13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	988.500.000,00	559.250.000,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota :	16.870.840.783,00	26.723.113.377,00
14) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	6.293.100.090,00
15) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	1.525.552.449,00
16) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0,00	420.510.000,00
17) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	170.450.000,00
18) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	211.557.000,00	199.828.400,00
19) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.036.391.331,00	11.822.768.892,00
20) Sub Kegiatan Pengadaan Obat. Vaksin	1.753.275.000,00	2.078.200.000,00
21) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.727.017.452,00	4.039.983.546,00
22) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	30.120.000,00
23) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	142.600.000,00	142.600.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.676.118.659,00	85.106.991.018,00
24) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.246.973.500,00	254.7210.725,00
25) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.839.803.000,00	3.168.683.000,00
26) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.065.466.340,00	917.564.000,00
27) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.950.936.000,00	3.628.789.750,00
28) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	607.998.452,00	1.229.970.071,00
29) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.806.939.600,00	11.886.322.600,00
30) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	190.746.858,00	657.763.000,00
31) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	316.981.607,00	1.168.584.000,00
32) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	181.900.000,00	1.030.000.000,00
33) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.550.000.000,00	2.295.520.000,00
34) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.246.237.625,00	2.216.321.900,00
35) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	452.011.000,00	1.732.235.600,00
36) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	215.356.000,00	32.745.000,00
37) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	204.130.000,00	204.130.000,00
38) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	58.000.000,00	58.000.000,00
39) Sub Kegiatan engelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	775.251.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
40) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	195.598.000,00	195.580.000,00
41) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	30.000.000,00	30.000.000,00
42) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	150.000.000,00	150.000.000,00
43) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	277.752.000,00	277.752.000,00
44) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat non kapitasi	1.555.812.100,00	2.561.831.714,00
45) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kapitasi	14.815.879.887,00	18.170.859.658,00
46) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	27.866.605.000,00	27.866.605.000,00
47) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	1.454.280.000,00
48) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	565.851.690,00	565.852.000,00
49) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	285.140.000,00	285.140.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.853.690.000,00	2.613.510.743,00
50) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.853.690.000,00	2.613.510.743,00
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.598.000,00	86.598.000,00
51) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.598.000,00	86.598.000,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.350.000,00	116.350.000,00
51) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.350.000,00	116.350.000,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i> ada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	147.194.000,00	147.194.000,00
52) Sub Kegiatan Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	147.194.000,00	147.194.000,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	183.743.000,00	233.543.200,00
53) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	183.743.000,00	233.543.200,00
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	354.318.000,00	354.318.000,00
54) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	354.318.000,00	354.318.000,00
Puskesmas:	42.691.484.887,00	46.037.464.658,00
54) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Beamese	1.543.705.000,00	1.611.151.886,00
55) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Anam	449.480.712,00	271.265.483,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
56) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Bangka Kenda	1.919.410.850,00	2.072.585.847,00
57) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Cancar	2.995.519.648,00	3.683.383.181,00
58) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Dintor	1.696.001.500,00	1.710.000.671,00
59) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Iteng	2.046.434.000,00	2.078.022.514,00
60) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Ketang	2.101.266.000,00	2.215.875.182,00
61) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Kota	3.049.772.400,00	3.307.371.431,00
62) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Langke Majok	3.043.341.300,00	3.117.292.972,00
63) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas La'o	2.075.158.500,00	2.336.523.065,00
63) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas La'o	2.075.158.500,00	2.336.523.065,00
64) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Loce	1.489.932.000,00	1.682.139.840,00
65) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Nanu	1.616.367.300,00	1.584.123.783,00
66) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Narang	1.281.952.000,00	1.471.179.052,00
67) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Pagal	2.223.431.950,00	2.744.802.840,00
68) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Ponggeok	2.323.322.500,00	2.419.551.958,00
69) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Reo	2.648.702.950,00	2.882.305.727,00
70) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Timung	1.247.728.150,00	1.426.599.724,00
71) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Todo	425.628.000,00	351.277.709,00
72) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Wae Codi	2.545.167.500,00	2.657.220.801,00
73) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Wae Kajong	1.432.729.500,00	1.493.254.954,00
74) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Wae Mbeleng	1.895.275.000,00	1.954.908.108,00
75) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Wangko	1.648.754.977,00	1.860.462.180,00
76) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Watu Alo	992.403.150,00	1.106.165.750,00
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	213.740.930.200,00	390.244.056.934,00
Total Belanja Daerah	1.279.330.540.011,00	1.351.483.548.640,00
Gaji ASN	355.069.831.524,00	
Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	924.260.708.487,00	
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	16,71%	

2.4.3. Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Manggarai adalah adanya pembangunan jalan ruas kabupaten yang bersumber



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dari Dana DAK, pembangunan jaringan irigasi kabupaten dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Induk TA 2023 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp390.349.263.777,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.279.330.540.011,00 atau sebesar 35%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp349.508.675.961,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.351.483.548.640,00 atau sebesar 30%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 16. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD dan APBD-P TA 2023 Kabupaten Manggarai

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	Total Belanja Daerah	1.279.330.540.011,00	1.351.483.548.640,00
2	Belanja Bagi Hasil Dan/Atau Transfer kepada daerah dan/atau Desa (Jumlah a+b)	169.930.587.985,00	193.652.738.585,00
	a. Belanja Bagi Hasil	4.951.164.585,00	5.295.494.085,00
	b. Bantuan Keuangan	164.979.423.400,00	188.357.244.500,00
3	Selisih (1-2)	1.109.399.952.026,00	1.157.830.810.055,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	443.759.980.810,40	463.132.324.022,00
5	a) Belanja Modal:	290.195.093.169,00	293.466.608.891,00
	1) Tanah;		
	2) Peralatan Dan Mesin;	58.443.923.535,00	52.614.219.107,00
	3) Bangunan Dan Gedung;	66.585.493.791,00	176.957.894.052,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi;	165.165.675.843,00	172.426.573.452,00
	b) Belanja Pemeliharaan	100.154.170.608,00	56.042.067.070,00
	1) Belanja Hibah	83.814.429.008,00	42.630.250.470,00
	2) Belanja Bantuan Sosial	16.339.741.600,00	13.411.816.600,00
	3) Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
6	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	390.349.263.777,00	349.508.675.961,00
	Presentase Belanja Infrastruktur Daerah	31,00%	26,00%

2.4.4. Mandatory Spending Fungsi Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan. dan bantuan kepada pemerintah desa.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD dalam APBD TA 2023 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp188.357.244.500,00 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK senilai Rp736.000.280.206,00 atau sebesar 26%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 17. Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023

No.	Komponen Perhitungan	APBD (Rp)
1	Alokasi Dana Desa	188.357.244.500,00
2	Perhitungan Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus	736.000.280.206,00
	Persentase Alokasi ADD	26,00%

2.4.5. Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah Inspektorat Kabupaten Manggarai memiliki kegiatan berupa Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 18. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD-P TA 2023 Kabupaten Manggarai

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.622.325.190,00	2.617.095.190,00
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.314.367.190,00	2.308.439.790,00
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.120.000,00	65.829.000,00
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.938.000,00	174.006.400,00
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	6.720.000,00
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.400.000,00	13.600.000,00
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.500.000,00	48.500.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	332.640.000,00	384.595.000,00
a.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	280.340.000,00	333.975.000,00
b.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	52.300.000,00	50.620.000,00
3.	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi	0,00	0,00
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	0,00	0,00
4.	Total Alokasi Pengawasan	2.954.965.190,00	3.001.690.190,00
5.	Total Belanja Daerah	1.279.330.540.011,00	1.351.483.548.640,00
6.	Persentase Alokasi Pengawasan	0,23%	0,22%



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bagian ini akan menjelaskan keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan Pemerintahan Daerah. Kabupaten Manggarai mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dengan predikat Nilai B. Penghargaan tersebut diberikan melalui surat Nomor: B/441/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023, perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dimana nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Manggarai sebesar 64,38 atau bertambah 0,48 nilai dari tahun 2022 sebesar 63,90 dengan kategori B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan hasil yang baik.

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

3.1.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai sebagai penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manggarai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010. RPJP ini menjadi kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Manggarai yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi, Kabupaten Manggarai menghadapi isu strategis dalam bidang sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup. Isu strategis tersebut disusun dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah di berbagai urusan pemerintahan dan dinamika isu strategis di tingkat internasional, nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Uraian isu strategis Kabupaten Manggarai sesuai RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Masih Rendahnya Kesejahteraan Sosial;
- b. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan;
- c. Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup;
- e. Belum Optimalnya Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan; dan
- f. Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

3.1.2. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2023 yang juga merupakan pelaporan kinerja kedua periode RPJMD 2021-2026, menyajikan pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Manggarai dan perangkat daerahnya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dengan mengacu pada rencana aksi yang telah disusun Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

3.1.3. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 untuk tingkat Pemerintah Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja untuk tingkat Perangkat Daerah (PD). Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah dijanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui *website* Pemerintah Daerah. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut.

- a. Laporan kinerja belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan belum menginformasikan secara lengkap terkait hasil analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja, data *benchmark* kinerja atas indikator kinerja yang diukur baik oleh Provinsi NTT maupun Nasional, serta upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala untuk mencapai kinerja; dan
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3.1.4. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, khususnya pada tahun 2023.

Adapun analisis efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

- a. Efektif apabila target kinerja sasaran tercapai; dan
- b. Efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Ketika rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan **efisien** dan sebaliknya ketika rata-rata capaian kinerja lebih rendah dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan **tidak efisien**.

3.1.5. Realisasi Pendapatan

Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah pada tabel berikut untuk melihat pencapaian kinerja keuangan untuk pendapatan.

Tabel 19. Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	1.264.481.714.832,00	1.216.213.398.172,35	96,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH	151.208.677.479,00	124.626.655.943,35	82,42
Pendapatan Pajak Daerah	35.465.202.893,00	23.729.337.459,76	66,91
Pendapatan Retribusi Daerah	17.489.737.955,00	9.001.027.062,42	51,46
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.567.584.252,00	5.567.584.252,00	100,00
Lain-lain PAD yang sah	92.686.152.379,00	86.328.707.169,17	93,14
PENDAPATAN TRANSFER	1.109.373.037.353,00	1.087.761.742.229,00	98,05
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.057.152.991.720,00	1.052.370.973.217,00	99,55
Dana Perimbangan	923.361.385.720,00	918.579.367.217,00	99,48
Dana Insentif Daerah (DID)	5.809.126.000,00	5.809.126.000,00	100,00
Dana Desa	127.982.480.000,00	127.982.480.000,00	100,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	52.220.045.633,00	35.390.769.012,00	67,77
Pendapatan Bagi Hasil	52.220.045.633,00	35.390.769.012,00	67,77
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3.900.000.000,00	3.825.000.000,00	98,08
Pendapatan Hibah	3.900.000.000,00	3.825.000.000,00	98,08
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan	0,00	0,00	0,00

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1.264.481.714.832,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp151.208.677.479,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.109.373.037.353,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp3.900.000.000,00. Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.216.213.398.172,35, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp124.626.655.943,35, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.087.761.742.229,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp3.825.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3.1.6. Realisasi Belanja

Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah pada tabel berikut untuk melihat pencapaian kinerja keuangan untuk belanja.

Tabel 20. Ikhtisar Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA	1.351.483.548.640,00	1.275.854.681.732,48	94,40
BELANJA OPERASI	856.706.951.464,00	788.068.796.446,48	91,99
Belanja Pegawai	456.885.437.576,00	429.160.625.973,00	93,93
Belanja Barang dan Jasa	337.979.446.818,00	302.918.207.257,43	89,63
Belanja Bunga	5.800.000.000,00	5.799.999.999,99	100,00
Belanja Hibah	42.630.250.470,00	37.194.158.116,06	87,25
Belanja Bantuan Sosial	13.411.816.600,00	12.995.805.100,00	96,90
BELANJA MODAL	296.123.858.591,00	290.872.850.601,00	98,23
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.614.219.107,00	50.726.852.239,00	96,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.894.495.732,00	62.631.878.165,00	98,02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	176.957.894.052,00	175.128.999.197,00	98,97
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.642.249.700,00	2.385.121.000,00	90,27
Belanja Modal Aset Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00	3.604.625.600,00	72,09
Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	3.604.625.600,00	72,09
BELANJA TRANSFER	193.652.738.585,00	193.308.409.085,00	99,82
Bagi Hasil	5.295.494.085,00	4.951.164.585,00	93,50
Belanja Bantuan Keuangan	188.357.244.500,00	188.357.244.500,00	100,00
PEMBIAYAAN (PENERIMAAN - PENGELUARAN)	87.001.834.348,00	86.863.820.548,20	99,84
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.510.529.460,00	144.297.516.200,20	99,85
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.761.247.014,00	40.548.233.754,20	99,48
Penerimaan Pinjaman Daerah	103.749.282.446,00	103.749.282.446,00	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	57.508.695.652,00	57.433.695.652,00	99,87
Penyertaan Modal Daerah	4.900.000.000,00	4.825.000.000,00	98,47
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	52.608.695.652,00	52.608.695.652,00	100,00

Anggaran Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1.351.483.548.640,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp856.706.951.464,00, Belanja Modal sebesar Rp296.123.858.591,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp5.000.000.000,00, Belanja Transfer sebesar Rp193.652.738.585,00 dan Anggaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 sebesar Rp87.001.834.348,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp144.510.529.460,00 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Rp57.508.695.652,00

Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2023 sebesar Rp1.275.854.681.732,48 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp788.068.796.446,48, Belanja Modal sebesar Rp290.872.850.601,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.604.625.600,00, Belanja Transfer sebesar Rp193.308.409.085,00 dan Realisasi Pembiayaan sebesar Rp86.863.820.548,20, yang terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp144.297.516.200,20 dikurangi Realisasi Pengeluaran sebesar Rp57.433.695.652,00.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna diantaranya adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Manggarai, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai, tidak termasuk Perusahaan Daerah. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2023 terdiri dari 43 SKPD sebagai berikut.

Tabel 21. Jumlah Entitas Akuntansi pada Pemkab Manggarai TA 2023

No.	SKPD
1	Sekretariat Daerah
	Bagian Organisasi
	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
	Bagian Adm Pemerintahan
	Bagian Adm Pembangunan
	Bagian Kerja Sama
	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Bagian Hukum
	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
	Bagian Umum
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD
5	Badan Pendapatan Daerah
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
9	Badan Kesbangpol Linmas
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
16	Dinas Perhubungan
17	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19	Dinas Peternakan
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22	Dinas Sosial
23	Dinas Kesehatan
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
26	Dinas Lingkungan Hidup
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
31	Kecamatan Wae Rii
32	Kecamatan Satar Mese Utara
33	Kecamatan Satar Mese Barat
34	Kecamatan Satar Mese
35	Kecamatan Ruteng
36	Kecamatan Reok
37	Kecamatan Reok Barat
38	Kecamatan Langke Rembong
39	Kecamatan Rahong Utara
40	Kecamatan Lelak
41	Kecamatan Cibal
42	Kecamatan Cibal Barat
43	RSUD Ruteng

4.2. Basis Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Manggarai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3. Basis Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Nomor 72 Tahun 2023 yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Secara umum pengakuan aset dilakukan (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, dan Setara Kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas terdiri dari Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, dan Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

- (a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Untuk Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar di Muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar di Muka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar di Muka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan. Beban Dibayar di Muka tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Beban Dibayar di Muka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran barang persediaan. Pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (*First In, First Out/FIFO*).



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

6) Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen dapat berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah, dan Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*). Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa Dividen Tunai; dan/atau Dividen Saham.

Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu Metode Biaya, Metode Ekuitas, Metode Nilai Bersih yang dapat



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

direalisasikan. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Manggarai harus mencatat aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Tabel 22. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan	5.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya – Bahan Perpustakaan	100.000,00
6	Aset Tetap Lainnya – Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	500.000,00
7	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya Perolehan dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat pada aset yang bersangkutan. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria (a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bertambah masa manfaat, dan/atau bertambah kapasitas, dan/atau bertambah kualitas/efisiensi, dan/atau bertambah mutu produksi/kinerja, dan/atau bertambah volume, serta (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu). Periode penghitungan penyusutan dilakukan per Tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a) Tanah;
- b) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- c) Aset Tetap Lainnya selain Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan;
- d) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;

Aset Tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Barang untuk dilakukan penghapusan, Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap yaitu (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya, serta Informasi penyusutan, meliputi Nilai penyusutan, Metode penyusutan yang digunakan, Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3) Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.

Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

4) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK.

5) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainnya.

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. Masa manfaat aset lainnya ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 23. Masa manfaat Aset Lainnya

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	<i>Software Komputer</i>	10
2	Lisensi	10
3	<i>Franchise</i>	10
4	Paten Biasa	10
5	Merek	10
6	<i>Detailed Engineering Design</i>	10



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima di Muka, Utang Belanja; dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri, dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank, Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Utang kepada Masyarakat (Obligasi).

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP 9 tentang Kewajiban disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Sesuai Paragraf 32 PSAP 9 tentang Kewajiban, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran SKPD) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga



sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. Ekuitas disajikan dalam neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CALK.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah pendapatan yang mencakup:

- a. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk disahkan dan diakui sebagai pendapatan daerah; dan
- d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

Pendapatan Transfer-LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN maupun APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Transfer-LRA. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah-LRA, Dana Darurat-LRA, dan Pendapatan Lainnya-LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dilakukan pengesahan;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja – LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

- a. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- b. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
- c. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
- d. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
 - e. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - g. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - h. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
 - i. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer, dan dijelaskan dalam CaLK.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan, dan Pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan akuntansi ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari Surplus/Defisit – LRA, Pembiayaan Netto, SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan), dan Perubahan SAL.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dan Pendapatan - LO diakui setelah penerimaan kas.

- a. Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan; dan
- b. Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO. Beban diklasifikasikan menjadi: Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, dan Beban Tak Terduga.

- a. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial;
- b. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
- c. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- d. Beban Tak Terduga adalah beban berupa pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan beban pada periode



berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban diukur sesuai dengan (1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah, dan (2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi. (3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain Pengeluaran beban tahun berkenaan, pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja, dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

a. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan-misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan: (a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; (b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; (c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan (d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.264.481.714.832,00	1.216.213.398.172,35	1.090.365.130.064,65

Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	151.208.677.479,00	124.626.655.943,35	82,42	110.722.937.745,65
2	Pendapatan Transfer	1.109.373.037.353,00	1.087.761.742.229,00	98,05	919.332.114.485,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	3.900.000.000,00	3.825.000.000,00	98,08	60.310.077.834,00
	Jumlah	1.264.481.714.832,00	1.216.213.398.172,35	96,18	1.090.365.130.064,65

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.216.213.398.172,35 atau 96,18% dari anggaran sebesar Rp1.264.481.714.832,00. Realisasi masing-masing pos pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LRA

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
151.208.677.479,00	124.626.655.943,35	110.722.937.745,65

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 sebesar Rp124.626.655.943,35 atau 82,42% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD yaitu sebesar Rp151.208.677.479,00. Penjelasan atas masing – masing pos PAD dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 25. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	35.465.202.893,00	23.729.337.459,76	66,91	17.591.100.545,64
2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.489.737.955,00	9.001.027.062,42	51,46	6.636.049.044,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.567.584.252,00	5.567.584.252,00	100,00	3.371.631.127,65
4	Lain-Lain PAD yang Sah	92.686.152.379,00	86.328.707.169,17	93,14	83.124.157.028,36
	Jumlah	151.208.677.479,00	124.626.655.943,35	82,42	110.722.937.745,65

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
35.465.202.893,00	23.729.337.459,76	17.591.100.545,64



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai selama TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 26. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel	682.899.184,00	671.848.918,00	98,38	486.462.611,00
2.	Pajak Restoran	3.218.496.930,00	2.394.095.962,00	74,39	2.468.403.606,00
3.	Pajak Hiburan	59.770.174,00	7.838.000,00	13,11	1.530.000,00
4.	Pajak Reklame	202.213.663,00	138.215.750,00	68,35	165.316.500,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	6.400.000.000,00	5.691.999.322,59	88,94	5.306.738.449,00
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	17.750.430.863,00	8.964.219.356,00	50,50	3.826.485.102,00
7.	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	41.903.377,00	8,38	105.518.265,00
8.	PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.504.502.187,00	4.232.201.285,17	76,89	4.000.985.501,64
9.	Pajak Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.146.889.892,00	1.587.015.489,00	138,38	1.229.660.511,00
Jumlah		35.465.202.893,00	23.729.337.459,76	66,91	17.591.100.545,64

Realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp23.729.337.459,76 atau 66.91% dari anggaran sebesar Rp35.465.202.893,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.138.236.914,12 jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA 2022.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
<u>17.489.737.955,00</u>	<u>9.001.027.062,42</u>	<u>6.636.049.044,00</u>

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan realisasi selama TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 27. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	2.960.484.388,00	4.832.323.367,42	163,23	1.572.829.800,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.054.055.000,00	3.433.523.420,42	325,74	630.004.200,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	750.000.000,00	597.468.000,00	79,66	434.514.000,00
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.062.000,00	1.100.000,00	53,35	300.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	375.593.300,00	185.453.000,00	49,38	222.999.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	535.913.800,00	255.611.000,00	47,70	0,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.465.000,00	8.146.500,00	31,99	5.236.000,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	217.395.288,00	351.021.447,00	161,47	279.776.600,00
2	Retribusi Jasa Usaha	14.133.246.798,00	3.901897.820,00	27,61	5.040.305.350,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.868.529.209,00	793.379.860,00	16,30	790.817.380,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.145.648.508,00	2.051.694.980,00	65,22	2.647.456.625,00
	Retribusi Tempat Pelelangan	23.511.950,00	21.330.000,00	90,72	25.680.000,00
	Retribusi Terminal	424.128.656,00	106.759.000,00	25,17	93.011.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	154.900.000,00	165.440.000,00	106,80	162.530.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.150.475,00	9.055.980,00	64,00	9.026.545,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	321.200.000,00	220.258.000,00	68,57	113.279.000,00
	Retribusi Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	700.200.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.181.178.000,00	533.980.000,00	10,31	498.304.800,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	396.006.769,00	266.805.875,00	67,37	22.913.894,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	302.393.000,00	265.895.875,00	87,93	18.603.894,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	93.613.769,00	910.000,00	0,97	4.310.000,00
	Jumlah	17.489.737.955,00	9.001.027.062,42	51,46	6.636.049.044,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2023 sebesar Rp9.001.027.062,42 atau 51,46% dari anggaran sebesar Rp17.489.737.955,00. Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.359.978.018,42 jika dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2022.

Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sebagaimana dapat dilihat pada daftar berikut.

Tabel 28. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah menurut SKPD Pengelola Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	6.418.261.167,00	2.495.695.680,00	38,88
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.759.585.613,00	757.625.980,00	43,06
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.386.062.895,00	1.293.169.000,00	93,30
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.272.612.659,00	444.900.700,00	13,59
2	Dinas Kesehatan	587.555.000,00	3.182.038.420,42	541,57
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	412.555.000,00	3.136.330.320,42	760,22
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	175.000.000,00	45.708.100,00	26,12
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	232.395.288,00	341.211.447,00	146,82
	Retribusi Pemakaian Alat	15.000.000,00	8.960.000,00	59,73
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	217.395.288,00	332.251.447,00	152,83
4	Dinas Lingkungan Hidup	750.000.000,00	597.468.000,00	79,66
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	750.000.000,00	597.468.000,00	79,66
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	231.200.000,00	219.828.000,00	95,08
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	231.200.000,00	219.828.000,00	95,08
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.871.309.550,00	600.415.035,00	32,09
	Retribusi Pemakaian Alat	1.568.916.550,00	334.519.160,00	21,32
	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	302.393.000,00	265.895.875,00	87,93
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.465.000,00	8.146.500,00	31,99
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	25.465.000,00	8.146.500,00	31,99
8	Dinas Perhubungan	1.443.400.000,00	558.688.980,00	38,71
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	93.613.769,00	910.000,00	0,97
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.150.475,00	9.055.980,00	64,00
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	424.128.656,00	106.759.000,00	25,17
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	535.913.800,00	256.511.000,00	47,86



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	375.593.300,00	185.453.000,00	49,38
9	Dinas Perikanan	831.961.950,00	108.530.000,00	13,05
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	90.000.000,00	17.600.000,00	19,56
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	718.450.000,00	69.600.000,00	9,69
	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	23.511.950,00	21.330.000,00	90,72
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.474.728.000,00	289.980.000,00	19,66
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	5.000.000,00	41,67
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	1.462.728.000,00	284.980.000,00	19,48
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.062.000,00	1.100.000,00	53,35
	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	2.062.000,00	1.100.000,00	53,35
12	Dinas Peternakan	3.621.400.000,00	597.925.000,00	16,51
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	466.500.000,00	251.485.000,00	53,91
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	154.900.000,00	165.440.000,00	106,80
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	3.000.000.000,00	181.000.000,00	6,03
	Jumlah	17.489.737.955,00	9.001.027.062,42	51,46

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
5.567.584.252,00	5.567.584.252,00	3.371.631.127,65

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah/dividen dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) TA 2023. Pada TA 2023, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direalisasikan senilai Rp5.567.584.252,00 atau 100% dari yang dianggarkan senilai Rp5.567.584.252,00.

5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
92.686.152.379,00	86.328.707.169,17	83.124.157.028,36

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap maupun rutin dengan realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 29. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	551.550.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.	Jasa Giro	1.951.949.217,00	3.488.280.627,39	178,71	1.414.519.771,16
3.	Pendapatan Bunga	1.984.000.000,00	788.023,59	4,00	376.090.663,66
4.	Penempatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	19.105.000,00
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TPTGR)	1.874.753.000,00	827.833.169,84	44,16	1.906.769.091,83



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
6.	Pendapatan dari Pengembalian Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	816.860.422,40
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	753.000.000,00	27.388.696,00	3,64	24.109.335,00
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	13.532.230.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian	953.000.000,00	1.010.955.883,51	106,08	0,00
10.	Pendapatan BLUD	51.675.181.725,00	65.208.938.848,84	126,19	67.968.747.874,31
11.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.410.488.437,00	15.764.521.920,00	81,22	10.596.304.870,00
Jumlah		92.686.152.379,00	86.328.707.169,17	93,14	83.124.157.028,36

Selanjutnya, terdapat realisasi atas penerimaan dari Jasa Giro Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yaitu senilai Rp3.488.280.627,39 atau 178,71% dari yang dianggarkan senilai Rp1.951.949.217,00. Rincian lebih lanjut atas penerimaan Jasa Giro TA 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Rincian Pendapatan Jasa Giro TA 2023

Uraian		Nilai (Rp)
a.	Jasa Giro pada Kas Daerah 006.01.04000001-0	3.488.280.627,39
Jumlah		3.488.280.627,39

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Manggarai memperoleh pendapatan bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah senilai Rp788.023,59 atau 4,00% dari yang dianggarkan senilai Rp1.984.000.000,00. Realisasi Pendapatan tersebut merupakan penerimaan bunga pada Bank Mandiri atas penempatan uang pajak penerangan jalan (PPJ) bulan Agustus dan September Tahun 2023 senilai Rp788.023,59

Pada TA 2023, Pendapatan BLUD direalisasikan senilai Rp65.208.938.848,84 atau 126,19% dari yang dianggarkan senilai 51.675.181.725,00. yang merupakan pendapatan BLUD bersumber dari Jasa Layanan. dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain. dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Rincian Pendapatan BLUD TA 2023

Uraian		Nilai (Rp)
Pendapatan BLUD		
a.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	64.580.503243,84
b.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	428.425.841,00
c.	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah	200.009.764,00
Jumlah		65.208.938.848,84

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
1.109.373.037.353,00	1.087.761.742.229,00	919.332.114.485,00

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dengan realisasi untuk TA 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
923.361.385.720,00	918.579.367.217,00	767.706.164.638,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non fisik dengan realisasi untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 32. Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.361.385.720,00	918.579.367.217,00	99,48	767.706.164.638,00
1. Bagi Hasil Pajak	4.952.333.000,00	6.438.985.829,00	130,02	11.023.832.886,00
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.061.632.000,00	3.061.632.000,00	100,00	3.255.003.100,00
3. Dana Alokasi Umum (DAU)	596.299.361.000,00	596.218.538.347,00	99,99	548.841.188.585,00
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)	319.048.059.720,00	312.860.211.041,00	98,06	204.586.140.067,00

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
4.952.333.000,00	6.438.985.829,00	11.023.832.886,00

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pada TA 2023 sebesar Rp6.438.985.829,00 dari anggaran sebesar Rp4.952.333.000,00 atau 130,02% yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 33. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.428.094.000,00	2.667.194.059,00	186,77	7.157.027.169,00
2.	DBH PPh Pasal 21	2.958.558.000,00	3.336.217.400,00	112,76	3.026.935.000,00
3.	DBH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	0,00	0,00	479.782.491,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	565.681.000,00	435.574.370,00	77,00	360.088.226,00
Jumlah		4.952.333.000,00	6.438.985.829,00	130,02	11.023.832.886,00

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA)

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
3.061.632.000,00	3.061.632.000,00	3.255.003.100,00

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2023 sebesar Rp3.061.632.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.061.632.000,00 atau 100,00% yang dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 34. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.208.225.000,00	1.850.317.600,00	153,14	1.105.594.769,00
2.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	43.999.000,00	35.199.200,00	80,00	191.041.331,00
3	DBH (SDA) Kehutanan	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.809.408.000,00	1.176.115.200,00	65,00	1.958.311.000,00
Jumlah		3.061.632.000,00	3.061.632.000,00	100,00	3.255.003.100,00

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
596.299.361.000,00	596.218.538.347,00	548.841.188.585,00

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2023 direalisasikan sebesar Rp596.218.538.347,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp596.299.361.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 35. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	30.805.463.000,00	30.805.463.000,00	100,00	0,00
2	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	48.466.336.000,00	48.466.336.000,00	100,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	73.065.550.000,00	73.065.550.000,00	100,00	0,00
4	Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	100,00	0,00
5	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	42.494.142.000,00	42.494.142.000,00	100,00	0,00
6	Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	396.267.870.000,00	396.187.047.347,00	99,98	548.841.188.585,00
Jumlah		596.299.361.000,00	596.218.538.347,00	99,99	548.841.188.585,00

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
319.048.059.720,00	312.860.211.041,00	204.586.140.067,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp312.860.211.041,00 atau 98,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp319.048.059.720,00. Realisasi DAK dapat dirincikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1. DAK Fisik

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
131.686.954.206,00	131.686.954.206,00	113.986.934.517,00

Realisasi DAK Fisik untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp131.686.954.206,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp131.686.954.206,00. Realisasi DAK Fisik dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 36. Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan	25.508.466.683,00	25.508.466.683,00	100,00	15.765.845.705,00
2	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	659.203.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pertanian	9.288.099.000,00	9.288.099.000,00	100,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Jalan	46.168.730.280,00	46.168.730.280,00	100,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Air Minum	5.922.214.429,00	5.922.214.429,00	100,00	6.818.422.299,00
6	DAK Fisik-Bidang Sanitasi	7.906.965.000,00	7.906.965.000,00	100,00	4.829.257.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Irigasi	5.815.287.318,00	5.815.287.318,00	100,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	724.995.800,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB	31.077.191.496,00	31.077.191.496,00	100,00	82.817.348.944,00
10	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan	0,00	0,00	0,00	2.371.861.769,00
Jumlah		131.686.954.206,00	131.686.954.206,00	100,00	113.986.934.517,00

2. DAK Non Fisik

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
187.361.105.514,00	181.173.256.835,00	85.933.750.750,00

Realisasi DAK Non Fisik untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp181.173.256.835,00 atau 96,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp187.361.105.514,00. Realisasi DAK Non Fisik dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 37. Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	69.171.730.000,00	71.815.757.971,00	103,82	0,00
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.423.610.000,00	1.505.000.000,00	43,96	0,00
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	59.760.906.000,00	48.451.223.000,00	81,08	56.781.042.830,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.570.000.000,00	1.413.500.000,00	55,00	2.161.349.500,00
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.299.136.300,00	18.180.952.000,00	343,09	4.778.533.900,00
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.095.460.000,00	6.356.138.550,00	104,28	279.490.000,00
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.962.990.000,00	1.962.990.000,00	100,00	54.000.000,00
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	32.882.466.608,00	25.659.700.708,00	78,03	14.282.912.820,00
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	366.812.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
10.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.020.869.200,00	4.020.869.200,00	100,00	4.218.254.000,00
11.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	936.148.600,00
12.	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	345.238.500,00
13.	DAK Non Fisik-PK2UMK	857.400.406,00	857.400.406,00	100,00	1.067.359.600,00
14.	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	949.725.000,00	949.725.000,00	100,00	325.200.000,00
15.	DAK Non Fisik-Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	704.221.000,00
Jumlah		187.361.105.514,00	181.173.256.835,00	96,70	85.933.750.750,00

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

5.1.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
5.809.126.000,00	5.809.126.000,00	0,00

Pada Tahun 2023, Dana Insentif Daerah (DID) direalisasikan sebesar Rp5.809.126.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan pada TA 2023. Realisasi DID berdasarkan penetapan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 350 tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.1.2.2.2. Dana Desa

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
127.982.480.000,00	127.982.480.000,00	123.185.581.000,00

Pada TA 2023, Dana Desa direalisasikan sebesar Rp127.982.480.000,00 atau 100,00% dari anggarannya untuk 145 Desa yang ada di Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2D) Nomor 900.940/SP2DD.01/ BKAD/2023. Realisasi Pendapatan Dana Desa TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.796.899.000,00 atau 3,89% dibanding realisasi Pendapatan Dana Desa TA 2022.

5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
52.220.045.633,00	35.390.769.012,00	28.440.368.847,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp35.390.769.012,00 atau 67,77% dari anggaran sebesar Rp52.220.045.633,00 dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 38. Anggaran dan Realisasi Tranfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.454.715.863,00	3.929.193.338,00	37,58	3.778.452.819,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.366.681.981,00	3.556.679.576,00	66,27	1.322.523.228,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.938.520.139,00	11.921.598.755,00	62,95	6.757.369.823,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	106.334.627,00	44.801.082,00	42,13	84.524.278,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.353.793.023,00	15.938.496.261,00	91,84	16.497.498.699,00
Jumlah		52.220.045.633,00	35.390.769.012,00	67,77	28.440.368.847,00

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
3.900.000.000,00	3.825.000.000,00	60.310.077.834,00

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.825.000.000,00 atau 98,08% dari anggaran sebesar Rp3.900.000.000,00. Realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
3.900.000.000,00	3.825.000.000,00	9.297.000.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp3.825.000.000,00 atau 98,08% dari anggaran sebesar Rp3.900.000.000,00. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.825.000.000,00 merupakan Realisasi Pendapatan Hibah untuk Air Minum dari anggaran sebesar Rp3.900.000.000,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 39. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.900.000.000,00	3.825.000.000,00	98,08	9.297.000.000,00
Jumlah		3.900.000.000,00	3.825.000.000,00	98,08	9.297.000.000,00

Rencana Hibah dari pemerintah Pusat tidak mencapai target hal tersebut disebabkan oleh Perangkat Daerah penerima / pelaksana Hibah dalam menyajikan data dukung dan laporan kurang lengkap sehingga Hibah untuk pembiayaan bersumber dari IPDMIP tidak terealisasi secara keseluruhan dan adanya sisa kontrak dari Hibah peningkatan Jaringan Air Minum Perdesaan.

5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
0,00	0,00	51.013.077.834,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak dianggarkan sedangkan untuk Tahun 2022 merupakan realisasi hibah Dana BOS.

Tabel 40. Anggaran dan Realisasi Hibah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Hibah untuk Dana BOS	0,00	0,00	0,00	51.013.077.834,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	51.013.077.834,00

5.1.2. Belanja

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
1.175.830.810.055,00	1.082.546.272.647,48	922.135.990.976,94

Pada TA 2023, terdapat sebanyak 43 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang merupakan pengguna anggaran. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp1.082.546.272.647,48 atau 93,50% dari anggaran sebesar Rp1.175.830.810.055,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 41. Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	856.721.951.464,00	788.068.796.446,48	91,99	747.599.452.368,96
2	Belanja Modal	296.108.858.591,00	290.872.850.601,00	98,23	169.206.541.293,98
3	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	3.604.625.600,00	72,09	5.329.997.314,00
	Jumlah	1.157.830.810.055,00	1.082.546.272.647,48	93,50	922.135.990.976,94

5.1.2.1. Belanja Operasi

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
856.706.951.464,00	788.068.796.446,48	747.599.452.368,96

Belanja Operasi Kabupaten Manggarai meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Pada TA 2023, Belanja Operasi direalisasikan senilai Rp788.068.796.446,48 atau 91,99% dari yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp856.706.951.464,00. Secara umum Rencana Belanja Operasi tidak terealisasi secara keseluruhan karena adanya upaya rasionalisasi dan penghematan disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan Kas di Pemerintah Daerah dan selanjutnya hal tersebut ditempuh dengan prinsip anggaran belanja yang direncanakan adalah pagu tertinggi sehingga tidak harus direalisasikan semua. Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

Tabel 42. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	456.885.437.576,00	429.160.625.973,00	93,93	416.863.482.286,24
2	Belanja Barang dan Jasa	337.979.446.818,00	302.918.207.257,43	89,63	267.835.774.738,00
3	Belanja Bunga	5.800.000.000,00	5.799.999.999,99	100,00	727.530.923,72
4	Belanja Hibah	42.630.250.470,00	37.194.158.116,06	87,25	60.060.498.551,00
5	Belanja Bantuan Sosial	13.411.816.600,00	12.995.805.100,00	96,90	2.112.165.870,00
	Jumlah	856.706.951.464,00	788.068.796.446,48	91,99	747.599.452.368,96



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
456.885.437.576,00	429.160.625.973,00	416.863.482.286,24

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp429.160.625.973,00 atau 93,93% dari anggaran sebesar Rp456.885.437.576,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 43. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	355.058.532.790,00	332.296.664.957,00	93,59	311.743.121.800,24
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.860.375.000,00	9.835.868.900,00	90,57	19.461.362.668,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.267.320.749,00	69.522.019.986,00	96,20	65.777.006.435,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.873.306.626,00	16.686.970.458,00	93,36	16.372.540.627,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.962.051,00	173.021.672,00	99,46	172.045.756,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	560.290.360,00	559.680.000,00	99,89	560.290.000,00
7	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Pegawai BLUD	91.650.000,00	86.400.000,00	94,27	2.777.115.000,00
Jumlah		456.885.437.576,00	429.160.625.973,00	93,93	416.863.482.286,24

Adapun rincian Belanja Pegawai masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 44. Rincian Belanja Pegawai Per SKPD TA 2023

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	7.485.218.053,00
2	Sekretariat DPRD	18.562.480.498,00
3	Inspektorat	2.151.181.338,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.985.889.966,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.918.957.071,00
6	Badan Pendapatan Daerah	2.396.557.312,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.346.440.394,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.748.052.115,00
9	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah	1.327.776.671,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	236.349.294.866,00
11	Dinas Kesehatan	53.900.473.329,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.717.841.196,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.765.960.655,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	2.881.687.013,00
15	Dinas Perhubungan	2.788.001.427,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.690.495.494,00
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.518.425.530,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.360.686.532,00
19	Dinas Peternakan	2.342.406.809,00
20	Dinas Sosial	2.057.532.674,00
21	Dinas Perikanan	1.975.375.348,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.738.687.125,00
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.738.574.298,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.718.039.492,00
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.701.454.899,00
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.670.256.292,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.667.673.472,00
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	1.520.531.085,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.216.381.546,00
30	Satuan Polisi Pamong Praja	2.198.639.922,00
31	Kecamatan Langke Rembong	7.621.235.349,00
32	Kecamatan Reok	2.318.522.744,00
33	Kecamatan Cibal	1.873.334.960,00
34	Kecamatan Wae Rii	1.587.364.828,00
35	Kecamatan Satarmese	1.543.068.271,00
36	Kecamatan Ruteng	1.397.515.846,00
37	Kecamatan Satarmese Utara	1.010.852.833,00
38	Kecamatan Cibal Barat	997.608.031,00
39	Kecamatan Reok Barat	916.279.220,00
40	Kecamatan Satarmese Barat	879.492.474,00
41	Kecamatan Lelak	792.601.752,00
42	Kecamatan Rahong Utara	742.614.436,00
43	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	27.039.162.807,00
Jumlah		429.160.625.973,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
337.979.446.818,00	302.918.207.257,43	267.835.774.738,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp302.918.207.257,43 atau 89,63% dari anggaran sebesar Rp337.989.646.818,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 45. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	102.587.738.998,00	97.349.476.844,09	94,89	51.356.693.394,00
2	Belanja Barang tak Habis Pakai	26.347.600,00	26.347.600,00	100,00	6.100.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	98.574.309.010,00	88.923.366.034,00	90,21	71.936.572.147,00
4	Belanja Jaminan/Asuransi	820.449.057,00	432.101.549,00	52,67	11.176.872.951,00
5	Belanja Sewa Tanah	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	635.750.500,00	564.056.300,00	88,72	452.127.382,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	698.250.000,00	630.300.000,00	90,27	562.828.000,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100	56.500.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	986.656.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00
11	Belanja Ketersediaan Layanan (Avalibility Paymend)	0,00	0,00	0,00	7.681.000,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00	380.000.000,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	368.796.200,00	336.211.100,00	91,16	2.575.647.500,00
12	Biaya Sewa Aset Tidak terwujud	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.746.827.947,00	1.511.883.321,00	86,55	640.774.588,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	982.201.994,00	941.291.190,36	95,83	1.110.855.025,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
15	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	18.312.500,00	13.810.000,00	75,41	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	438.883.200,00	401.003.800,00	91,37	0,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.677.263.135,00	35.593.577.118,00	62,80	54.300.796.099,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.276.900.000,00	9.276.899.000,00	100,00	199.500.000,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.223.900.000,00	1.169.319.531,00	95,54	1.916.004.610,00
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.755.016.677,00	65.635.563.869,98	102,95	70.040.166.042,00
Jumlah		337.979.446.818,00	302.918.207.257,43	89,63	267.835.774.738,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 46. Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2023

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai
1	Sekretariat Daerah	9.151.609.442,09
2	Sekretariat DPRD	13.902.897.446,00
3	Inspektorat Daerah	685.172.297,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.404.707.738,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.136.414.251,00
6	Badan Pendapatan Daerah	892.526.224,36
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	851.366.875,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	688.922.248,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	451.752.548,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	64.566.725.145,00
11	Dinas Kesehatan	63.448.720.845,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28.710.931.253,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.766.245.205,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.195.941.541,00
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5.656.118.872,00
16	Dinas Peternakan	2.896.538.903,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	2.546.218.733,00
18	Dinas Perhubungan	1.472.570.721,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.446.361.637,00
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.061.154.679,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	892.132.622,00
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	888.790.774,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	863.630.158,00
24	Dinas Perikanan	762.977.009,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	735.364.080,00
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	728.870.606,00
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	551.175.377,00
28	Dinas Sosial	325.659.431,00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	291.516.850,00
30	Satuan Polisi Pamong Praja	1.246.958.947,00
31	Kecamatan Langke Rembong	2.592.881.313,00
32	Kecamatan Reok	670.965.825,00
33	Kecamatan Reok Barat	262.701.852,00
34	Kecamatan Cibai	236.454.348,00
35	Kecamatan Ruteng	213.191.000,00
36	Kecamatan Satarmese Barat	190.200.000,00
37	Kecamatan Satarmese Utara	155.029.000,00
38	Kecamatan Rahong Utara	152.809.266,00
39	Kecamatan Satarmese	152.100.000,00
40	Kecamatan Cibai Barat	151.827.400,00
41	Kecamatan Lelak	147.044.750,00
42	Kecamatan Wae Rii	113.065.656,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai
43	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	66.659.964.389,98
Jumlah		302.918.207.257,43

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp64.566.725.145,00 termasuk didalamnya belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebanyak 247 Satuan Pendidikan Negeri (PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP) sebesar Rp42.663.027.273,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp63.448.720.845,00 termasuk belanja yang bersumber Dana JKN dan BOK sebanyak 23 FKTP Puskesmas sebesar Rp31.770.951.184,00. Secara umum Rencana Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi secara keseluruhan karena adanya upaya rasionalisasi dan penghematan disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan Kas di Pemerintah Daerah dan selanjutnya hal tersebut ditempuh dengan prinsip anggaran belanja yang direncanakan adalah pagu tertinggi sehingga tidak harus direalisasikan semua.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
5.800.000.000,00	5.799.999.999,99	727.530.923,72

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp5.799.999.999,99 dari anggaran sebesar Rp5.800.000.000,00 merupakan pembayaran Bunga Dana Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi Belanja Bunga TA 2023 mengalami kenaikan dibanding dengan Realisasi Belanja Bunga TA 2022 yakni sebesar Rp5.072.469.076,27 atau 697,22%. Hal ini dikarenakan terdapat pencairan Pinjaman Daerah kepada Lembaga Perbankan (Bank NTT) sebesar Rp103.749.282.446,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 47. Rincian Belanja Bunga TA 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Bunga Desember 2022	54.451.584,78
2	Pembayaran Bunga Januari 2023	687.500.000,00
3	Pembayaran Bunga Februari 2023	657.608.695,65
4	Pembayaran Bunga Maret 2023	627.717.391,30
5	Pembayaran Bunga April 2023	597.826.086,96
6	Pembayaran Bunga Mei 2023	567.934.782,61
7	Pembayaran Bunga Juni 2023	538.043.478,26
8	Pembayaran Bunga Juli 2023	508.152.173,91
9	Pembayaran Bunga Agustus 2023	478.260.869,57
10	Pembayaran Bunga September 2023	448.369.565,22
11	Pembayaran Bunga Oktober 2023	418.478.260,87
12	Pembayaran Bunga November 2023	215.657.110,86
Jumlah		5.799.999.999,99

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
42.630.250.470,00	37.194.158.116,06	60.060.498.551,00

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp37.194.158.116,06 atau 87,25% dari anggaran sebesar Rp42.630.250.470,00 dengan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 48. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	14.000.000.000,00	300.000.000,00	2,14	0,00
2	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.085.357.670,00	3.932.485.812,06	96,26	6.893.704.259,00
3	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.003.610.000,00	475.000.000,00	47,33	558.490.000,00
4	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00	595.000.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOS	22.642.575.240,00	31.602.392.984,00	139,57	51.449.024.972,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	578.707.560,00	564.279.320,00	97,51	564.279.320,00
Jumlah		42.630.250.470,00	37.194.158.116,06	87,25	60.060.498.551,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat untuk TA 2023 sebesar Rp300.000.000,00 dengan rincian.

Tabel 49. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

No.	Penerima Hibah	Nilai
1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai	300.000.000,00
Jumlah		300.000.000,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk TA 2023 sebesar Rp3.932.485.812,060 dengan rincian.

Tabel 50. Rincian Belanja Hibah kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Penerima Hibah	Nilai
1	Organisasi KONI Tingkat Kabupaten Manggarai	598.946.221,06
2	Dekranasda Kabupaten Manggarai	500.000.000,00
3	Yayasan Persekolahan Sukma Pusat	295.200.000,00
4	TKK Bhayangkari Ruteng	615.694.662,00
5	MIS Amanah	224.792.468,00
6	MTS Amanah	249.455.600,00
7	SMP Swasta 3 Sekolah	375.000.000,00
8	SD Swasta 3 Sekolah	375.000.000,00
9	MTS Fatimah	249.454.700,00
10	MTS AN NAJAH	226.868.363,00
11	SDK Beo Rahong	179.989.879,00
12	SDK Ruteng II	42.083.919,00
Jumlah		3.932.485.812,06

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar untuk TA 2023 sebesar Rp475.000.000,00 dengan rincian.

Tabel 51. Rincian Belanja Hibah kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No.	Penerima Hibah	Nilai
1	Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)	200.000.000,00
2	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)	50.000.000,00
3	Bunda PAUD	100.000.000,00
4	Palang Merah Indonesia (PMI)	125.000.000,00
Jumlah		475.000.000,00

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk TA 2023 sebesar Rp320.000.000,00 dengan rincian.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 52. Rincian Belanja Hibah kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No.	Penerima Hibah	Nilai
1	KWARCAB KABUPATEN MANGGARAI	100.000.000,00
2	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manggarai	150.000.000,00
3	IGTKI PGRI KAB MANGGARAI	70.000.000,00
Jumlah		320.000.000,00

Belanja Hibah Uang Dana BOSP Yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Swasta untuk TA 2023 sebesar Rp31.602.392.984,00 dengan rincian.

Tabel 53. Rincian Belanja Hibah Dana BOSP kepada Satdikdas dan Satdikmen Swasta

No.	Penerima Hibah	Nilai
1	Satuan Pendidikan Dasar Swasta	18.664.443.349,00
2	Satuan Pendidikan Menengah Swasta	5.026.621.085,00
3	BOP PAUD	6.026.318.550,00
4	BOP Kesetaraan	1.885.010.000,00
Jumlah		31.602.392.984,00

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk TA 2023 sebesar Rp564.279.320,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 54. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk TA 2023

No.	Penerima Hibah	Nilai
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	90.738.880,00
2	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	75.564.920,00
3	Partai NasDem	70.983.480,00
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	71.613.840,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58.784.160,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	55.784.800,00
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	84.402.320,00
8	Partai Demokrat	56.406.920,00
Jumlah		564.279.320,00

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
<u>13.411.816.600,00</u>	<u>12.995.805.100,00</u>	<u>2.112.165.870,00</u>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp12.995.805.100,00 atau 96,90% merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan TA 2023 dari anggaran sebesar Rp13.411.816.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 55. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	575.000.000,00	442.000.000,00	76,87	723.485.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.806.816.600,00	12.523.805.100	97,79	1.388.680.870,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		13.411.816.600,00	12.995.805.100,00	96,90	2.112.165.870,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.2.2. Belanja Modal

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
296.123.858.591,00	290.872.850.601,00	169.206.541.293,98

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya, dengan realisasi pada TA 2023 senilai Rp290.872.850.601,00 atau 98,23% dari Anggaran sebesar Rp296.123.858.591,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 56. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal – Tanah	0,00	0,00	0,00	1.962.083.000,00
2	Belanja Modal – Peralatan dan Mesin	52.614.219.107,00	50.726.852.239,00	96,41	33.377.856.959,98
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	63.894.495.732,00	62.631.878.165,00	98,02	71.649.025.218,00
4	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	176.957.894.052,00	175.128.999.197,00	98,97	62.217.576.116,00
5	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	2.642.249.700,00	2.385.121.000,00	90,27	0,00
6	Belanja Modal - Aset Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	296.123.858.591,00	290.872.850.601,00	98,23	169.206.541.293,98

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
0,00	0,00	1.962.083.000,00

Belanja Modal Tanah pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan Realisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada TA 2022 direalisasikan senilai Rp1.962.083.000,00.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
52.614.219.107,00	50.726.852.239,00	33.377.856.959,98

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp50.726.852.239,00 atau 96,41% dari anggaran sebesar Rp52.614.219.107,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 57. Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

No.	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor	2.046.792.796,00	1.958.191.675,00	95,67	2.881.109.364,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran	18.764.202.476,00	18.764.202.476,00	100,00	2.825.661.466,00
3	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13.534.813.590,00	12.517.194.444,00	92,48	21.029.854.830,00
4	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	102.560.000,00
5	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	42.061.000,00	37.411.000,00	88,94	46.000.000,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.374.843.525,00	6.268.815.407,00	98,34	1.543.626.540,00
7	Belanja Modal Alat Studio	223.426.850,00	197.762.350,00	88,51	237.316.800,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	2.478.500,00	200.000,00	8,07	1.048.558.465,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
9	Belanja Modal Komputer Unit	1.677.155.380,00	1.295.807.422,00	77,26	756.968.749,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	213.128.000,00	205.443.025,00	96,39	87.295.110,00
11	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.857.257.680,00	7.857.257.680,00	100,00	652.578.608,00
12	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	191.868.000,00	191.756.850,00	99,94	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	42.899.410,00	42.899.410,00	100,00	0,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	129.879.327,98
15	Belanja Modal Sumur	238.230.400,00	6.402.000,00	2,69	187.200.000,00
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	129.045.000,00	124.200.000,00	96,25	150.431.000,00
17	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.258.708.000,00	1.242.000.000,00	98,67	1.529.080.000,00
18	Belanja Modal Alat Bantu	6.908.500,00	6.908.500,00	100,00	0,00
19	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
20	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	32.056.800,00
21	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	92.679.900,00
Jumlah		52.614.219.107,00	50.726.852.239,00	96,41	33.377.856.959,98

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 58. Rekapitulasi Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Per SKPD TA 2023

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	425.843.150,00
2	Inspektorat Daerah	5.919.852,00
3	Badan Pendapatan Daerah	37.197.000,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	34.672.515,00
5	Dinas Kesehatan	15.381.289.597,00
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.845.728.074,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	191.756.850,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	124.200.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.910.300,00
10	Dinas Peternakan	81.091.050,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.350.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.000.000,00
13	Dinas Perhubungan	6.000.000,00
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.000.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.800.000,00
16	Kecamatan Reok	148.271.025,00
17	Kecamatan Langke Rembong	135.580.350,00
18	Kecamatan Lelak	8.400.000,00
19	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	19.062.842.476,00
Jumlah		50.726.852.239,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
63.894.495.732,00	62.631.878.165,00	71.649.025.218,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp62.631.878.165,00 atau 98,02% dari anggaran sebesar Rp63.894.495.732,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 59. Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung TA 2023 dan 2022

No.	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	47.403.276.178,00	46.470.999.771,00	97,91	12.828.817.514,00
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.047.349.050,00	3.985.529.835,00	98,47	51.162.347.156,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
3	Belanja Modal Bangunan Terbuka	3.580.000.000,00	3.579.926.660,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	3.493.550.000,00	3.327.791.845,00	95,26	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.772.870.483,00	1.772.745.243,00	99,99	1.465.878.220,00
6	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.732.455.000,00	1.726.255.200,00	99,64	419.322.807,00
7	Belanja Modal Bangunan Parkir	960.000.000,00	960.000.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	521.787.111,00	521.629.611,00	99,97	0,00
9	Belanja Modal Pagar	287.000.000,00	287.000.000,00	100,00	39.912.000,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	96.207.910,00	0,00	0,00	99.995.000,00
11	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan	0,00	0,00	0,00	425.247.334,00
12	Belanja Modal Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	3.710.922.187,00
13	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	1.496.583.000,00
Jumlah		63.894.495.732,00	62.631.878.165,00	98,02	71.649.025.218,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 60. Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2023

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	170.000.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	46.470.999.771,00
3	Dinas Kesehatan	3.985.529.835,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.579.926.660,00
5	Dinas Peternakan	3.327.791.845,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.100.488.400,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	147.396.411,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	276.918.483,00
9	Kecamatan Langke Rembong	1.622.907.830,00
10	Kecamatan Reok	949.918.930,00
Jumlah		62.631.878.165,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
176.957.894.052,00	175.128.999.197,00	62.217.576.116,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp175.128.999.197,00 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp176.957.894.052,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 61. Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	153.920.529.732,00	152.144.638.466,00	98,85	43.623.204.865,00
2	Bangunan Air	10.209.170.391,00	10.194.662.062	99,86	10.618.966.549,00
3	Instalasi	12.732.635.829,00	12.694.251.769	99,70	7.387.174.047,00
4	Jaringan	95.558.100,00	95.446.900	99,88	588.230.655,00
Jumlah		176.957.894.052,00	175.128.999.197,00	98,97	62.217.576.116,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD TA 2023 disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 62. Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.637.872.997,00
2	Dinas Kesehatan	1.570.200.000,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	61.198.400,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75.565.800,00
5	Kecamatan Langke Rembong	2.167.000.000,00
6	Kecamatan Reok	256.000.000,00
7	Kecamatan Ruteng	200.000.000,00
8	Kecamatan Cibai	161.162.000,00
Jumlah		175.128.999.197,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
2.642.249.700,00	2.385.121.000,00	0,00

Pada TA 2023, Belanja Aset Tetap Lainnya direalisasikan seluruhnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp2.385.121.000,00 atau 90,27% dari anggaran senilai Rp2.642.249.700,00.

Tabel 63. Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

No.	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.471.494.000,00	2.385.121.000,00	96,51	0,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	159.005.700,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.642.249.700,00	2.385.121.000,00	96,51	0,00

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

5.1.2.3.1 Belanja Tak Terduga

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
5.000.000.000,00	3.604.625.600,00	5.329.997.314,00

Belanja Tak Terduga (BTT) dialokasikan pada APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam dan pelaksanaan kewenangan daerah lainnya. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 adalah Rp3.604.625.600,00 atau 72,09% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 mengalami penurunan jika dibanding dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 sebesar Rp1.725.371.714,00 atau 32,37%. Berikut rincian Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 64. Rincian Belanja Tak Terduga TA 2023

No.	Uraian	Nilai
1	Bantuan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor	3.582.125.600,00
2	Bantuan Santunan Dukacita	18.000.000,00
3	Pembayaran Kelebihan Pembayaran BPHTB	4.500.000,00
Jumlah		3.604.625.600,00

Rincian lebih lanjut atas Belanja Bantuan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 65. Rincian Bantuan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor TA 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana banjir pada saluran irigasi Wae Paling yang patah di Desa Golo Mendo Kec. Wae Rii	58.795.800,00
2	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana longsor pada badan jalan ruas jalan Tengku Tok - Pinggang, Kec. Cibal	227.599.000,00
3	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana longsor pada badan jalan ruas jalan Welong - Koko Kec. Wae Rii	169.506.000,00
4	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana longsor Badan Jalan Ruas Jalan Kuwu - Manong (Lokasi golo langkok) Kec. Rahong Utara	96.566.900,00
5	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana longsor Badan Jalan Ruas Jalan Kuwu - Manong (Desa Bea Kakor) Kec. Ruteng	115.057.100,00
6	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana longsor TPT DAS kali Wae Gogol RT 007 Kel. Pau Kec. Langke Rembong (rumah warga Bpk Petje Sakera, Bpk. Frans Sole, Bpk	106.666.500,00
7	Penanganan Bencana Pemulihan Sarana / Prasarana Vital Akibat Banjir pada Drainase RT.017 dan Saluran Drainase Ngencung Kel. Watu Kec. Langke Rembong	193.221.700,00
8	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana banjir jebol saluran / mercu bendungan Wae Ces, Kel. Karot Kec. Langke Rembong	58.498.800,00
9	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana tanah longsor pada Ruas Jalan Golo Nggorong - Compang Cibal kec. Cibal Barat (Segmen Kamp. Compang Cibal)	199.937.200,00
10	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana tanah longsor pada Ruas Jalan Sondeng - Liang Bua (Segmen Ranggih)	141.439.000,00
11	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana banjir Sp. Rj Jalan Cancar-Rs. St. Rafael Cancar	72.711.000,00
12	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana longsor yang mengancam robohnya pagar SDK Kumba I di Kel. Satar Tacik Kec. Langke Rembong	63.645.000,00
13	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana longsor pada saluran irigasi Wae Dese I yang terbawa longsor di Desa Bangka Dese Kec. Lelak	88.444.100,00
14	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana longsor pada badan jalan ruas jalan Bea Mese - Perak (Lokasi longsor SDI Perak), Kec. Cibal	128.666.700,00
15	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan sarana/prasarana Vital akibat bencana banjir Ambruknya Irigasi Wae Terep Desa Ngkaer Kec. Satar Mese	177.761.400,00
16	Konsultan Perencanaan penanganan bencana kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu kegiatan pelayanan publik Tahun 2023 (tersebar di beberapa lokasi)	37.259.000,00
17	Konsultan Pengawas penanganan bencana kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu kegiatan pelayanan publik Tahun 2023; tersebar	55.789.700,00
18	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.800.000,00
19	Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring kegiatan	25.040.000,00
20	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan Sarana / Prasarana Vital Perbaikan Deuiker Wae Bolas dan Deuiker Wae Wiko akibat banjir di Desa Nati Kec. Lelak	137.679.300,00
21	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan Sarana / Prasarana Vital Akibat Bencana Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Rura - Pering (Segmen Jembatan Wae Rura) Desa Rura Kec. Reok Barat	84.274.000,00
22	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan Sarana / Prasarana Vital akibat banjir berupa Perbaikan Deuiker Rj. Nggalak-Singkul Desa Nggalak Kec. Reok Barat	60.380.300,00
23	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan Sarana/Prasarana Vital Akibat Bencana Banjir pada Ruas Jalan Tengku Tok - Pinggang Lok. Tana Ngeo Ponto Dusun Rakas Desa Rado Kec. Cibal	92.464.000,00
24	Penanganan Darurat Bencana Pemulihan Sarana / Prasarana Vital Akibat Bencana Banjir Mengakibatkan Rumah Warga Terancam Roboh sebelah selatan Jembatan Wae Ces, Kel. Karot Kec. Langke Rembong	147.705.200,00
25	Konsultan Perencana Penanggulangan Darurat Bencana Pemulihan Sarana / Prasarana Vital Akibat Bencana Tahun 2023 (Tahap II)	26.547.500,00
26	Konsultan Pengawas Penanggulangan Darurat Bencana Pemulihan Sarana / Prasarana Vital Akibat Bencana (5 Lokasi ; tersebar)	28.586.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
27	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.800.000,00
28	Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring kegiatan	9.600.000,00
29	Belanja Barang Bantuan Perbaikan darurat Akibat Bencana yang terjadi dari bulan Desember 2022 s/d bulan Februari 2023 di Kabupaten Manggarai	265.905.700,00
30	Biaya ongkos angkut distribusi bantuan	17.769.000,00
31	Belanja Barang Bantuan Perbaikan darurat Akibat Bencana yang terjadi dari bulan april 2022 s/d bulan Juli 2023 di Kabupaten Manggarai	321.788.400,00
32	Biaya ongkos angkut distribusi bantuan	17.305.500,00
33	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk POSKO Siaga Darurat Bencana Hindrometeorologi di Kabupaten Manggarai Periode Bulan Januari s/d Februari 2023 Sesuai Memo Bupati Nomor : PB.050/33/III/2023 Tanggal 08 Februari 2023	44.387.400,00
34	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk POSKO Siaga Darurat Bencana Hindrometeorologi di Kabupaten Manggarai Periode Bulan Maret 2023 Sesuai Memo Bupati Nomor : PB.050/33/II/2023 Tanggal 08 Februari 2023	26.475.000,00
35	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Membiayai Penanganan Pembersihan Material Longsor Yang Menutupi Badan Jalan Yang Terjadi di Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Sesuai Memo Bupati Nomor : PB.050/88/III/2023 Tanggal 28 Maret 2023	76.114.000,00
36	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Kegiatan POSKO Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Periode Bulan April 2023 Sesuai Memo Bupati Nomor : PB.050/33/II/2023 Tanggal 08 Februari 2023	19.980.000,00
37	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Longsoran Menutupi Badan Jalan di Kabupaten Manggarai Tahap II Tahun 2023 Sesuai Memo Bupati Nomor : PB.050/121/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023	61.594.000,00
38	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Membiayai Pembersihan Material Longsor Yang Menutupi Badan Jalan Yang Terjadi di wilayah Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai Sesuai Memo Bupati Nomor : PB.050/167/VIII/2023 Tanggal 02 Agustus 2023	41.314.000,00
39	Belanja Tidak Terduga (BTT) Berupa Biaya Kegiatan Konsumsi Minum Pemadaman Kebakaran Hutan di Pong Praseng Desa Persiapan Benteng Todo, Kec. Cibal Pada Tgl 28 s/d 29 September 2023	1.500.000,00
40	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Manggarai dari Bulan Agustus s/d Desember 2023 Berupa Penanganan Bantua Darurat Bagi Korban Bencana Sesuai Memo Bupati No : PB.050/250/XII/2023 Tanggal 12 Desember 2023	63.551.200,00
Jumlah		3.582.125.600,00

Sedangkan rincian Bantuan Santunan Dukacita disajikan pada tabel berikut.

Tabel 66. Rincian Bantuan Santunan Dukacita TA 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Manggarai Berupa Bantuan Santunan Duka Cita Bagi Korban Tenggelam di Kelurahan Baru Kec. Reok da Desa Pinggang Kec. Cibal Sesuai Memo Bupati Nomor : PB.050/90/III/2023 Tanggal 28 Maret 2023	4.500.000,00
2	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Manggarai Berupa Bantuan Santunan Duka Cita Bagi Korban Tenggelam di Kali Wae Renca Desa Riung Kecamatan Cibal Sesuai Memo Bupati Nomor : PB.050/132/VI/2023 Tanggal 06 Juni 2023	3.000.000,00
3	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Manggarai Berupa Bantuan Santunan Duka Cita Bagi Korban Tenggelam di Desa Ulu Belang, Kecamatan Satar Mese dan Kelurahan Mbumuku, Kecamatan Langke Rembong	3.000.000,00
4	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Manggarai Berupa Santunan Duka Cita Bagi Korban Bencana Sosial di Desa Nao, Kecamatan Satar Mese Utara Sesuai Memo Bupati Nomor : PB.050/168/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023	1.500.000,00
5	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Manggarai Berupa Santunan Duka Cita Bagi Korban Bencana Tenggelam di Bendungan Wae Ces di Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong	6.000.000,00
Jumlah		18.000.000,00

Belanja Tidak Terduga untuk penanganan kelebihan pembayaran BPHTB senilai Rp4.500.000,00 sesuai dengan Memo Bupati Nomor 005/BU/214/X/2023 Tanggal 27 Oktober 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.3. Transfer

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
193.652.738.585,00	193.308.409.085,00	183.121.727.308,00

Realisasi Belanja Transfer TA 2023 adalah Rp193.308.409.085,00 atau 99,82% dari Anggaran sebesar Rp193.652.738.585,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 67. Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Transfer bagi Hasil Pendapatan	5.295.494.085,00	4.951.164.585,00	93,50	3.847.557.908,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	188.357.244.500,00	188.357.244.500,00	100,00	179.274.169.400,00
	Jumlah	193.652.738.585,00	193.308.409.085,00	99,82	183.121.727.308,00

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
5.295.494.085,00	4.951.164.585,00	3.847.557.908,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp4.951.164.585,00 atau 93,50% dari anggaran sebesar Rp5.295.494.085,00 yang seluruhnya merupakan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa diberikan kepada 145 desa di Kabupaten Manggarai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

5.1.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
188.357.244.500,00	188.357.244.500,00	179.274.169.400,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp188.357.244.500,00 atau 100 dari anggaran sebesar Rp188.357.244.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 68. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian Belanja Transfer	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dana Desa	127.982.480.000,00	127.982.480.000,00	100,00	179.274.169.400,00
2	Alokasi Dana Desa	60.374.764.500,00	60.374.764.500,00	100,00	0,00
	Jumlah	188.357.244.500,00	188.357.244.500,00	100,00	179.274.169.400,00

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diberikan kepada 145 desa di Kabupaten Manggarai, dengan rincian realisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

Belanja Bantuan Keuangan ke Desa – Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2023 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Untuk Tahun Anggaran 2023, dari alokasi senilai Rp127.982.480.000,00 telah disalurkan 100,00% ke 145 desa di Kabupaten Manggarai dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023. Rincian lebih lanjut atas penyaluran Dana Desa tersebut disajikan pada **Lampiran 2**.

Terdapat Belanja Tunjangan Penghasilan Tetap bagi Aparat Desa, Belanja Iuran Kesehatan, Kematian, Kecelakaan Kepala dan Aparat Desa yang dialokasikan dari Alokasi Dana Desa senilai Rp60.374.764.500,00. Rincian lebih lanjut atas Alokasi Dana Desa disajikan pada **Lampiran 3**.

5.1.4. Pembiayaan

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
87.001.833.808,00	86.863.820.548,20	55.512.717.603,09

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2023 sebesar Rp86.863.820.548,20. Rincian pembiayaan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 69. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	144.510.529.460,00	144.297.516.200,20	74.809.717.603,09
2.	Pengeluaran Pembiayaan	57.508.695.652,00	57.433.695.652,00	19.297.000.000,00
3.	Pembiayaan Neto	87.001.833.808,00	86.863.820.548,20	55.512.717.603,09

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
144.510.529.460,00	144.297.516.200,20	74.809.717.603,09

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Manggarai TA 2023 sebesar Rp144.297.516.200,20 atau 99,85% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp144.510.529.460,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	40.761.247.014,00	40.548.233.754,20	99,48	68.559.000.049,09
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	103.749.282.446,00	103.749.282.446,00	100,00	6.250.717.554,00
Jumlah		144.510.529.460,00	144.297.516.200,20	99,85	74.809.717.603,09



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.4.1.1. Penggunaan SiLPA

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
40.761.247.014,00	40.548.233.754,20	68.559.000.049,09

Jumlah sebesar Rp40.548.233.754,20 merupakan realisasi penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp40.761.247.014,00 yang digunakan di TA 2023. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 terdiri dari :

1	Kas di Kas Daerah	25.925.927.971,75	
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	116.332.162,00	
3	Kas di Bendahara Penerimaan	8.784.000,00	
4	Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	
5	Kas di Bendahara FKTP	1.214.202.935,00	
6	Kas Dana BOSP	384.904.092,00	
7	Kas di BLUD	12.960.776.557,97	
8	Kas Lainnya	150.319.296,08	
10	Jumlah (1 s/d 9)		40.761.247.014,80
11	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		(141.117.632,00)
12	Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 (10 – 11)		40.620.129.382,80

5.1.4.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
103.749.282.446,00	103.749.282.446,00	6.250.717.554,00

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2023 sebesar Rp103.749.282.446,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2022 yakni naik sebesar Rp97.498.564.892,00 atau 1559,80%. Atas kenaikan realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah disebabkan oleh pencairan sisa Pinjaman Daerah TA 2022 pada TA 2023.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
57.508.695.652,00	57.433.695.652,00	19.297.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Manggarai TA 2023 sebesar Rp57.433.695.652,00 atau 99,87 yang dianggarkan sebesar Rp57.508.695.652,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)		Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.900.000.000,00	4.825.000.000,00	98,47	19.297.000.000,00
2	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	52.608.695.652,00	52.608.695.652,00	100,00	0,00
Jumlah		57.508.695.652,00	57.433.695.652,00	99,87	19.297.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.4.2.1. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
<u>4.900.000.000,00</u>	<u>4.825.000.000,00</u>	<u>19.297.000.000,00</u>

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp4.825.000.000,00 merupakan 98,47% dari anggaran. Realisasi tersebut diperuntukkan sebagai penyertaan modal pada Bank NTT sebesar Rp1.000.000.000,00 dan PDAM Tirta Komodo sebesar Rp3.825.000.000,00.

5.1.4.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
<u>52.608.695.652,00</u>	<u>52.608.695.652,00</u>	<u>0,00</u>

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp52.608.695.652,00 berupa Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) – BUMN – Jangka Menengah. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan realisasi Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) – BUMN – Jangka Menengah TA 2022. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2022, atas Pinjaman Dalam Negeri dari Bank NTT belum dilakukan pembayaran pokok pinjaman.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp27.222.536.988,07. Terdapat penurunan SiLPA sebesar Rp13.397.592.394,73 jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp40.620.129.382,80.

SiLPA Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

- Surplus/Defisit	(59.641.283.560,13)	
- Pembiayaan Netto	86.863.820.548,20	+
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran	<u>27.222.536.988,07</u>	



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp40.620.129.382,80. Terdapat Penurunan Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp27.938.870.666,29 jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp68.559.000.049,09.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada Tahun 2023 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan senilai Rp40.548.233.754,20.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 senilai Rp27.222.536.988,07. Terdapat penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp13.397.592.394,73 jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp40.620.129.382,80.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

- Surplus/Defisit Anggaran	(59.641.283.560,13)	
- Pembiayaan Netto	86.863.820.548,20	+
SILPA Tahun berjalan	<u>27.222.536.988,07</u>	

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Pada Tahun 2023 terdapat koreksi kesalahan pembukuan pada Tahun sebelumnya sebesar Rp71.895.628,60, dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi atas Kas Daerah sebesar Rp5,00. Koreksi tersebut disebabkan karena pada Tahun 2022 Bank NTT kurang mendebet SP2D Nomor 6110/LS/2022. Seharusnya jumlah yang didebet adalah sebesar Rp20.936.765,00 namun Bank NTT hanya mendebet sebesar Rp20.936.760,00;
2. Koreksi atas Dana Pribadi Bendahara BOP yang disetorkan pada saat pembukaan rekening BOP yang belum menjadi Rekening Giro dan belum diakui sebagai Saldo Awal Kas di Rekening BOP Kesetaraan pada Sekolah Kegiatan Belajar (SKB) Randong sebesar Rp31.851,38;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3. Koreksi atas Dana Pribadi Bendahara BOP yang disetorkan pada saat pembukaan rekening BOP yang belum menjadi Rekening Giro dan belum diakui sebagai Saldo Awal Kas di Rekening BOP PAUD pada sembilan sekolah sebesar Rp194.765,85;
4. Koreksi kurang atas SiLPA BOS yang disetorkan oleh Bendahara BOS ke rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp72.226.869,00; dan
5. Koreksi atas penyesuaian Saldo Jasa Giro Sekolah dimana pencatatan yang dilakukan selama ini tidak memasukkan dua angka dibelakang koma pada 222 sekolah sebesar Rp104.618,17.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp27.222.536.988,07 sedangkan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 sebesar Rp40.620.129.382,80.

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 terdiri dari:

1	Kas di Kas Daerah	8.968.913.818,11	
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	110.111.657,00	
3	Kas di Bendahara Penerimaan	759.262.410,00	
4	Kas di Bendahara BOK Puskesmas	1.664.461.786,00	
5	Kas di Bendahara FKTP	2.405.451.749,00	
6	Kas di Bendahara BOSP	1.144.625.287,48	
7	Kas di BLUD	12.149.111.536,83	
8	Kas Lainnya	22.053.900,65	
9	Jumlah (1 s/d 8)		27.223.992.145,07
10	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		(1.455.157,00)
11	Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 (9 + 10)		27.222.536.988,07



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.1. Aset

31 Desember 2023
(Rp)

2.001.684.987.727,65

31 Desember 2022
(Rp)

2.296.765.944.510,39

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.001.684.987.727,65 dan Rp2.296.765.944.510,39. Penurunan Aset Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp295.080.956.782,74 atau 12,85%. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 72. Aset per 31 Desember Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Aset Lancar	59.608.598.879,21	83.517.869.412,03
2	Investasi Jangka Panjang	154.940.907.674,51	150.244.258.428,57
3	Aset Tetap	1.692.250.188.868,14	2.049.123.136.543,76
4	Properti Investasi	79.304.968.243,63	0,00
5	Aset Lainnya	15.580.324.062,16	13.880.680.126,03
Jumlah		2.001.684.987.727,65	2.296.765.944.510,39

5.3.1.1. Aset Lancar

31 Desember 2023
(Rp)

Rp59.608.598.879,21

31 Desember 2022
(Rp)

Rp83.517.869.412,03

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Kas di Bendahara BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Transfer, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban dibayar Dimuka dan Persediaan.

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp59.608.598.879,21 dan Rp83.517.869.412,03. Penurunan Aset Lancar pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp23.909.270.532,82 atau 28,63%. Rincian Aset Lancar Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 73. Saldo Aset Lancar per 31 Desember Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Kas dan Setara Kas	27.223.992.145,07	40.761.247.014,80
2	Piutang	32.435.071.451,64	42.313.958.914,06
3	Penyisihan Piutang	(12.501.345.721,30)	(15.674.676.869,83)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
4	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
5	Persediaan	12.450.881.003,80	16.117.340.353,00
Jumlah		59.608.598.879,21	83.517.869.412,03

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Rincian Kas dan Setara Kas Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 74. Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Kas dan Setara Kas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	8.968.913.818,11	25.925.927.971,75
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	110.111.657,00	116.332.162,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	759.262.410,00	8.784.000,00
4	Kas di BLUD	12.149.111.536,83	12.960.776.557,97
5	Kas di Bendahara FKTP	2.405.451.749,00	1.214.202.935,00
6	Kas di Bendahara BOSP	1.144.625.287,48	384.904.092,00
7	Kas di Bendahara BOK	1.664.461.786,00	0,00
8	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	22.053.900,65	150.319.296,08
Jumlah		27.223.992.145,07	40.761.247.014,80

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023
(Rp)

Rp8.968.913.818,11

31 Desember 2022
(Rp)

Rp25.925.927.971,75

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Per 31 Desember 2023 pada PT. Bank NTT Cabang Ruteng, PT. Bank Mandiri Cabang Ruteng, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ruteng dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pembantu Ruteng. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.968.913.818,11 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.925.927.971,75. Rincian Kas Daerah di Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 pada 4 Rekening BUD adalah sebagai berikut.

Tabel 75. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per Rekening

No.	Uraian		31 Desember 2023	31 Desember 2022
A.	Saldo Menurut Rekening Koran			
1	Rekening pada Bank NTT			
1.1	006.01.04000001-0	Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Manggarai	8.940.634.558,17	25.097.635.903,27
1.2	006.01.04000135-0	Rekening Penerimaan Daerah (Rekening Penampung PAD Pemerintah Kabupaten Manggarai)	26.035.363,53	828.245.991,37
2	Rekening pada Bank Mandiri			
2.1	1810002215151	Rekening Penerima Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	2.197.814,30	0,00
2.2	1610000110804	Rekening yang digunakan untuk Deposito	5.110,11	5.110,11
3	Rekening pada Bank BNI			
3.1	0054730749	Rekening yang digunakan untuk Deposito	40.967,00	40.967,00
3	Rekening pada Bank BRI			
3.1	027301004050400	Rekening yang digunakan untuk Deposito	0,00	0,00
Total Saldo Menurut Rekening Koran			8.968.913.813,11	25.925.927.971,75
B.	Rekonsiliasi Bank			
1	Tambah			



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Koreksi Saldo Kas RKUD Tahun 2022 disebabkan karena pada Tahun 2022 Bank NTT kurang mendebet SP2D Nomor 6110/LS/2022	5,00	0,00
Saldo Kas di Kas Daerah Setelah Rekonsiliasi		8.968.913.818,11	25.925.927.971,75

1. Pada PT. Bank NTT Cabang Ruteng, terdapat 2 Rekening BUD. yaitu:
 - a. Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Nomor Rekening: 006.01.04000001-0 merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meliputi penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat serta pengeluaran atas belanja daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/274/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/22/2023 Tentang Penetapan Rekening Giro Milik Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023. Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai. Saldo Akhir Bank pada rekening 006.01.04000001-0 sebesar Rp8.940.634.558,17.
 - b. Rekening Penerimaan Daerah (Rekening Penampung PAD Pemerintah Kabupaten Manggarai) dengan Nomor Rekening: 006.01.04000135-0. merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan dana Pemerintah Kabupaten Manggarai. yang meliputi transaksi penerimaan dana transfer dari Pemerintah Provinsi. transaksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai termasuk untuk menampung pendapatan jasa giro yang di-*autodebet*-kan dari Rekening Kas Umum Daerah dan dari seluruh Rekening Giro Bendahara Pengeluaran SKPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/274/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/22/2023 Tentang Penetapan Rekening Giro Milik Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023. Saldo Akhir Bank pada rekening 006.01.04000135-0 sebesar Rp26.035.363,53.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>759.262.410,00</u>	<u>8.784.000,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp759.262.410,00 merupakan saldo yang terdapat di Dinas Peternakan sebesar Rp680.000,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp758.582.410,00. Saldo sebesar Rp759.262.410,00 tersebut telah disetor ke RKUD bulan Januari 2024, dengan rincian:

1. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan disetor bulan Januari Tahun 2024; dan
2. Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah merupakan setoran pendapatan pajak yang masih ada di rekening penampungan Bank NTT. Atas uang sejumlah Rp758.782.410,00 tersebut. Bank NTT baru melakukan pemindahbukuan ke RKUD pada Bulan Januari Tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>110.111.657,00</u>	<u>116.332.162,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai sebesar Rp110.111.657,00 merupakan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada beberapa OPD yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022 antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sisa Kas tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari tahun 2024.

Tabel 76. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Nama OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	61.503.300,00	
2	Sekretariat Daerah	47.658.357,00	
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	550.000,00	370,00
4	Kecamatan Lelak	400.000,00	
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		35.483.800,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		25.780.000,00
7	Bagian Umum		19.656.592,00
8	Kecamatan Reok Barat		17.837.000,00
9	Kecamatan Reok		117.400,00
10	Kecamatan Satar Mese Utara		17.457.000,00
	Jumlah	110.111.657,00	116.332.162,00

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>12.149.111.536,83</u>	<u>12.960.776.557,97</u>

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 senilai Rp12.149.111.536,83 merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Ruteng. Saldo Kas per 31 Desember 2023 senilai Rp12.149.111.536,83 mengalami penurunan senilai Rp811.665.021,14 atau 6,26% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp12.960.776.557,97. Penjelasan mutasi saldo Kas di BLUD sebagai berikut.

Tabel 77. Rincian Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	12.960.776.557,97
2	Koreksi Saldo Awal	0,00
	a. Tambah	0,00
	b. Kurang	0,00
3	Saldo Awal Setelah Koreksi	12.960.776.557,97
4	Pendapatan	65.208.938.848,84
5	Belanja	66.020.603.869,98
	a. Pegawai	86.400.000,00
	b. Barang dan Jasa	65.635.563.869,98
	c. Modal	298.640.000,00
6	Saldo Akhir	12.149.111.536,83

5.3.1.1.5. Kas di FKTP

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>2.405.451.749,00</u>	<u>1.214.202.935,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.405.451.749,00 merupakan jumlah seluruh saldo rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdapat di 23 Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Tabel 78. Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

No.	Nama Puskesmas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Anam	29.806.054,00	0,00
2	Bangka Kenda	95.638.096,00	28.239.471,00
3	Bea Mese	84.667.164,00	17.110.351,00
4	Cancar	222.209.007,00	109.530.313,00
5	Dintor	59.053.600,00	37.626.203,00
6	Iteng	97.065.166,00	49.540.554,00
7	Ketang	82.338.497,00	40.485.779,00
8	Kota	236.497.002,00	112.563.573,00
9	La'o	174.694.489,00	113.311.284,00
10	Langke Majok	90.637.878,00	88.111.740,00
11	Loce	67.630.317,00	22.498.592,00
12	Nanu	68.239.317,00	24.350.830,00
13	Narang	85.667.401,00	43.614.412,00
14	Pagal	92.358.246,00	52.680.718,00
15	Ponggeok	130.024.722,00	64.982.386,00
16	Reo	189.917.305,00	159.366.552,00
17	Timung	71.187.175,00	10.917.836,00
18	Todo	45.761.494,00	0,00
19	Wae Codi	155.439.230,00	65.651.322,00
20	Wae Kajong	33.742.271,00	49.383.770,00
21	Wae Mbeleng	114.142.452,00	33.755.487,00
22	Wangko	125.790.582,00	76.186.127,00
23	Watu Alo	52.944.284,00	14.295.635,00
Jumlah		2.405.451.749,00	1.214.202.935,00

Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas/FKTP diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Kepada SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD selaku BUD. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap Puskesmas/FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan belanja setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD selaku BUD.

Penetapan rekening bank Dana Kapitasi JKN pada puskesmas Dinas Kesehatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900.940/BKAD/72/9/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023.

Seluruh rekening JKN tersebut telah dilaporkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dan diakui sebagai pendapatan. Pendapatan Dana Kapitasi JKN digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.

5.3.1.1.6. Kas Dana BOK Puskesmas

31 Desember 2023

(Rp)

1.664.461.786,00

31 Desember 2022

(Rp)

0,00

Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.664.461.786,00 merupakan saldo akhir kas Dana BOK yang terdapat di



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

23 Puskesmas Kabupaten Manggarai. Dana BOK ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dana BOK Puskesmas merupakan dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 11 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023.

Adapun jumlah Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Manggarai yang menerima dan mengelola Dana BOK pada Tahun 2023 sebanyak 21 Puskesmas. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 79. Rincian Saldo Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2023

No.	Puskesmas	Pendapatan	Belanja	Saldo per 31 Desember 2023
1	Bangka Kenda	908.611.900,00	870.506.718,00	38.105.182,00
2	Bea Mese	724.303.300,00	687.518.706,00	36.784.594,00
3	Cancar	1.484.368.900,00	1.481.223.898,00	3.145.002,00
4	Dintor	854.942.200,00	853.164.317,00	1.777.883,00
5	Iteng	940.303.700,00	931.850.204,00	8.453.496,00
6	Ketang	1.069.728.100,00	1.069.663.321,00	64.779,00
7	Kota	999.803.700,00	812.375.634,00	187.428.066,00
8	La'o	788.619.300,00	719.436.096,00	69.183.204,00
9	Langke Majok	1.734.998.300,00	1.462.204.516,00	272.793.784,00
10	Loce	852.660.900,00	850.616.601,00	2.044.299,00
11	Nanu	677.758.900,00	677.741.821,00	17.079,00
12	Narang	611.518.600,00	526.703.229,00	84.815.371,00
13	Pagal	1.484.681.000,00	1.203.296.110,00	281.384.890,00
14	Ponggeok	1.035.673.100,00	1.016.648.865,00	19.024.235,00
15	Reo	1.182.376.300,00	1.181.773.089,00	603.211,00
16	Timung	607.942.300,00	583.322.556,00	24.619.744,00
17	Wae Codi	1.182.458.900,00	1.002.277.898,00	180.181.002,00
18	Wae Kajong	756.516.600,00	621.056.704,00	135.459.896,00
19	Waembeleng	797.668.900,00	797.254.240,00	414.660,00
20	Wangko	1.083.331.000,00	910.381.619,00	172.949.381,00
21	Watu Alo	498.761.200,00	353.549.172,00	145.212.028,00
	Jumlah	20.277.027.100,00	18.612.565.314,00	1.664.461.786,00

5.3.1.1.7. Kas Dana BOSP

31 Desember 2023

(Rp)

1.144.625.287,48

31 Desember 2022

(Rp)

384.904.092,00

Saldo Kas Dana Bos per 31 Desember 2023 senilai Rp1.144.625.287,48. Saldo tersebut mengalami kenaikan senilai Rp759.721.195,48 atau sebesar 197,38% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp384.904.092,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 80. Rincian Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas BOS Sekolah Dasar Negeri	784.577.157,31	258.770.207,00
2	Kas BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri	359.821.512,94	126.133.885,00
3	Kas BOP PAUD	194.765,85	0,00
4	Kas BOP Kesetaraan	31.851,38	0,00
	Jumlah	1.144.625.287,48	384.904.092,00

Satuan pendidikan negeri di Kabupaten Manggarai yang menerima dan mengelola dana BOS pada Tahun 2023 adalah sebanyak 247 sekolah, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 81. Rincian Satuan Pendidikan Negeri yang Menerima dan Mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOP PAUD)

No.	Status Satuan Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sekolah Menengah Pertama Negeri	69 sekolah	Dana BOS
2	Sekolah Dasar Negeri	165 sekolah	Dana BOS
3	Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini	12 sekolah	Dana BOP PAUD
4	Sekolah Kesetaraan	1 sekolah	Dana BOP Kesetaraan
Jumlah		247 sekolah	

Rincian saldo akhir Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 4** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

5.3.1.1.8. Kas Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
22.053.900,65	150.319.296,08

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.053.900,65 terdiri dari:

1. Jasa Giro BOS yang belum disetor sebesar Rp10.569.228,33 dan Jasa Giro pada Dinas PMPTSP sebesar Rp0,74;
2. Utang PFK pada bendahara yang belum disetor antara lain PFK BOS sebesar Rp252.157,00 dan PFK pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp203.000,00; dan
3. Sisa Kas di Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) sebesar Rp11.029.514,58.

5.3.1.1.2. Piutang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
19.933.725.730,34	26.639.282.044,23

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap penerimaan kas. baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain. Saldo Piutang per 31 Desember 2023 setelah penyisihan sebesar Rp19.933.725.730,34 mengalami penurunan sebesar Rp6.705.556.313,89 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.639.282.044,23.

Saldo piutang pendapatan disajikan bersih/netto per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 82. Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
a	Piutang Pendapatan	32.435.071.451,64	42.313.958.914,06	(9.878.887.462,42)
1	Piutang Pajak Daerah	17.298.879.801,64	18.252.157.196,64	(953.277.395,00)
2	Piutang Retribusi Daerah	2.707.233.953,00	2.083.708.668,00	623.525.285,00
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	4.745.969.654,00	9.899.085.688,42	(5.153.116.034,42)
4	Piutang Transfer	7.682.988.043,00	10.583.561.257,00	(2.900.573.214,00)
5	Piutang Lainnya	0,00	1.495.446.104,00	(1.495.446.104,00)
b	Penyisihan Piutang	(12.501.345.721,30)	(15.674.676.869,83)	3.173.331.148,53
1	Penyisihan Piutang Pajak	(9.246.867.615,39)	(10.846.066.928,62)	1.599.199.312,15
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.135.213.634,50)	(2.083.708.668,00)	(51.504.966,50)
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(1.119.264.471,41)	(2.744.901.273,21)	1.625.636.802,88
Jumlah		19.933.725.730,34	26.639.282.044,23	



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.2.1. Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2023

(Rp)

17.298.879.801,64

31 Desember 2022

(Rp)

18.252.157.196,64

Piutang Pajak merupakan Saldo Piutang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah karena adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dan sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.298.879.801,64 mengalami penurunan mencapai Rp953.277.395,00 dari Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.252.157.196,64 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 83. Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2022	Koreksi		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2023
			Tambah	Kurang			
1.	Piutang Pajak Hotel	36.135.399,00	5.339.000,00	0,00	26.851.000,00	8.799.000,00	59.526.399,00
2.	Piutang Pajak Restoran	29.540.500,00	3.168.250,00	0,00	57.017.016,00	3.168.250,00	86.557.516,00
3.	Piutang Pajak Hiburan	1.330.500,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	820.500,00
4.	Piutang Pajak Reklame	121.918.250,00	65.000,00	0,00	12.620.000,00	2.410.000,00	132.193.250,00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	478.069.957,00	0,00	478.069.957,00
6.	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	572.772,00	0,00	56.912.591,00	572.772,00	56.912.591,00
7.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	532.068.903,40	134.089.318,00	0,00	101.680.867,00	67.207.035,00	700.632.053,40
8.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	17.531.163.644,24	0,00	0,00	1.787.890.555,00	3.534.886.664,00	15.784.167.535,24
Jumlah		18.252.157.196,64	143.234.340,00	0,00	2.521.041.986,00	3.617.553.721,00	17.298.879.801,64

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Pajak Daerah sebelum Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 sebesar Rp 59.526.399,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp 36.135.399,00 ditambah dengan koreksi saldo awal sebesar Rp5.339.000,00 akibat terdapat piutang yang belum tercatat ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp26.851.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Pajak Hotel sebesar Rp8.799.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Hotel Tahun 2022 sebesar Rp 26.851.000,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Penambahan Piutang Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp8.799.000,00.
- 2) Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp86.557.516,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp29.540.500,00 ditambah dengan koreksi saldo awal sebesar Rp3.168.250,00 akibat terdapat piutang yang belum tercatat ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp57.017.016,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Pajak Restoran sebesar Rp3.168.250,00. dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Pelunasan Piutang Restoran Tahun 2022 sebesar Rp57.017.016,00; dan
 - b. Penambahan Piutang Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp3.168.250,00.
- 3) Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 820.500,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp1.330.500,00 dikurangi penyetoran piutang Pajak Hiburan sebesar Rp510.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Pelunasan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022 sebesar Rp510.000,00.
- 4) Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp132.193.250,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp121.918.250,00 ditambah dengan koreksi saldo awal sebesar Rp65.000,00 akibat terdapat piutang yang belum tercatat ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp12.620.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Pajak Reklame sebesar Rp2.410.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Pelunasan Piutang Reklame Tahun 2022 sebesar Rp12.620.000,00; dan
 - b. Penambahan Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp2.410.000,00.
- 5) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan tidak ada saldo awal. Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp478.069.957,00 merupakan penambahan piutang atas pendapatan Pajak Penerangan Jalan tahun berjalan yang telah diterima pada tanggal 12 Januari 2024.
- 6) Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah tidak ada saldo awal. Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.912.591,00 merupakan koreksi tambah awal Pajak Air Tanah sebesar Rp572.772,00 akibat piutang yang tidak dicatat di tahun sebelumnya dan ditambah Piutang Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp56.912.591,00 dikurangi penyetoran piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp572.772,00. dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Pelunasan atas Piutang Air Tanah Tahun 2022 sebesar Rp572.772,00; dan
 - b. Penambahan Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp56.912.591,00.
- 7) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 sebesar Rp700.632.053,40 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp532.068.903,40 ditambah dengan koreksi saldo awal sebesar Rp134.089.318,00 akibat terdapat piutang yang belum tercatat ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp101.680.867,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp67.207.035,00. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 sebesar Rp101.680.867,00; dan
- b. Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 sebesar Rp67.207.035,00.

8) Piutang PBB-P2

Saldo Piutang PBB P2 per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.784.167.535,24 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp17.531.163.644,24 ditambah penambahan Piutang tahun berjalan sebesar Rp1.787.890.555,00 dikurangi total cicilan pelunasan/penyetoran Piutang Tahun 2023 sebesar Rp3.534.886.664,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB P2 tahun 2014 sebesar Rp10.644.589,00;
- b. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB P2 tahun 2015 sebesar Rp30.991.815,00;
- c. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB P2 tahun 2016 sebesar Rp26.700.440,00;
- d. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB P2 tahun 2017 sebesar Rp21.477.062,00;
- e. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB P2 tahun 2018 sebesar Rp19.125.760,00;
- f. Pelunasan/penyetoran piutang PBB P2 Tahun 2019 sebesar Rp28.177.085,00;
- g. Pelunasan/penyetoran piutang PBB P2 Tahun 2020 sebesar Rp37.218.004,00;
- h. Pelunasan/penyetoran piutang PBB P2 Tahun 2021 sebesar Rp55.507.802,00;
- i. Pelunasan/penyetoran piutang PBB P2 Tahun 2022 sebesar Rp179.422.897,00.
- j. Penghapusan Piutang PBB P2 Tahun 1999 s.d. 2011 berdasarkan SK Bupati Manggarai Nomor HK/328/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Manggarai sebesar Rp3.125.621.210,00.

5.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>2.707.233.953,00</u>	<u>2.083.708.668,00</u>

Saldo Piutang Retribusi merupakan Saldo Piutang Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.707.233.953,00 mengalami kenaikan sebesar Rp623.525.285,00 dari saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.083.708.668,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 84. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Koreksi		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah	Kurang			
1.	Piutang Retribusi Ruko	107.571.000,00	0,00	0,00	99.222.000,00	48.492.000,00	158.301.000,00
2.	Piutang Retribusi Ruko (<i>Shopping Center</i>)	15.566.250,00	0,00	0,00	15.111.375,00	5.456.250,00	25.221.375,00
3.	Piutang Retribusi Rumah Dinas	276.782.450,00	7.702.800,00	0,00	0,00	28.211.300,00	256.273.950,00
4.	Piutang Retribusi Pasar	1.683.788.968,00	0,00	0,00	706.719.150,00	159.057.990,00	2.231.450.128,00
5.	Piutang Retribusi Pasar Rakyat	0,00	13.750.000,00	0,00	35.987.500,00	13.750.000,00	35.987.500,00
Jumlah		2.083.708.668,00	21.452.800,00	0,00	857.040.025,00	254.967.540,00	2.707.233.953,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Retribusi Daerah sebelum Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Piutang Retribusi Ruko

Saldo Piutang Retribusi Ruko per 31 Desember 2023 sebesar Rp158.301.000,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp107.571.000,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp99.222.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi Ruko sebesar Rp48.492.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Retribusi Ruko Tahun 2022 sebesar Rp33.492.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp15.000.000,00; dan
- b. Penambahan Piutang Retribusi Ruko Tahun 2023 sebesar Rp99.222.000,00.

2) Piutang Retribusi *Shopping Center*

Saldo Piutang Retribusi *Shopping Center* per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.221.375,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp15.566.250,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp15.111.375,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi *Shopping Center* sebesar Rp5.456.250,00. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Retribusi *Shopping Center* Tahun 2021 sebesar Rp5.456.250,00; dan
- b. Penambahan Piutang Retribusi *Shopping Center* Tahun 2023 sebesar Rp15.111.375,00.

3) Piutang Retribusi Rumah Dinas

Saldo Piutang Retribusi Rumah Dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp256.273.950,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp276.782.450,00 ditambah koreksi saldo awal akibat kurang catat atas piutang tahun 2022 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp7.702.800,00 dengan rincian SKRD No. 0000047/2022 sebesar Rp3.030.000,00, SKRD No. 0000190/2022 sebesar Rp600.000,00, SKRD No. 0000020/2022 sebesar Rp2.872.800,00, dan SKRD No. 0000003/2022 sebesar Rp1.200.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi Rumah Dinas sebesar Rp28.211.300,00. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Retribusi Rumah Dinas Tahun 2022 sebesar Rp17.350.800,00, Tahun 2021 sebesar Rp3.630.000,00, Tahun 2020 sebesar Rp4.597.500,00, Tahun 2019 sebesar Rp1.193.000,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp1.440.000,00.

4) Piutang Retribusi Pasar

Saldo Piutang Retribusi Pasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.231.450.128,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp1.683.788.968,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp706.719.150,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi Pasar sebesar Rp159.057.990,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Retribusi Pasar Tahun 2022 sebesar Rp129.193.710,00, Tahun 2021 sebesar Rp21.029.280,00, Tahun 2020 sebesar Rp4.905.000,00, Tahun 2019 Rp3.090.000,00, Tahun 2018 sebesar Rp480.000,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp360.000,00; dan
- b. Penambahan Piutang Retribusi Pasar Tahun 2023 sebesar Rp706.719.150,00.

5) Piutang Retribusi Pasar Rakyat

Piutang Retribusi Pasar Rakyat tidak terdapat saldo awal. Saldo Piutang Retribusi Pasar Rakyat per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.987.500,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp0,00 ditambah koreksi saldo awal atas piutang yang tidak tercatat pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebesar Rp13.750.000,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp35.987.500,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi Pasar sebesar Rp13.750.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Retribusi Pasar Rakyat Tahun 2022 sebesar Rp8.000.000,00, Tahun 2021 sebesar Rp3.500.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp2.250.000,00; dan
- b. Penambahan Piutang Retribusi Pasar Tahun 2023 sebesar Rp35.987.500,00.

5.3.1.1.2.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>4.745.969.654,00</u>	<u>9.899.085.688,42</u>

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Saldo Piutang Lain-lain PAD yang SAH Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.745.969.654,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.153.116.034,42 dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.899.085.688,42.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 85. Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	298.565.913,00	0,00	0,00	298.565.913,00
2.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	155.403.920,00	0,00	0,00	155.403.920,00
3.	Dinas Pertanian	200.950.297,00	0,00	0,00	200.950.297,00
4.	Dinas Perikanan	14.883.552,00	0,00	0,00	14.883.552,00
5.	Bagian Umum	21.244.273,00	0,00	0,00	21.244.273,00
6.	Piutang Bunga Deposito TA. 2012 dan TA. 2013	5.515.068,00	0,00	0,00	5.515.068,00
7.	Piutang dari Penjualan Kendaraan Dinas	57.078.410,00	0,00	0,00	57.078.410,00
8.	Piutang Sisa Hasil Likuidasi PD Komodo Jaya	339.494.500,00	0,00	0,00	339.494.500,00
9.	Piutang BLUD	5.662.234.288,00	6.942.472.613,00	9.422.115.193,00	3.182.591.708,00
10.	Piutang atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas selisih perhitungan PTKP	3.143.359.388,00	0,00	2.713.569.040,00	429.790.348,00
11.	Remunerasi TDF	356.079,42	0,00	356.079,42	0,00
12.	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan	0,00	40.451.665,00	0,00	40.451.665,00
Jumlah		9.899.085.688,42	6.982.924.278,00	12.136.040.312,42	4.745.969.654,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebelum Penyisihan Piutang. Mutasi pada saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.182.591.708,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp5.662.234.288,00 dikurangi pelunasan piutang Tahun 2022 pada Tahun 2023 sebesar Rp5.662.234.288,00, ditambah nominal Piutang BLUD yang muncul pada Tahun 2023 yang tercantum pada Laporan Keuangan BLUD sebesar Rp6.942.472.613,00, dikurang dengan koreksi atas kelebihan pencatatan Piutang BPJS pada RSUD Ruteng sesuai dengan hasil konfirmasi (hanya mengakui status utang *eligible*) sebesar Rp3.759.880.905,00. Pengurangan Piutang BPJS senilai Rp3.759.880.905,00 yang tidak diakui oleh BPJS, terdiri dari:

- Pengajuan klaim pelayanan kesehatan Bulan Juli dari RSUD Ruteng ke BPJS senilai Rp16.678.700,00 pada tanggal 28 Desember 2023, namun BPJS baru menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim sebesar Rp16.678.400,00 pada tanggal 9 Januari 2024; dan
- Pengajuan klaim pelayanan kesehatan Bulan Desember dari RSUD Ruteng ke BPJS senilai Rp3.743.202.505,00 pada tanggal 19 Januari 2024.

Rincian lebih lanjut atas saldo Piutang BLUD disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 86. Rincian Saldo Piutang BLUD TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang)
1	Piutang Pihak Ke-3	82.782.840,00	84.574.220,00	(1.791.380,00)
2	Piutang Pasien Umum	156.969.468,00	156.969.468,00	0,00
3	Piutang BPJS	2.942.839.400,00	5.420.690.600,00	(2.477.851.200,00)
	Jumlah	3.182.591.708,00	5.662.234.288,00	2.479.642.580,00

2) Piutang atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas selisih perhitungan PTKP

Saldo Piutang atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas selisih perhitungan PTKP sebesar Rp429.790.348,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp3.143.359.388,00 dikurang dengan koreksi saldo awal sebesar Rp2.568.649.860,00 dikurang dengan piutang yang telah dikompensasi selama Tahun 2023 sebesar Rp441.754.043,00;

3) Piutang Remunerasi TDF

Saldo Piutang Remunerasi TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp356.079,42 dikurang dengan Pengurangan Piutang dan Aset Lain - Lain TA 2022 terkait penarikan dana TDF yang sebelumnya diakui seluruhnya sebagai Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp356.079,42; dan

4) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan

Saldo Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan sebesar Rp40.451.665,00 merupakan nominal Denda Keterlambatan atas Delapan Paket Pekerjaan pada Dinas PPO. Atas jumlah tersebut, telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.261.252,00 sesuai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 135/G tanggal 5 Januari 2024.

5.3.1.1.2.4. Piutang Transfer

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>7.682.988.043,00</u>	<u>10.583.561.257,00</u>

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.682.988.043,00 merupakan saldo Piutang Transfer DBH Pajak sebesar Rp40.915.000,00 dan saldo Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp7.642.073.043,00. Saldo Piutang Transfer DBH Pajak sebesar Rp40.915.000,00 merupakan transfer pemerintah pusat tahun 2023 yang baru masuk ke RKUD pada tanggal 4 Januari 2024.

Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp7.642.073.043,00 merupakan sisa pendapatan bagi hasil yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum ditransfer ke RKUD. Pengakuan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp7.642.073.043,00 berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor: 900/73/BKUD/4/2024 tentang Hutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Kepada Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur.

Rincian daftar Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 87. Daftar Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi NTT

No.	Uraian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.655.888.106,00	2.297.812.707,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.051.629.474,00	2.075.768.519,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.920.713.536,00	6.180.481.259,00
4	Pajak Air Permukaan	13.841.927,00	29.498.772,00
5	Pajak Rokok	0,00	0,00
Jumlah		7.642.073.043,00	10.583.561.257,00

5.3.1.1.2.5. Piutang Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	1.495.446.104,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.495.446.104,00 dari saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat koreksi saldo awal atas Piutang Uang Muka Pengadaan Aset Tetap pada BKPSDM. Koreksi tersebut dilakukan karena piutang yang dicatat masih termasuk pajak yang sudah dibayarkan oleh pihak ketiga. sehingga Pemerintah Kabupaten Manggarai lebih mencatat nilai piutang tersebut. Atas kelebihan catat tersebut. dilakukan koreksi saldo awal piutang untuk mengurangi nilai piutang sebesar Rp7.576.796,00.

Pada Tahun 2023 piutang yang telah dilunasi antara lain Piutang Uang Muka Pengadaan Aset Tetap pada Dinas PUPR sebesar Rp1.384.429.654,00 dan pada BKPSDM sebesar Rp64.896.904,00. Selain itu, terdapat reklasifikasi atas piutang TP TGR BOS senilai Rp38.542.750,00 ke Aset Lainnya – TGR.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Piutang Lainnya sebelum Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 88. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Piutang TPTGR BOS	0,00	38.542.750,00
	SDI Til	0,00	100,00
	SDI Rakas	0,00	20.420.950,00
	SDI Rua	0,00	18.121.700,00
2	Piutang Uang Muka Pengadaan Aset Tetap	0,00	1.456.903.354,00
	PUPR	0,00	1.384.429.654,00
	BKPSDM	0,00	72.473.700,00
Jumlah		0,00	1.495.446.104,00

5.3.1.1.3. Penyisihan Piutang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(12.501.345.721,30)	(15.674.676.869,83)

Penyisihan piutang yang dilakukan merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp12.501.345.721,30) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp15.674.676.869,83), disajikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 89. Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	Piutang 2023 (Rp)	Persentase	Penyisihan (Rp)
A. PIUTANG PAJAK				
	Piutang Pajak Hotel	59.526.399,00		10.315.154,90
1.	1. Kualitas lancar	26.851.000,00	0,5	134.255,00
	2. Kualitas Kurang Lancar	15.391.999,00	10	1.539.199,90
	3. Kualitas Ragu-ragu	17.283.400,00	50	8.641.700,00
	Piutang Pajak Restoran	86.557.516,00		10.869.135,08
2.	1. Kualitas lancar	57.017.016,00	0,5	285.085,08
	2. Kualitas Kurang Lancar	10.465.500,00	10	1.046.550,00
	3. Kualitas Ragu-ragu	19.075.000,00	50	9.537.500,00
	Piutang Hiburan	820.500,00		410.250,00
3.	1. Diragukan	820.500,00	50	410.250,00
		Piutang Pajak Reklame	132.193.250,00	
4.	1. Kualitas lancar	12.620.000,00	0,5	63.100,00
	2. Kualitas Kurang Lancar	23.058.000,00	10	2.305.800,00
	3. Kualitas Ragu-ragu	58.445.250,00	50	29.222.625,00
	4. Kualitas Macet	38.070.000,00	100	38.070.000,00
	Piutang Pajak Air Tanah	56.912.591,00		284.562,96
5.	1. Kualitas Lancar	56.912.591,00	0,5	284.562,96
	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.632.053,40		525.671.036,04
6.	1. Kualitas lancar	101.680.867,00	0,5	508.404,34
	2. Kualitas Kurang Lancar	69.237.283,00	10	6.923.728,30
	3. Kualitas Ragu-ragu	22.950.000,00	50	11.475.000,00
	4. Kualitas Macet	506.763.903,40	100	506.763.903,40
	Piutang PBB	15.784.167.535,24		8.629.655.951,42
7.	1. Kualitas lancar	1.787.890.555,00	0,5	8.939.452,78
	2. Kualitas Kurang Lancar	3.450.279.524,00	10	345.027.952,40
	3. Kualitas Ragu-ragu	4.540.617.820,00	50	2.270.308.910,00
	4. Kualitas Macet	6.005.379.636,24	100	6.005.379.636,24
Jumlah A		16.820.809.844,64		9.246.867.615,39
B. PIUTANG RETRIBUSI				
	Piutang Retribusi Rumah Dinas	256.273.950,00		256.273.950,00
1.	1. Kualitas Macet	256.273.950,00	100	256.273.950,00
		Piutang Retribusi Shopping Center	25.221.375,00	
2.	1. Kualitas Kurang Lancar	2.728.125,00	10	272.812,50
	2. Kualitas Diragukan	12.383.250,00	50	6.191.625,00
	3. Kualitas Macet	10.110.000,00	100	10.110.000,00
	Piutang Retribusi Pasar	2.231.450.128,00		1.771.623.297,00
3.	1. Kualitas Kurang Lancar	266.168.140,00	10	26.616.814,00
	2. Kualitas Diragukan	440.551.010,00	50	220.275.505,00
	3. Kualitas Macet	1.524.730.978,00	100	1.524.730.978,00
	Piutang Retribusi Ruko	158.301.000,00		79.693.200,00
4.	1. Kualitas Kurang Lancar	72.492.000,00	10	7.249.200,00
	2. Kualitas Diragukan	26.730.000,00	50	13.365.000,00
	3. Kualitas Macet	59.079.000,00	100	59.079.000,00
	Piutang Retribusi Pasar Rakyat	35.987.500,00		11.048.750,00
5.	1. Kualitas Kurang Lancar	17.362.500,00	10	1.736.250,00
	2. Kualitas Diragukan	18.625.000,00	50	9.312.500,00
Jumlah B		2.707.233.953,00		2.135.213.634,50
C. PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH				
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	298.565.913,00		298.565.913,00
1.	1. Kualitas Macet	298.565.913,00	100	298.565.913,00
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	155.403.920,00	
2.	1. Kualitas Macet	155.403.920,00	100	155.403.920,00
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	200.950.297,00	
3.	1. Kualitas Macet	200.950.297,00	100	200.950.297,00
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.883.552,00	
4.				



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	1.	Kualitas Macet	14.883.552,00	100	14.883.552,00
5.	BAGIAN UMUM		21.244.273,00		21.244.273,00
	1.	Kualitas Macet	21.244.273,00	100	21.244.273,00
6.	PIUTANG BUNGA DEPOSITO TA. 2012 DAN TA. 2023 BADAN PENDAPATAN		5.515.068,00		5.515.068,00
	1.	Kualitas Macet	5.515.068,00	100	5.515.068,00
7.	PIUTANG DARI PENJUALAN KENDARAAN BADAN PENDAPATAN		57.078.410,00		57.078.410,00
	1.	Kualitas Macet	57.078.410,00	100	57.078.410,00
8.	PIUTANG SISA HASIL LIKUIDASI PD KOMODO JAYA		339.494.500,00		339.494.500,00
	1.	Kualitas Macet	339.494.500,00	100	339.494.500,00
9.	PIUTANG BLUD		3.182.591.708,00		23.777.328,34
	1.	Kualitas Lancar	3.099.808.868,00	0,5	15.499.044,34
	2.	Kualitas Kurang Lancar	82.782.840,00	10	8.278.284,00
10.	PIUTANG ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PPh 21 AKIBAT SELISIH PERHITUNGAN PTKP		429.790.348,00		2.148.951,74
	1.	Kualitas Lancar	429.790.348,00	0,5	2.148.951,74
11.	PIUTANG PENDAPATAN DENDA ATAS PENGEMBALIAN		40.451.665,00		202.258,33
	1.	Kualitas Lancar	40.451.665,00	0,5	202.258,33
Jumlah C			4.745.969.654,00		1.119.264.471,41
Jumlah Keseluruhan			24.274.013.451,64		12.501.345.721,30

1. Penyisihan Piutang Pajak

Jumlah sebesar (Rp9.246.867.615,39) dan (Rp10.846.066.927,54) merupakan saldo penyisihan piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 90. Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	10.315.154,90	5.286.464,90
2	Piutang Pajak Restoran	10.869.135,08	7.351.500,00
3	Piutang Hiburan	410.250,00	412.800,00
4	Piutang Pajak Reklame	69.661.525,00	35.511.490,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	284.562,96	0,00
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	525.671.036,04	508.641.056,65
7	Piutang PBB	8.629.655.951,41	10.288.863.615,99
Jumlah		9.246.867.615,39	10.846.066.927,54

Selanjutnya, rincian penyisihan Piutang Pajak Daerah berdasarkan umur pokok piutang (*aging schedule*) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 91. Rincian Penyisihan Piutang Pajak berdasarkan Umur Pokok Piutang

No.	Umur Piutang (Tahun Penetapan)	Pokok Piutang Per 31 Des 2023 (Rp)	Persentase Penyisihan	Jumlah Penyisihan Pokok Piutang (Rp)	Nilai Bersih Pokok Piutang (Rp)
1	< 1 Tahun (2023)	2.042.972.029,00	0,50%	10.214.860,15	2.032.757.168,85
2	> 1 - 2 Tahun (2021 s.d. 2022)	3.568.432.306,00	10,00%	356.843.230,60	3.211.589.075,40
3	> 2 - 5 Tahun (2018 s.d. 2020)	4.659.191.970,00	50,00%	2.329.595.985,00	2.329.595.985,00
4	> 5 Tahun (s.d. 2017)	6.550.213.539,64	100,00%	6.550.213.539,64	0,00
Jumlah				9.246.867.615,39	



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Jumlah sebesar (Rp2.135.213.634,50) dan (Rp2.083.708.668,00) merupakan saldo penyisihan piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 92. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Retribusi Rumah Dinas	256.273.950,00	276.782.450,00
2	Piutang Retribusi <i>Shopping Center</i>	16.574.437,50	15.566.250,00
3	Piutang Retribusi Pasar	1.771.623.297,00	1.683.788.968,00
4	Piutang Retribusi Ruko	79.693.200,00	107.571.000,00
5	Piutang Retribusi Pasar Rakyat	11.048.750,00	0,00
Jumlah		2.135.213.634,50	2.083.708.668,00

Selanjutnya, rincian penyisihan Piutang Retribusi berdasarkan umur pokok piutang (*aging schedule*) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 93. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Pokok Piutang

No.	Umur Piutang (Tahun Penetapan)	Pokok Piutang Per 31 Des 2023 (Rp)	Persentase Penyisihan	Jumlah Penyisihan Pokok Piutang (Rp)	Nilai Bersih Pokok Piutang (Rp)
1	< 1 Bulan	-	0,50%	-	-
2	1 - 3 Bulan	358.750.765,00	10,00%	35.875.076,50	322.875.688,50
3	3 - 12 Bulan	498.289.260,00	50,00%	249.144.630,00	249.144.630,00
4	> 12 Bulan	1.850.193.928,00	100,00%	1.850.193.928,00	-
Jumlah				2.135.213.634,50	

3. Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah

Jumlah sebesar (Rp1.119.264.471,41) dan (Rp2.744.901.274,29) merupakan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 94. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 23 (Rp)	31 Desember 22 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	298.565.913,00	298.565.913,00
2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	155.403.920,00	155.403.920,00
3	Dinas Pertanian	200.950.297,00	200.950.297,00
4	Dinas Perikanan	14.883.552,00	14.883.552,00
5	Bagian Umum	21.244.273,00	21.244.273,00
6	Piutang Bunga Deposito TA. 2012 dan TA. 2013	5.515.068,00	5.515.068,00
7	Piutang dari Penjualan Kendaraan Dinas	57.078.410,00	57.078.410,00
8	Piutang Sisa Hasil Likuidasi PD Komodo Jaya	339.494.500,00	339.494.500,00
9	Piutang atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas selisih perhitungan PTKP	2.148.951,74	1.571.679.694,00
10	Piutang BLUD	23.777.328,34	80.083.865,81
11	Remunerasi TDF	0,00	1.781,49
12	Piutang Pendapatan atas Denda Pengembalian	202.258,33	0,00
Jumlah		1.119.264.471,41	2.744.901.274,29

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan kualitas piutang yang dikategorikan menjadi kurang lancar berdasarkan pemberian Surat Tagihan.

5.3.1.1.4. Persediaan

31 Desember 2023
(Rp)

Rp12.450.881.003,80

31 Desember 2022
(Rp)

Rp16.117.340.353,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.450.881.003,80 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.117.340.353,00 merupakan saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada SKPD. Rincian lebih lanjut atas saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 95. Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	444.151.450,00	705.915.143,00
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	483.000,00	7.615.000,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	1.175.000,00
4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.092.000,00	47.424.000,00
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.622.307.983,00	9.375.042.615,00
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	1.270.000,00
7	Bahan-Bahan Lainnya	0,00	2.500.000,00
8	Bahan-Bahan Kimia	117.243.750,00	0,00
9	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	34.050.000,00	61.350.000,00
10	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	124.635.700,00	199.993.725,00
11	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	463.743.750,00	0,00
12	Natura dan Pakan-Pakan	61.880.467,80	229.327.826,00
13	Obat-Obatan-Obat	3.191.775.332,00	5.485.727.044,00
14	Obat-Obatan Lainnya	387.517.571,00	0,00
Jumlah		12.450.881.003,80	16.117.340.353,00

Adapun rincian saldo Persediaan per SKPD disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 96. Rincian Saldo Persediaan per SKPD TA 2023 dan 2022

No.	Nama OPD/Jenis Persediaan	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2022
1	Dinas PPO	124.635.700,00	199.993.725,00
2	Dinas Kesehatan	7.814.630.718,76	8.359.130.242,00
3	RSUD Ruteng	3.168.862.948,00	6.291.891.567,00
4	DPRKPP	418.000,00	450.000,00
5	BPBD	235.000,00	35.544.500,00
6	Dinas Perikanan	43.336.618,04	52.518.750,00
7	Dinas Peternakan	734.444.819,00	321.949.076,00
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	117.243.750,00	119.797.850,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	298.856.450,00	547.131.643,00
10	Dinas Perhubungan	42.275.000,00	436.000,00
11	Bappelitbang	3.012.000,00	2.472.000,00
12	BKAD	39.080.000,00	74.175.000,00
13	Badan Pendapatan Daerah	63.850.000,00	111.850.000,00
Jumlah		12.450.881.003,80	16.117.340.353,00

Selanjutnya, penjelasan atas saldo Persediaan pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Saldo persediaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp124.635.700,00 merupakan persediaan bahan lainnya yang terdapat di lembaga UPTD SKB Randong.
- Persediaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.814.630.718,76 terdiri dari:
 - Bahan medis habis pakai sebesar Rp5.338.014.031,00; dan
 - Persediaan obat-obatan sebesar Rp2.476.616.687,76.
- Persediaan pada RSUD Ruteng sebesar Rp3.168.862.948,00 terdiri dari:
 - Alat kesehatan sebesar Rp1.102.330.049,00;
 - Obat-obatan sebesar Rp715.158.644,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- c. Barang habis pakai Rp1.181.963.903,00; dan
- d. Obat untuk COVID-19 sebesar Rp169.410.352,00.
4. Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp418.000,00 merupakan persediaan alat tulis kantor sebesar Rp80.000,00 dan persediaan kertas dan cover sebesar Rp338.000,00.
5. Persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp235.000,00 terdiri dari alat tulis kantor sebesar Rp90.000,00 dan persediaan kertas dan cover sebesar Rp145.000,00.
6. Persediaan pada Dinas Perikanan sebesar Rp43.336.618,04 terdiri dari:
 - a. Pakan ikan sebesar Rp9.286.618,04;
 - b. Induk ikan sebesar Rp32.050.000,00; dan
 - c. Benih ikan sebesar Rp2.000.000,00.
7. Persediaan pada Dinas Peternakan sebesar Rp734.444.819,00 terdiri dari:
 - a. Obat-obatan sebesar Rp25.289.618,00;
 - b. Obat ternak sebesar Rp192.817.601,00;
 - c. Bibit ternah babi peranakan sebesar Rp58.800.000,00; dan
 - d. Pakan sebesar Rp457.537.600,00.
8. Persediaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp117.243.750,00 merupakan persediaan pestisida.
9. Persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp298.856.450,00 merupakan persediaan bahan cetakan.
10. Persediaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp42.275.000,00 merupakan persediaan bahan cetak.
11. Persediaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp3.012.000,00 terdiri dari persediaan alat tulis kantor sebesar Rp2.922.000,00 dan bahan cetakan sebesar Rp90.000,00.
12. Persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp39.080.000,00 merupakan persediaan barang cetakan.
13. Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp63.850.000,00 merupakan persediaan barang cetakan.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>154.940.907.674,51</u>	<u>150.244.258.428,57</u>

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan,



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp154.940.907.674,51 dan Rp150.244.258.428,57 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 97. Rincian Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir)	3.320.516.449,00	3.320.516.449,00
2.	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(3.320.516.449,00)	(3.320.516.449,00)
3.	Investasi Jangka Panjang Permanen	154.940.907.674,51	150.244.258.428,57
Jumlah		154.940.907.674,51	150.244.258.428,57

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>3.320.516.449,00</u>	<u>3.320.516.449,00</u>

Investasi Non-Permanen Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan Investasi Non-Permanen Lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 98. Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	Total Investasi 2022	Pengembalian Pokok TA. 2023	Total Investasi 2023	Kualitas Macet (100%)
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja	1.797.835.956,00	0,00	1.797.835.956,00	1.797.835.956,00
2.	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	594.558.725,00	0,00	594.558.725,00	594.558.725,00
3.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	813.617.168,00	0,00	813.617.168,00	813.617.168,00
4.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	114.504.600,00	0,00	114.504.600,00	114.504.600,00
Jumlah		3.320.516.449,00	0,00	3.320.516.449,00	3.320.516.449,00

Penyisihan Investasi Non Permanen dari total Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.320.516.449,00 dan nilai sisa investasi sebesar Rp0,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja

Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.797.835.956,00 dan Rp1.797.835.956,00. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja mengelola dana bergulir dengan mekanisme



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

menggulirkan pengembalian pokok dana bergulir dan menyetorkan ke Kas Daerah atas pengembalian bunga dana bergulir dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 99. Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dana bergulir pada Bidang UKM	1.009.316.343,00	0,00	1.009.316.343,00
2.	Dana bergulir KSP-USP- UBSP	522.694.613,00	0,00	522.694.613,00
3.	Dana bergulir Binkop dan Penyangga Pangan	265.825.000,00	0,00	265.825.000,00
Jumlah		1.797.835.956,00	0,00	1.797.835.956,00

2) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah

Investasi Non Permanen pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp594.558.725,00 terdiri dari Dana Bergulir Penanggulangan masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan Dana Bergulir Pembinaan Industri Kecil. Dana bergulir berasal dari pengeluaran pemerintah TA. 2001. Khusus untuk Dana Bergulir Pembinaan Industri Kecil telah digulirkan kembali pada tahun 2002, 2003, dan 2004 adalah sebagai berikut.

Tabel 100. Dana Bergulir pada Bagian Administrasi Perekonomian

No.	Uraian	31-12-2023 (Rp)	Pengembalian	31-12-2022 (Rp)
1	Dana bergulir penanggulangan masalah GAKY	188.016.125,00	0,00	188.016.125,00
2	Dana bergulir pembinaan industri kecil (dana segar)	406.542.600,00	0,00	406.542.600,00
Jumlah		594.558.725,00	0,00	594.558.725,00

Dalam usaha melakukan perbaikan penatausahaan dana bergulir, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah telah melakukan pendataan domisili para peminjam dana bergulir termasuk mengidentifikasi para penerima dana bergulir yang tinggal di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat.

3) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Investasi Non Permanen pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp813.617.168,00 dan Rp813.617.168,00, dana tersebut merupakan pinjaman modal agribisnis padi sawah yang disalurkan dari tahun 2001 s.d. 2008. Pinjaman modal tersebut bukan merupakan dana bergulir sehingga pengembalian pokok dan bunga disetorkan ke Kas Daerah. Rincian data penyaluran dan saldo pinjaman 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 101. Penguatan Modal Kerja pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Tahun Penyaluran	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
2001	20.409.374	11.898.563	32.307.937	20.409.374	11.898.563	32.307.937
2002	146.249.025	25.977.840	172.226.865	146.249.025	25.977.840	172.226.865
2003	78.249.955	25.953.273	104.203.228	78.249.955	25.953.273	104.203.228
2004	57.016.500	12.438.625	69.455.125	57.016.500	12.438.625	69.455.125
2005	94.179.910	21.397.988	115.577.898	94.179.910	21.397.988	115.577.898
2006	32.001.598	4.545.648	36.547.246	32.001.598	4.545.648	36.547.246
2007	23.420.250	5.336.538	28.756.788	23.420.250	5.336.538	28.756.788
2008	362.090.556	93.401.822	455.492.378	362.090.556	93.401.822	455.492.378
Jumlah	813.617.168	200.950.297	1.014.567.465	813.617.168	200.950.297	1.014.567.465



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

4) Dinas Kelautan dan Perikanan

Investasi Non Permanen pada Dinas Kelautan dan Perikanan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 102. Penguatan Modal Kerja pada Kelautan dan Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok penerima	Kecamatan	Sisa per 31 Des 2023			Sisa per 31 Des 2022		
				Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah
1	Peng. Budidaya Rumput Laut	1. Sbr. Laut	Satar Mese	59.000.000	7.560.000	66.560.000	59.000.000	7.560.000	66.560.000
		2. Br Muncul	Satar Mese	25.675.000	3.600.000	29.275.000	25.675.000	3.600.000	29.275.000
2	Peng. Budidaya Ikan Air Tawar	1. K. Mekar	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		2. K. Lao	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		3. Raci Koe	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		4. W. Sosor	L. Rembong	4.671.600	620.592	5.292.192	4.671.600	620.592	5.292.192
		5. Ibunda I	L. Rembong	4.821.600	620.592	5.442.192	4.821.600	620.592	5.442.192
		6. Ibunda II	L. Rembong	4.821.600	620.592	5.442.192	4.821.600	620.592	5.442.192
Jumlah				114.504.600	14.883.552	129.388.152	114.504.600	14.883.552	129.388.152

Investasi Non Permanen pada Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari kegiatan pengeluaran pembiayaan TA. 2005 berupa pinjaman modal untuk budi daya rumput laut dan ikan air tawar dengan total nilai Rp248.059.200,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp124.029.600,00 disalurkan kepada kelompok usaha di Kabupaten Manggarai dan sebesar Rp124.029.600,00 disalurkan kepada kelompok usaha di Kabupaten Manggarai Timur (pada tahun 2005 masih termasuk wilayah Kabupaten Manggarai). Saldo pinjaman modal yang dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 hanya mencakup sisa pinjaman kepada kelompok tani di wilayah Kabupaten Manggarai yaitu sebesar Rp114.504.600,00. Saldo tersebut tidak mengalami perubahan karena tidak ada mutasi pengembalian pinjaman baik pada tahun 2014 maupun tahun 2015. Saldo pinjaman modal tersebut merupakan saldo pokok pinjaman kepada dua kelompok usaha budi daya rumput laut dan enam kelompok usaha budi daya ikan air tawar sedangkan sisa piutang bunga adalah Rp14.883.552,00 (disajikan dalam akun piutang lainnya). Menurut laporan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kegiatan usaha budi daya rumput laut dan budi daya ikan air tawar tidak berjalan lagi antara lain karena bencana alam. Laporan tersebut didukung dengan pernyataan masing-masing kelompok mengenai kondisi usaha mereka.

Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Inpektorat Kabupaten telah melakukan inventarisasi atas Dana Bergulir dan Penguatan Modal Kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan Sekretariat Daerah dan Dinas Kelautan, Perikanan

dan Peternakan namun hasilnya belum digunakan untuk membuat analisis umur piutang (aging schedule) serta menetapkan status atas dana bergulir yang macet (tidak tertagih).

Jumlah Penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp3.320.516.449,00) dan (Rp3.320.516.449,00).

Investasi Non Permanen dari total Investasi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.320.516.449,00) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.1.2. Penyisihan Investasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(3.320.516.449,00)	(3.320.516.449,00)

Jumlah Penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp3.320.516.449,00) dan (Rp3.320.516.449,00). Investasi Non Permanen dari total Investasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.320.516.449,00) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
Rp154.940.907.674,51	Rp150.244.258.428,57

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp154.940.907.674,51 dan Rp150.244.258.428,57. Kenaikan Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022 adalah 3,13% atau sebesar Rp4.696.649.245,94. Investasi Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Per 31 Desember 2023 sebesar Rp154.940.907.674,51 dan per 31 Desember 2022 Rp150.244.258.428,57 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
154.940.907.674,51	150.244.258.428,57

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp154.940.907.674,51 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.244.258.428,57 merupakan saldo dana Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2023. Investasi Penyertaan Modal Kabupaten Manggarai terdapat di Bank NTT, PDAM Tirta Komodo dan PT. Multi Manggarai Investasi.

Tabel 103. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2022	Investasi 2023	Surplus/ (Defisit)	31 Desember 2023
		(Rp)			(Rp)
1.	Penyertaan Pada PDAM Tirta Komodo	80.237.042.878,00	3.825.000.000,00	2.013.994.169,00	86.076.037.047,00
2.	Penyertaan Pada PT. Bank NTT	59.408.118.953,00	1.000.000.000,00	0,00	60.408.118.953,00
3.	Penyertaan Pada PT. MMI	10.599.096.597,57	0,00	(2.142.344.923,06)	8.456.751.674,51
Jumlah		150.244.258.428,57	4.825.000.000,00	128.350.754,06	154.940.907.674,51

Jumlah investasi permanen sebesar Rp154.940.907.674,51 per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. PDAM Tirta Komodo

Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Komodo sebesar Rp86.076.037.032,00 merupakan kekayaan Pemda yang tercatat dalam Neraca Komparatif PDAM Tirta Komodo dan nilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Penyertaan Modal disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi dengan kepemilikan 100,00% menggunakan metode ekuitas (*equity*). Laporan keuangan PDAM Tirta Komodo yang telah diaudit terlampir.

Tabel 104. Daftar Kepemilikan Saham Pemerintah Kab. Manggarai pada PDAM Tirta Komodo

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Saldo Akhir Tahun Sebelumnya	80.237.042.878,00	69.370.245.571,00
Pengurangan:			
2	Dividen Tahun Berjalan	0,00	0,00
Penambah:			
3	Modal Disetor	3.825.000.000	9.297.000.000,00
4	Laba	2.013.994.169,00	1.569.797.307,00
Jumlah		86.076.037.047,00	80.237.042.878,00

2. Bank NTT

Pada PT Bank NTT penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai sebesar Rp60.408.118.953,00 dan nilai penyertaan modal pada PT Bank NTT dengan kepemilikan kurang dari 20,00% menggunakan metode biaya (*cost*).

Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank NTT per 31 Desember 2023 merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sejak tahun 2001 s.d. Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 105. Daftar Kepemilikan Saham Pemerintah Kab. Manggarai pada Bank NTT

No.	Tahun	Nilai (Rp)	No. Sertifikat	Tanggal
1.	2001	136.750.000,00	A/II/11/13675	31/03/2004
2.	2002	365.740.000,00	A/II/11/36574	31/03/2004
3.	2003	863.250.000,00	A/II/11/86325	31/03/2004
4.	2004	200.000.000,00	A/II/11/20000	10/01/2005
5.	2005	250.000.000,00	A/II/11/25000	01/05/2006
6.	2006	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	15/05/2006
7.	2007	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	05/07/2007
8.	2008	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	26/03/2008
9.	2009	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	07/04/2009
10.	2010	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	13/12/2010
11.	2011	3.000.000.000,00	A/II/11/300000	29/12/2011
12.	2012	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	24/10/2012
13.	2013	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	08/07/2013
14.	2014	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	15/07/2014
15.	2015	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	31/08/2015
16.	2016	0,00	-	-
17.	2017	0,00	-	-
18.	2018	10.000.000.000,00	A/II/11/100000	-
19.	2019	0,00	-	-
20.	2020	2.957.438.953,00	-	-
21.	2020	2.634.940.000,00	-	-
22.	2021	5.000.000.000,00	-	-
23.	2022	10.000.000.000,00	-	-
24.	2023	1.000.000.000,00	-	-
Jumlah		60.408.118.953,00		

3. PT. MMI

Pada PT. Manggarai Multi Investasi, nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Per 31 Desember Tahun 2023 menurun sebesar Rp2.142.344.923,06 menjadi sebesar Rp8.456.751.674,51 dari saldo awal Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai pada PT. MMI Per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp10.599.096.597,57 dengan kepemilikan modal lebih dari 98,04% menggunakan metode ekuitas (*equity*). Laporan keuangan PT. Manggarai Multi Investasi yang telah diaudit terlampir.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 106. Penyesuaian Nilai Ekuitas PT. MMI

No.	Uraian	TAHUN			
		2023	2022	2021	2020
1.	Saldo Akhir Tahun Sebelumnya	10.599.096.597,57	10.578.204.360,66	10.499.445.904,07	10.527.535.827,12
Pengurangan:					
2.	Deviden Tahun Berjalan	(2.142.344.923,06)	(163.020.503,00)	(117.653.600,00)	(169.770.181,00)
Penambah:					
3.	Modal Disetor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Persentase Laba TA. 2023 sebesar 98,04%	0,00	183.912.739,91	196.311.887,23	141.680.257,46
Jumlah		8.456.751.674,51	10.599.096.597,57	10.578.104.191,30	10.499.445.903,58

5.3.1.3. Aset Tetap

31 Desember 2023
(Rp)

1.692.250.188.868,14

31 Desember 2022
(Rp)

2.049.123.136.543,76

Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.692.250.188.868,14 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.049.123.136.543,76 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 107. Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	257.651.230.062,67	0,00	257.651.230.062,67
2	Peralatan dan Mesin	469.626.745.618,31	(375.540.317.511,67)	94.086.428.106,64
3	Gedung dan Bangunan	884.048.022.297,51	(193.953.620.216,83)	690.094.402.080,68
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.066.383.520.696,44	(1.504.600.748.859,62)	561.782.771.836,82
5	Aset Tetap Lainnya	70.597.146.237,00	(463.386.866,66)	70.133.759.370,34
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.501.597.410,99	0,00	18.501.597.410,99
Jumlah		3.766.808.262.322,92	(2.074.558.073.454,78)	1.692.250.188.868,14

Terhadap saldo Aset Tetap telah dilakukan *Mapping* Kode Barang per 31 Desember 2023 sehingga dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 108. Daftar Aset Intrakomptabel

Aset Tetap	Saldo Awal Intrakomptabel	Penyesuaian		Saldo Akhir Intrakomptabel
		Bertambah	Berkurang	
1 Tanah	285.563.277.967,67	0,00	27.912.047.905,00	257.651.230.062,67
2 Peralatan dan Mesin	418.099.673.430,98	53.551.923.848,00	2.024.851.660,67	469.626.745.618,31
3 Gedung dan Bangunan	898.442.208.508,10	66.260.703.702,81	80.654.889.913,40	884.048.022.297,51
4 Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.887.299.041.422,22	186.877.075.936,15	7.792.596.661,93	2.066.383.520.696,44
5 Aset Tetap Lainnya	78.357.517.723,00	3.659.743.675,00	11.420.115.161,00	70.597.146.237,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.341.021.074,82	6.804.474.517,44	1.643.898.181,27	18.501.597.410,99
7 Akumulasi Penyusutan	(1.531.979.603.583,03)	(558.084.358.226,24)	(15.505.888.354,49)	(2.074.558.073.454,78)
Jumlah	2.049.123.136.543,76	(240.930.436.546,84)	115.942.511.128,78	1.692.250.188.868,14

Rincian lebih lanjut atas daftar aset ekstrakomptabel per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 109. Daftar Aset Ekstrakomptabel

Aset Tetap	Saldo Awal Ekstrakomptabel	Penyesuaian		Saldo Akhir Ekstrakomptabel
		Bertambah	Berkurang	
1 Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Peralatan dan Mesin	21.360.164.842,67	1.284.274.927,67	0,00	22.644.439.770,34
3 Gedung dan Bangunan	64.317.501,00	0,00	0,00	64.317.501,00
4 Jalan, Jaringan dan Instalasi	535.158.976,00	0,00	0,00	535.158.976,00
5 Aset Tetap Lainnya	18.080.704.661,00	11.358.115.161,00	0,00	29.438.819.822,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Aset Tetap	Saldo Awal Ekstrakomptabel	Penyesuaian		Saldo Akhir Ekstrakomptabel
		Bertambah	Berkurang	
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	40.040.345.980,67	12.642.390.088,67	0,00	52.682.736.069,34

Rincian lebih lanjut atas daftar aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut

Tabel 110. Daftar Aset Ekstrakomptabel dan Intrakomptabel

Aset Tetap	Saldo Awal	Penyesuaian		Saldo Akhir
		Bertambah	Berkurang	
1 Tanah	285.563.277.967,67	0,00	27.912.047.905,00	257.651.230.062,67
2 Peralatan dan Mesin	439.459.838.273,65	54.836.198.775,67	2.024.851.660,67	492.271.185.388,65
3 Gedung dan Bangunan	898.506.526.009,10	66.260.703.702,81	80.654.889.913,40	884.112.339.798,51
4 Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.887.834.200.398,22	186.877.075.936,15	7.792.596.661,93	2.066.918.679.672,44
5 Aset Tetap Lainnya	96.438.222.384,00	15.017.858.836,00	11.420.115.161,00	100.035.966.059,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.341.021.074,82	6.804.474.517,44	1.643.898.181,27	18.501.597.410,99
7 Akumulasi Penyusutan	(1.531.979.603.583,03)	(558.084.358.226,24)	(15.505.888.354,49)	(2.074.558.073.454,78)
Jumlah	2.089.163.482.524,43	(228.288.046.458,17)	115.942.511.128,78	1.744.932.924.937,48

Nilai mutasi aset tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.1. Tanah

31 Desember 2023

(Rp)

257.651.230.062,67

31 Desember 2022

(Rp)

285.563.277.967,67

Saldo aset tetap tanah pada Tahun 2023 sebesar Rp257.651.230.062,67. Kenaikan/penurunan Aset Tanah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 111. Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023

No.	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	285.563.277.967,67
1	Saldo Awal Aset Tanah Tahun 2023	285.563.277.967,67
B	Mutasi Tambah	0,00
C	Mutasi Kurang	27.912.047.905,00
1	Aset Tetap yang menjadi Properti Investasi – Tanah	27.912.047.905,00
D	Saldo Per 31 Desember 2023 (A+B-C)	257.651.230.062,67

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Tanah:

Pada Tahun 2023 terdapat reklasifikasi Aset Tanah ke Properti Investasi sebesar Rp27.912.047.905,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 112. Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah antar SKPD

No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	27.168.643.005,00
2	Bagian Umum	0,00	624.655.000,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	90.849.900,00
4	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	0,00	27.900.000,00
Jumlah		0,00	27.912.047.905,00

Rincian lebih lanjut atas Aset Tetap Tanah disajikan pada **Lampiran 5** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023

(Rp)

469.626.745.618,31

31 Desember 2022

(Rp)

418.099.673.430,98

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp469.626.745.618,31. Kenaikan/Penurunan Aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 113. Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No.	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	418.099.673.430,98
1	Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023	418.099.673.430,98
B	Mutasi Tambah	53.805.412.547,00
1	Belanja Modal 2023 (LRA)	50.726.852.239,00
2	Hibah dari Pemerintah Pusat	2.177.137.750,00
3	Kapitalisasi Aset Tetap yang berasal dari Belanja Hibah	404.531.900,00
4	Aset Tetap yang dimutasikan dari SKPD Lain	253.488.699,00
5	Aset tetap yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa	162.826.751,00
6	Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Lainnya	48.278.300,00
7	Aset Tetap yang berasal dari Penambahan Utang	32.296.908,00
C	Mutasi Kurang	2.278.340.359,67
1	Belanja Modal 2023 tidak jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	1.244.844.938,67
2	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat)	410.994.694,00
3	Belanja Modal 2023 tidak jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	287.703.039,00
4	Aset Tetap yang dimutasikan ke SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	253.488.699,00
5	Koreksi Saldo Awal	39.429.989,00
6	Belanja Modal 2023 yang menjadi persediaan	24.932.000,00
7	Aset Tetap Dihilangkan	10.545.000,00
8	Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.402.000,00
D	Saldo Per 31 Desember 2023 (A+B-C)	469.626.745.618,31

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sesuai LRA sebesar Rp50.726.852.239,00;
2. Penambahan Aset Tetap yang Bersumber dari Hibah;

Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Manggarai menerima dan/atau memperoleh hibah barang berupa peralatan dan mesin dengan total nilai sebesar Rp2.177.137.750,00 dengan uraian bukti perolehan hibah sebagai berikut:

- a. RSUD Ruteng

Pada Tahun 2023, RSUD Ruteng menerima hibah berupa Alat Kedokteran Lainnya – Laparoskopi sebesar Rp1.389.000.000,00 dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Nomor BAST: 476/028/240/VIII/DP2KB/2023 tanggal 2 Agustus 2023.

- b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pada Tahun 2023, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menerima hibah berupa peralatan dan mesin pada Pojok Baca Digital sebesar Rp788.137.750,00 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan BAST Nomor: 5326/4.2/PLK.03.07/XII.2023 tanggal 11 Desember 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3. Penambahan Aset Tetap yang bersumber dari Belanja Belanja Hibah sebesar Rp404.531.900,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Aset tetap yang dimutasi antar SKPD sebesar Rp253.488.699,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 114. Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD

No.	SKPD Asal	SKPD Penerima	Nilai Aset
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan Daerah	134.985.699,00
2	Kecamatan Reok	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	118.503.000,00
Jumlah			253.488.699,00

5. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp162.826.751,00 pada Dinas Kesehatan;
6. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp48.278.300,00; dan
7. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang bersumber dari penambahan utang belanja pengadaan aset tetap sebesar Rp32.296.908,00.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

1. Pada Tahun 2023, terdapat penambahan aset Peralatan dan Mesin yang nilainya dibawah batasan minimal kapitalisasi Rp500.000,00 (ekstrakomptabel). Jumlah aset Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel dari pengadaan TA 2023 adalah sebesar Rp1.244.844.938,67 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 115. Rincian Aset Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel Pengadaan Tahun 2023

No.	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	769.071.621,00
2	Dinas Kesehatan	384.158.154,67
3	Dinas Peternakan	6.227.100,00
4	Bagian Umum	23.063.263,00
5	Kecamatan Langke Rembong	30.000.000,00
6	Kecamatan Reok	19.624.800,00
7	Kecamatan Lelak	8.400.000,00
8	BLUD RSUD	4.300.000,00
Jumlah		1.244.844.938,67

Belanja Modal 2023 tidak menjadi Aset Tetap (di bawah nilai kapitalisasi) dimuat dalam **Lampiran 6** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini;

2. Terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang sudah rusak berat ke Aset Lainnya sebesar Rp410.994.694,00;
3. Terdapat Belanja Modal Aset Peralatan dan Mesin TA 2023 yang merupakan pelunasan utang dan nilai aset tetap sudah tercatat pada TA 2022 sebesar Rp287.703.039,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Pengadaan Alkes Non Kapitasi Kontrak Nomor 03/442/DINKES/PPK/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp132.334.390,00; dan
 - b. Pembayaran Pengadaan Peralatan Meubeler pada Puskesmas Anam dengan SPK Nomor 01/442/dinkes/PPK-CHT/X/2023 sebesar Rp155.368.649,00.
4. Pada Tahun 2023 terdapat aset tetap yang dimutasi antara organisasi perangkat daerah sebesar Rp253.488.699,00 dengan rincian pada Tabel 5.59;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5. Terdapat Koreksi Nilai sebesar Rp39.429.989,00 yang merupakan aset Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel pengadaan sebelum TA 2023 yang belum dikeluarkan dari nilai Aset Intrakomptabel sebagaimana dirinci pada **Lampiran 6** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini;
6. Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 yang digunakan untuk pengadaan persediaan sebesar Rp24.932.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa pengadaan bahan dan reagensia survey kualitas air minum dengan Kontrak Nomor 06/442/DINKES/PPK-BMHP-SG/V/2023 tanggal 3 Mei 2023;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 menghibahkan laptop sebesar Rp10.545.000,00 kepada Kelompok masyarakat dengan BAST Nomor 173/DISKOMINFO/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023; dan
8. Pada Tahun 2023, terdapat reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.402.000,00 pada Dinas Kesehatan dimana terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pengadaan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa sumur bor pada RS Pratama Reo.

Rincian aset tetap peralatan dan mesin lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 7** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
884.048.022.297,51	898.442.208.508,10

Saldo Aset Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 sebesar Rp884.048.022.297,51. Kenaikan/Penurunan Aset Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 116. Daftar Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	898.442.208.508,10
1	Saldo Awal Aset Gedung dan Bangunan 2023	898.442.208.508,10
B	Mutasi Tambah	66.260.703.702,82
1	Belanja Modal 2023 (LRA)	62.631.878.165,00
2	Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	2.306.413.793,00
3	Aset Tetap yang berasal dari Penambahan Utang	819.836.879,00
4	Aset Tetap yang berasal dari Belanja Pegawai	278.779.865,81
5	Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	99.995.000,00
6	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.800.000,00
7	Aset Tetap yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00
C	Mutasi Kurang	80.654.889.913,40
1	Aset Tetap yang menjadi Properti Investasi – Gedung dan Bangunan	66.121.116.688,00
2	Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.315.955.853,00
3	Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.951.485.084,40
4	Belanja Modal 2023 tidak jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	2.266.332.288,00
D	Saldo Per 31 Desember 2023 (A+B-C)	884.048.022.297,51

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sesuai LRA sebesar Rp62.631.878.165,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Manggarai menerima dan/atau memperoleh hibah barang berupa gedung sarana dan prasarana pengembangan desa wisata dengan nilai sebesar Rp2.306.413.793,00 dengan BAST Nomor: 144.1/KU.09.05/IX/2020 tanggal 24 September 2020;
3. Terdapat aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari penambahan utang sebesar Rp819.836.879,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Terdapat kapitalisasi Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Pegawai sebesar Rp278.779.865,81 yang merupakan belanja honorarium pengadaan Aset Gedung dan Bangunan;
5. Terdapat reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp99.995.000,00 berupa Bangunan Terbuka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Terdapat reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp95.800.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
7. Terdapat kapitalisasi Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp28.000.000,00.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

1. Terdapat reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Properti Investasi sebesar Rp66.121.116.688,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 117. Rincian Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Properti Investasi

No.	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	49.648.142.541,00
2	Badan Pendapatan Daerah	15.374.818.147,00
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.098.156.000,00
Jumlah		66.121.116.688,00

2. Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.315.955.853,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 118. Rincian Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.544.782.018,00
2	Kecamatan Langke Rembong	968.800.000,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	374.233.200,00
4	Dinas Kesehatan	214.462.000,00
5	Dinas Peternakan	213.678.635,00
Jumlah		7.315.955.853,00

3. Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan atas Pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp4.951.485.084,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 119. Rincian Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.523.549.977,40
2	Dinas Peternakan	2.110.628.222,00
3	Dinas Kesehatan	317.306.885,00
Jumlah		4.951.485.084,40



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

4. Terdapat Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan TA 2023 yang merupakan pelunasan utang dan nilai aset tetap sudah tercatat pada TA 2022 sebesar Rp2.266.332.288,00 yang terdiri dari pelunasan utang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp14.443.238,00 serta pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.251.889.050,00

Rincian aset tetap gedung dan bangunan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 8** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.066.383.520.696,44	1.887.299.041.422,22

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.066.383.520.696,44. Kenaikan/Penurunan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 120. Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023

No.	Uraian Mutasi	Nilai
A	Saldo Awal Aset Tetap	1.887.299.041.422,22
1	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 2023	1.887.299.041.422,22
B	Mutasi Tambah	186.877.075.936,15
1	Belanja Modal 2023 (LRA)	175.128.999.197,00
2	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	7.315.955.853,00
3	Aset Tetap yang berasal dari BTT	2.560.796.400,00
4	Pindahan dari KDP	1.548.098.181,27
5	Aset Tetap yang berasal dari Belanja Pegawai	288.824.304,88
6	Aset Tetap yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00
7	Reklasifikasi Masuk dari Peralatan dan Mesin	6.402.000,00
C	Mutasi Kurang	7.792.596.661,93
1	Belanja Modal 2023 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	3.430.510.260,00
2	Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.852.989.433,04
3	Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya	1.627.658.748,00
4	Koreksi Nilai karena Temuan Kurang Volume	881.438.220,89
	Saldo Per 31 Desember 2023 (A+B-C)	2.066.383.520.696,44

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 (LRA) sebesar Rp175.128.999.197,00;
2. Terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.315.955.853,00 dengan rincian pada Tabel 5.63;
3. Aset Tetap yang berasal dari Belanja Tidak terduga sebesar Rp2.560.796.400,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Terdapat reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.548.098.181,27 berupa jalan yang sudah selesai dikerjakan pada Tahun 2023 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Terdapat kapitalisasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Pegawai sebesar Rp288.824.304,88 yang merupakan honorarium pengadaan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

6. Terdapat kapitalisasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp28.000.000,00 yang merupakan Jasa Konsultan dan Jasa Pengawas yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa; dan
7. Pada Tahun 2023, terdapat reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.402.000,00 pada Dinas Kesehatan dimana terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pengadaan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa sumur bor pada RS Pratama Reo.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan:

1. Belanja Modal 2023 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang) sebesar Rp3.430.510.260,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan;
2. Terdapat reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jalan dan instalasi pengolahan sampah ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.852.989.433,04 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Terdapat Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jembatan yang dihancurkan untuk pembangunan jembatan baru yang direklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp1.627.658.748,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
4. Terdapat Koreksi Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Temuan Kurang Volume sebesar Rp881.438.220,89.

Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 9** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
70.597.146.237,00	78.357.517.723,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp70.597.146.237,00, merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

Tabel 121. Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	78.357.517.723,00
1	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2023	78.357.517.723,00
B	Mutasi Tambah	3.708.021.975,00
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 (LRA)	2.385.121.000,00
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya dari Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	785.126.075,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya dari Persediaan	346.500.000,00
4	Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Hibah	112.725.500,00
5	Aset Tetap Lainnya yang berasal dari hibah pemerintah pusat	78.549.400,00
C	Mutasi Kurang	11.468.393.461,00
1	Koreksi Saldo Awal (Ekstrakomptabel Pengadaan sebelum Tahun 2023)	8.638.153.486,00
2	Belanja Modal 2023 tidak jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	2.719.961.675,00
3	Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	48.278.300,00
4	Koreksi Saldo Awal	40.000.000,00
5	Penjualan Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00
6	Penghapusan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00
D	Saldo Per 31 Desember 2023 (A+B-C)	70.597.146.237,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp2.385.121.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Pengadaan Aset Tetap Lainnya berupa buku dari Utang Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp785.126.075,00;
3. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya berupa hewan ternak yang sebelumnya dicatat sebagai Persediaan sebesar Rp346.500.000,00 pada Dinas Peternakan;
4. Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp112.725.500,00; dan
5. Pada Tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menerima dan/atau memperoleh hibah berupa buku sebesar Rp78.549.400,00 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan BAST Nomor 5326/4.2/PLK.03.07/XII.2023 tanggal 11 Desember 2023.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya:

1. Koreksi saldo awal untuk mengurangi nilai Aset Tetap Lainnya ekstrakomptabel karena perubahan Kebijakan Akuntansi terkait batasan minimum kapitalisasi Aset Tetap Lainnya Bahan Perpustakaan/Buku sebesar Rp8.638.153.486,00 sebagaimana dimuat dalam **Lampiran 10** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini;
2. Terdapat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 yang dikategorikan sebagai Aset Tetap Lainnya ekstrakomptabel atau dibawah batasan minimum kapitalisasi sebesar Rp2.719.961.675,00;
3. Terdapat pengadaan Aset Peralatan dan Mesin yang direalisasikan melalui Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp48.278.300,00;
4. Koreksi saldo awal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp40.000.000,00 pada Dinas Peternakan karena terdapat mutase kurang hewan ternak mati sebelum Tahun 2023;
5. Pengurangan Aset Tetap Lainnya berupa hewan ternak yang mati di Tahun 2023 sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Peternakan; dan
6. Pengurangan Aset Tetap Lainnya berupa hewan ternak afkir yang dijual sebesar Rp12.000.000,00 pada Dinas Peternakan.

Rincian aset tetap lainnya lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 11** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>18.501.597.410,99</u>	<u>13.341.021.074,82</u>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2023 sebesar Rp18.501.597.413,81 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 122. Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

No.	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	13.341.021.074,82
1	Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 2023	13.341.021.074,82
B	Mutasi Tambah	6.804.474.517,44
1	Reklasifikasi Masuk dari Aset Gedung dan Bangunan	4.951.485.084,40
2	Reklasifikasi Masuk dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.852.989.433,04
C	Mutasi Kurang	1.643.898.181,27
1	Reklasifikasi Keluar ke Aset Gedung dan Bangunan	95.800.000,00
2	Reklasifikasi Keluar ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.548.098.181,27
D	Saldo Per 31 Desember 2023 (A+B-C)	18.501.597.410,99

Penjelasan Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan:

Rincian Reklasifikasi masuk ke KDP sebesar Rp6.804.474.517,44, adalah sebagai berikut.

Tabel 123. Daftar Mutasi Masuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

No.	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 16 Satarmese	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	447.807.342,13
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 11 Ruteng		1.606.734.305,08
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Cibai		234.941.486,22
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 8 Satarmese		234.066.843,97
5	Pembangunan Kandang	Dinas Peternakan	2.001.050.510,00
6	Pembangunan Sumur Bor	Dinas Kesehatan	109.577.712,00
7	Pembangunan Puskesmas Pembantu Sambi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	317.306.885,00
8	Peningkatan Jalan Lanter – Ojang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	554.989.433,04
9	Perencanaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.298.000.000,00
Jumlah			6.804.474.517,44

Penjelasan Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan:

Reklasifikasi kurang dari KDP sebesar Rp1.643.898.181,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 124. Daftar Mutasi Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

No.	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Pos Jaga Objek Wisata Inembele	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	95.800.000,00
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Denger	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.906.595,80
3	Peningkatan Jalan Teflord Lingko Ranggo-Ndaher-Lekos, Mangko Pengang		121.852.285,09
4	Peningkatan Struktur Jalan Ling - Nereng		266.473.621,31
5	Pemeliharaan Periodik Lapen Poka - Mendo - Bts. Kabupaten		186.683.925,90
6	Pemeliharaan Jalan Kp.Cumbi-Gereja Paroki Wangkung		93.539.354,99
7	Pemeliharaan Jalan Kp.Werong - Mbohng		192.402.327,92
8	Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota Ruteng		505.240.070,26
Jumlah			1.643.898.181,27

Rincian konstruksi dalam pengerjaan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 12** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023

(Rp)

(2.074.558.073.454,78)

31 Desember 2022

(Rp)

(1.531.979.603.583,03)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.074.558.073.454,78), dengan rincian mutasi pada tabel berikut.

Tabel 125. Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023

No.	Nama Aset	Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2023	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan 31 Des 2023
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
1	Peralatan Mesin	303.791.803.087,74	72.189.148.254,93	440.633.831,00	375.540.317.511,67
2	Gedung Bangunan	157.689.468.020,09	51.098.148.449,42	14.833.996.252,68	193.953.620.216,83
3	Jalan Irigasi Jaringan	1.070.498.332.475,20	434.332.934.655,23	230.518.270,81	1.504.600.748.859,62
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	464.446.866,66	1.060.000,00	463.386.866,66
Jumlah		1.531.979.603.583,03			2.074.558.073.454,78

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai tanggal 29 Desember 2023 telah mengubah metode penghitungan penyusutan Aset Tetap. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan dasar perhitungan tahunan dengan mengakomodir tanggal dan bulan penggunaan dan/atau bulan serah terima. Metode penyusutan yang digunakan adalah menganut metode garis lurus.

5.3.1.4. Properti Investasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

79.304.968.243,63

0,00

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Manggarai menyajikan Properti Investasi pada Necara Pemerintah Daerah Manggarai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar Nomor 17 Properti Investasi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Lampiran II Perihal Akuntansi Properti Investasi. Pemerintah Manggarai menyajikan Properti Investasi atas Aset Tetap Tanah dan Gedung untuk menghasilkan sewa yaitu Tanah dan Gedung Rumah Toko seperti tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 126. Daftar Aset Tetap Properti Investasi

No.	Spesifikasi Barang		Jumlah	
	SKPD	Nama / Jenis Barang	Barang	Harga
Tanah				
1.	Badan Pendapatan Daerah	Tanah Bangunan Pasar	14	25.318.643.005,00
2.		Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1	1.850.000.000,00
3.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tanah Bangunan Pasar	4	90.859.900,00
4.	Bagian Umum	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	36.730.000,00
5.		Tanah Bangunan Gudang	1	587.925.000,00
6.	Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah dan Tenaga Kerja	Tanah Bangunan Pasar	1	27.900.000,00
Jumlah I			22	27.912.047.905,00
Gedung Bangunan				
1.	Badan Pendapatan Daerah	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	314.950.623,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Spesifikasi Barang		Jumlah	
	SKPD	Nama / Jenis Barang	Barang	Harga
2.		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	15	15.059.867.524,00
3.		Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1.797.032.000,00
4.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	21	43.923.718.491,00
5.		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	5	3.927.392.050,00
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	913.696.000,00
7.		Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	1	184.460.000,00
Jumlah II			45	66.121.116.688,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan (III)				(14.728.196.349,37)
Jumlah I + II + III			67	79.304.968.243,63

Rincian Properti Investasi adalah sebagai berikut:

1. Tanah atas Gedung dan Bangunan Ruko yang dicatat sebagai Properti Investasi merupakan Tanah dibawah Gedung dan Bangunan Ruko yang selama ini dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dengan mekanisme sewa. atas Gedung dan Bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2003 – 2022 sebesar Rp27.912.047.905,00;
2. Gedung dan Bangunan Ruko yang dicatat sebagai Properti Investasi merupakan Gedung dan Bangunan Ruko yang selama ini dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dengan mekanisme sewa atas Gedung dan Bangunan tersebut dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2003 – 2022 sebesar Rp66.121.116.688,00; dan
3. Akumulasi dari Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.728.196.349,37.

5.3.1.5. Aset Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>15.580.324.062,16</u>	<u>13.880.680.126,03</u>

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.580.324.062,16. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 127. Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Akhir 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2023
1	Tagihan Jangka Panjang	74.081.282,00	144.418.250,00	0	218.499.532,00
2	Aset Tak Berwujud	3.829.703.200,00	0	1.298.442.000,00	2.531.261.200,00
3	Akumulasi Amortisasi	-2.623.876.377,00	261.920.200	677.772.525,00	(2.208.024.052,00)
4	Aset Lain-lain	35.861.639.858,55	4.963.181.662,89	1.469.544.617,00	39.355.276.904,44
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-23.260.867.837,52	1.055.821.684,76	0	(24.316.689.522,28)
Jumlah		13.880.680.126,03	6.425.341.797,65	3.445.759.142,00	15.580.324.062,16

5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>218.499.532,00</u>	<u>74.081.282,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp218.499.532,00 yaitu penjumlahan saldo awal sebesar Rp74.081.282,00 ditambah dengan koreksi penghapusan Akumulasi Penyisihan Aset Lainnya Tagihan Kerugian Daerah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang tidak mengatur penyisihan aset lainnya senilai Rp105.875.500,00 dan dikurang reklasifikasi Piutang TGR ke Aset Lainnya – TGR karena SKTJM hanya berlaku 60 hari sebesar Rp38.542.750,00, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 128. Rincian Tagihan Jangka Panjang Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi (Rp)
1	TGR BOS	112.624.032,00	74.081.282,00	0,00
2	TGR SKTJM	105.875.500,00	105.875.500,00	38.542.750,00
3	Akumulasi Penyisihan	0,00	(105.875.500,00)	105.875.500,00
Total Nilai Piutang TGR		218.499.532,00	74.081.282,00	144.418.250,00

5.3.1.5.2. Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023
(Rp)

2.531.261.200,00

31 Desember 2022
(Rp)

3.829.703.200,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp2.531.261.200,00 dan Rp3.829.703.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.298.442.000,00 yang merupakan koreksi atas pencatatan Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 berupa Software dan Kajian. Rincian lebih lanjut atas saldo Aset Tidak Berwujud TA 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 129. Daftar Aset Tidak Berwujud Tahun 2023

No.	Unit Pengguna Barang	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Software	1	49.995.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Software	3	169.400.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kajian	4	852.881.600,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Lisensi dan Franchise	1	390.500.600,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset Tidak Berwujud Lainnya	2	596.159.000,00
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kajian	5	472.325.000,00
Jumlah			16	2.531.261.200,00

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Tak Berwujud Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 130. Daftar Aset Tak Berwujud

No.	Akun	Saldo Awal 2023	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Lisensi dan Franchise	390.500.600,00	0,00	0,00	390.500.600,00
2	Software	820.891.000,00	0,00	610.971.000,00	209.920.000,00
3	Kajian	1.921.365.600,00	0,00	687.471.000,00	1.233.894.600,00
4	ATB Lainnya	696.946.000,00	0,00	0,00	696.946.000,00
Jumlah		3.829.703.200,00	0,00	1.298.442.000,00	2.531.261.200,00

Rincian mutasi kurang Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.298.442.000,00 adalah sebagai berikut:

- 1) Mutasi kurang berupa reklasifikasi atas Aset Tak Berwujud dan amortisasinya yang sudah tidak digunakan lagi berdasarkan hasil cek fisik ke Aset Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp601.496.000,00 dan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp9.475.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 2) Mutasi kurang berupa reklasifikasi atas ATB yang seharusnya merupakan bagian perencanaan dari aset tetap (kapitalisasi pada Aset Gedung dan Bangunan) pada Dinas PUPR sebesar Rp 99.995.000,00; dan
- 3) Mutasi kurang berupa koreksi atas ATB yang tidak memenuhi definisi sebagai ATB (merupakan belanja rutin setiap tahun) berupa buku kajian untuk pengajuan DAK setiap tahun pada Dinas PUPR sebesar Rp587.476.000,00.

Rincian aset tak berwujud lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 13** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(2.208.024.052,00)	(2.623.876.377,00)

Saldo Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.208.024.052,00) merupakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud Lisensi dan Franchise, *Software*, Kajian dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp2.208.024.052,00 dan Rp2.623.876.377,00 atau bertambah senilai Rp415.852.325,00. yang merupakan saldo amortisasi atas Aset Tak Berwujud *Software* dan Hak Cipta. Rincian lebih lanjut atas saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 131. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2023 dan 2022

No	Unit Pengguna Barang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	34.996.500,00	29.997.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	152.460.000,00	676.866.400,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	841.411.600,00	829.941.600,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	159.454.952,00	120.404.352,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	547.376.000,00	493.489.025,00
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	472.325.000,00	472.325.000,00
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	0,00	853.000,00
Jumlah		2.208.024.052,00	2.623.876.377,00

Adapun mutasi Penyisihan Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 132. Daftar Aset Tak Berwujud

No.	Akun	Saldo Awal 2023	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Lisensi dan <i>Franchise</i>	390.500.600,00	0,00	0,00	390.500.600,00
2	<i>Software</i>	820.891.000,00	0,00	610.971.000,00	209.920.000,00
3	Kajian	1.921.365.600,00	0,00	687.471.000,00	1.233.894.600,00
4	Aset Tidak Berwujud Lainnya	696.946.000,00	0,00	0,00	696.946.000,00
Jumlah		3.829.703.200,00	0,00	1.298.442.000,00	2.531.261.200,00
1	Akumulasi Amortisasi	(2.623.876.377,00)	0,00	415.852.325,00	(2.208.024.052,00)
Jumlah B		(2.623.876.377,00)	0,00	415.852.325,00	(2.208.024.052,00)
Jumlah Aset Tak Berwujud (A+B)		1.205.826.823,00	0,00	1.714.294.325,00	323.237.148,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.5.4. Aset Lain-lain

31 Desember 2023

(Rp)

15.038.587.382,16

31 Desember 2022

(Rp)

12.600.772.021,03

Jumlah sebesar Rp15.038.587.382,16 merupakan nilai perolehan Aset Lain-Lain pada beberapa Perangkat Daerah Tahun 2023. Nilai buku Aset Lain-Lain setelah akumulasi penyusutan dan amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 133. Daftar Aset Lain-Lain

No.	Akun	Saldo Awal 2023	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
I	Aset Lain-lain dari Aset Tetap				
1	Peralatan dan Mesin	17.188.694.779,50	412.354.694,00	1.360.000,00	17.599.689.473,50
2	Bangunan dan Gedung	1.693.996.670,00	0,00	0,00	7.073.151.722,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	57.220.000,00	1.627.658.748,00	0,00	1.684.878.748,00
4	Aset Tak Berwujud	1.141.586.000,00	610.971.000,00	0,00	1.752.557.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.693.996.670,00	0,00	0,00	1.693.996.670,00
	Jumlah I	21.775.494.119,50	2.650.984.442,00	1.360.000,00	29.804.273.613,50
II	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				
1	Akumulasi Penyusutan	(23.260.867.837,52)	(1.055.821.684,76)	0,00	(24.316.689.522,28)
	Jumlah II	(23.260.867.837,52)	(1.055.821.684,76)	0,00	(24.316.689.522,28)
III	Aset Tetap yang Akan Dihilangkan				
1	Gedung dan Bangunan	7.030.166.346,00	0,00	0,00	7.030.166.346,00
2	Peralatan dan Mesin	53.132.908,00	0,00	0,00	53.132.908,00
	Jumlah III	7.083.299.254,00	0,00	0,00	7.083.299.254,00
IV	Aset Lain-Lain Lainnya				
1	Treasury Deposit Facility (TDF)	1.468.184.617,00	1.430.759.000,00	1.468.184.617,00	1.430.759.000,00
2	Temuan Kurang Volume				
	- Dinas Perindag	31.138.722,27	0,00	0,00	31.138.722,27
	- RSUD	5.987.727,81	0,00	0,00	5.987.727,81
	- Dinas Kesehatan	47.740.930,81	0,00	0,00	47.740.930,81
	- Dinas PPO	70.639.435,16	0,00	0,00	70.639.435,16
	- Dinas PUPR	0,00	881.438.220,89	0,00	881.438.220,89
	Jumlah IV	1.623.691.433,05	2.312.197.220,89	1.468.184.617,00	2.467.704.036,94
	Jumlah I + II + III + IV	12.600.772.021,03	3.907.359.978,13	1.469.544.617,00	15.038.587.382,16

Penjelasan atas mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mutasi tambah Aset Lain-Lain dari Aset Tetap sebesar Rp412.354.694,00 berupa Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 134. Rincian Mutasi Tambah Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Mutasi Tambah	
		Jumlah Unit	Nominal (Rp)
1	Inspektorat Daerah	53	186.706.694,00
2	Bapperida	8	137.448.000,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	3.200.000,00
4	Bagian Organisasi	5	85.000.000,00
	Total	67	412.354.694,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 2) Mutasi kurang Aset Lain-Lain dari Aset Tetap sebesar Rp1.360.000,00 berupa Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Daerah;
- 3) Mutasi tambah Aset Lain-Lain dari Aset Tetap sebesar Rp1.627.658.748,00 berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada dua jembatan, masing-masing sebesar Rp1.430.036.818,00 dan Rp197.621.930,00 pada Dinas PUPR;
- 4) Mutasi tambah Aset Lain-Lain dari Aset Tetap sebesar Rp610.971.000,00 berupa Aset Tak Berwujud, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dua Aset pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp356.305.000,00 dan Rp245.191.000,00; dan
 - b) Satu Aset pada Dinas PPO sebesar Rp9.475.000,00
- 5) Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp1.055.501.684,76), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Reklasifikasi atas Akumulasi Penyusutan ATB yang sudah tidak digunakan ke Akum. Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp603.296.500,00;
 - b) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada dua jembatan di Dinas PUPR, masing-masing sebesar Rp28.600.736,36 dan Rp15.809.754,40; dan
 - c) Reklasifikasi atas Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin rusak berat pada Bagian Organisasi sebesar Rp85.000.000,00, Inspektorat Daerah sebesar Rp185.346.694,00, dan Bapperida sebesar Rp137.448.000,00
- 6) Mutasi tambah TDF sebesar Rp1.430.759.000,00 merupakan koreksi atas TDF di Tahun 2023;
- 7) Mutasi kurang TDF sebesar Rp1.468.184.617,00 merupakan pencairan TDF di Tahun 2023; dan
- 8) Mutasi tambah atas temuan kurang volume pada Dinas PUPR pada Tahun 2023 senilai Rp881.438.220,89.

5.3.2. Kewajiban

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
66.817.773.575,11	21.116.053.872,23

Kewajiban merepresentasikan konsekuensi kepada pihak ketiga akibat transaksi keuangan di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) dan kewajiban jangka panjang. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp66.817.773.575,11 dan Rp21.116.053.872,23 atau mengalami kenaikan senilai Rp45.701.719.702,88.

Tabel 135. Rincian Saldo Kewajiban 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
A. Kewajiban Jangka Pendek			
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.455.157,00	141.117.632,00
2	Utang Bunga	172.929.845,66	22.227.551,78
3	Bagian Lancar Utang jangka Panjang	57.391.304.348,00	0,00
5	Utang Belanja dan Transfer	8.370.644.657,45	7.303.710.113,45



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	881.439.567,00	7.398.281.021,00
	Jumlah	66.817.773.575,11	14.865.336.318,23
B. Kewajiban Jangka Panjang			
1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	6.250.717.554,00
	Jumlah	0,00	6.250.717.554,00
	Jumlah (A + B)	66.817.773.575,11	21.116.053.872,23

Rincian Saldo Kewajiban diuraikan sebagai berikut:

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
66.817.773.575,11	14.865.336.318,23

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp66.817.773.575,11 dan Rp14.865.336.318,23. dengan rincian sebagai berikut. 855.132.567,00

Tabel 136. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember Tahun 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Pengurangan	Penambahan	Saldo akhir
		2023			2023
1	Utang PFK	141.117.632,00	139.865.475,00	203.000,00	1.455.157,00
2	Utang Bunga	22.227.551,78	22.227.551,78	172.929.845,66	172.929.845,66
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	57.391.304.348,00	57.391.304.348,00
4	Utang Belanja	7.303.710.113,45	8.202.327.525,00	7.133.701.529,00	8.370.644.657,45
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.398.281.021,00	7.371.974.056,00	855.132.567,00	881.439.567,00
	Jumlah	14.865.336.318,23	15.736.394.607,78	65.553.271.289,66	66.817.773.575,11

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.455.157,00	141.117.632,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp1.455.157,00 terdiri dari Utang PFK untuk beberapa sekolah yang belum lunas sebesar Rp252.157,00, Utang PFK Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp203.000,00 dan Utang BUD PPN atas SP2D No.6162/LS/2019 tanggal 31 Desember 2019 Rp46.540.755,00 namun pada SP2D Non Anggaran sebesar Rp45.540.755,00 tanggal 31 Desember 2019, sehingga BUD kurang menyeter atas PPN tersebut sebesar Rp1.000.000,00.

Saldo Rincian saldo Utang PFK per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 137. Rincian Utang PFK per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
A	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Utang PPh Pasal 21	0,00	0,00
	Utang PPh Pasal 22	1.000.000,00	0,00
B	PFK Bendahara Dana BOS SD dan SMP		
	Utang PPh Pasal 21	0,00	141.117.632,00
	Utang PPh Pasal 22	0,00	0,00
	Utang PPh Pasal 23	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Utang PPN	252.157,00	0,00
C	Dinas Lingkungan Hidup		
	Utang PPh Pasal 21	203.000,00	0,00
	Jumlah	1.455.157,00	141.117.632,00

5.3.2.1.2. Utang Bunga

31 Desember 2023

(Rp)

172.929.845,66

31 Desember 2022

(Rp)

22.227.551,78

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp172.929.845,66 merupakan utang atas bunga pinjaman pada Bank NTT. Pokok pinjaman sebesar Rp110.000.000,00. Atas pokok pinjaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai kurang membayarkan bunga kepada Bank NTT sebesar Rp172.929.845,66. Daftar tagihan dan pelunasan utang bunga dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 138. Daftar Tagihan dan Pelunasan Utang Bunga Tahun 2023

No.	Bulan	Tagihan Bank NTT		Pelunasan Bunga Pinjaman	Selisih Tagihan dan Pembayaran Bunga
		Nomor Surat	Nilai Tagihan	Nilai Pembayaran	
1	Januari	0169/BNTT-006/Krd/II/2023	54.451.584,78	54.451.584,78	0,00
2	Februari	0302/BNTT-006/Krd/III/2023	687.500.000,00	687.500.000,00	0,00
3	Maret	0425/BNTT-006/Krd/III/2023	657.608.695,65	657.608.695,65	0,00
4	April	0535/BNTT-006/Krd/IV/2023	627.717.391,30	627.717.391,30	0,00
5	Mei	0726/BNTT-006/Krd/V/2023	597.826.086,96	597.826.086,96	0,00
6	Juni	0853/BNTT-006/Krd/VI/2023	567.934.782,61	567.934.782,61	0,00
7	Juli	1000/BNTT-006/Krd/VII/2023	538.043.478,26	538.043.478,26	0,00
8	Agustus	1119/BNTT-006/Krd/VIII/2023	508.152.173,91	508.152.173,91	0,00
9	September	1275/BNTT-006/Krd/IX/2023	478.260.869,57	478.260.869,57	0,00
10	Oktober	2010/BNTT-006/Krd/X/2023	448.369.565,22	448.369.565,22	0,00
11	November	2133/BNTT-006/Krd/XI/2023	418.478.260,87	418.478.260,87	0,00
12	Desember	2357/BNTT-006/Krd/XII/2023	388.586.956,52	215.657.110,86	172.929.845,66
		Total	5.972.929.845,65	5.799.999.999,99	172.929.845,66

Penjelasan atas utang bunga adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo

Total tagihan bunga dari Bank NTT adalah sebesar Rp5.972.929.845,65. Atas tagihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai hanya melakukan pembayaran sebesar Rp5.799.999.999,99 sehingga masih memiliki kewajiban bunga sebesar Rp172.929.845,66. Kurang bayar ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Manggarai kurang menganggarkan belanja bunga.

- 2) Besaran persentase pengenaan bunga pinjaman.

Atas bunga pinjaman pada Bank NTT dikenakan bunga pinjaman sebesar 7,50% dalam jangka waktu 27 bulan dari Bulan September 2022 sampai dengan Desember 2024.

5.3.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2023

(Rp)

57.391.304.348,00

31 Desember 2022

(Rp)

0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.391.304.348,00 merupakan nominal atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) penjumlahan atas saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0.00 ditambah dengan reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang atas utang yg jatuh tempo di tahun 2024 kepada Lembaga Perbankan (Bank NTT) sebesar Rp57.391.304.348,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 139. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

No.	Periode Pembayaran	Nilai (Rp)
1	Januari 2024	4.782.608.695,65
2	Februari 2024	4.782.608.695,65
3	Maret 2024	4.782.608.695,65
4	April 2024	4.782.608.695,65
5	Mei 2024	4.782.608.695,65
6	Juni 2024	4.782.608.695,65
7	Juli 2024	4.782.608.695,65
8	Agustus 2024	4.782.608.695,65
9	September 2024	4.782.608.695,65
10	Oktober 2024	4.782.608.695,65
11	November 2024	4.782.608.695,65
12	Desember 2024	4.782.608.695,85
Jumlah		57.391.304.348,00

5.3.2.1.4. Utang Belanja

31 Desember 2023
(Rp)

8.370.644.657,45

31 Desember 2022
(Rp)

7.303.710.113,45

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.370.644.657,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 140. Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang Belanja Barang dan Jasa	8.252.567.727,45	7.149.102.233,45
a	Utang Belanja Barang	55.793.171,25	435.577.718,25
b	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	785.126.075,00	0,00
c	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.411.648.481,20	6.713.524.515,20
2	Utang Belanja Hibah	5.552.969,00	42.083.919,00
a	Utang Belanja Hibah kepada Badan. Lembaga Organisasi Kemasya-rakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.552.969,00	42.083.919,00
3	Utang Belanja Modal	112.523.961,00	112.523.961,00
a	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Gedung & Bangunan	96.207.910,00	96.207.910,00
b	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan	16.316.051,00	16.316.051,00
Jumlah		8.370.644.657,45	7.303.710.113,45

Adapun rincian utang belanja per SKPD disajikan sebagai berikut.

Tabel 141. Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023

No.	Nama OPD	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Utang belanja barang	55.793.171,25
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Utang belanja barang dan jasa BOS	785.126.075,00
		Utang belanja hibah sekolah swasta	5.552.969,00
3	BLUD RSUD Ruteng	Utang belanja barang dan jasa BLUD	7.411.648.481,20
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Gedung & Bangunan	96.207.910,00
5	Dinas PUPR	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan Tahun 2021	4.750.000,00
6	Kecamatan Ruteng	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan Tahun 2021	11.566.051,00
Jumlah		Jumlah	8.370.644.657,45



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.370.644.657,45 merupakan Utang Belanja Barang sebesar Rp55.793.171,25 pada BKAD. Utang Belanja Barang dan Jasa BOS per 31 Desember 2023 sebesar 785.126.075,00 serta Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.411.648.481,20.

Jumlah Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.552.969,00 merupakan Utang Belanja Hibah Sekolah Swasta pada Dinas PPO.

Utang Belanja Modal - Aset Tetap Gedung & Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.207.910,00 merupakan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Utang Belanja Modal - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.316.051,00 terdiri dari Utang Belanja Tahun 2021 pada Dinas PUPR sebesar Rp4.750.000,00 dan Kecamatan Ruteng sebesar Rp11.566.051,00. Sisa Utang PD Komodo Jaya yang sudah likuidasi sebesar Rp55.793.171,25.

5.3.2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
881.439.567,00	7.398.281.021,00

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023 merupakan Utang Pengadaan Aset Tetap Bangunan dan Gedung pada Dinas PPO pada Tahun 2023 sebesar Rp855.132.567,00 dan sisa Utang Pengadaan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan sebesar Rp26.307.000,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 142. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo	Mutasi		Saldo
		1 Januari 2023	Tambah	Kurang	31 Des 2023
1	Dinas PPO	23.114.098,00	855.132.567,00	23.114.098,00	855.132.567,00
2	Dinas Kesehatan	2.572.301.089,00	0,00	2.545.994.089,00	26.307.000,00
3	Dinas PUPR	4.802.865.834,00	0,00	4.802.865.834,00	0,00
Jumlah		7.398.281.021,00	855.132.567,00	7.371.974.056,00	881.439.567,00

Rincian mutasi pada Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mutasi tambah pada Dinas PPO merupakan Utang Pengadaan Aset Tetap Bangunan dan Gedung pada Tahun 2023 sebesar Rp855.132.567,00;
- 2) Mutasi kurang pada Dinas PPO merupakan pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap Bangunan dan Gedung yang telah diterima pada Tahun 2023 sebesar Rp20.115.318,00. serta koreksi kurang atas *double* catat Utang Pengadaan Aset Tetap Bangunan dan Gedung sebesar Rp2.998.780,00;
- 3) Mutasi kurang pada Dinas Kesehatan merupakan pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap yang telah diterima pada Tahun 2023 sebesar Rp2.545.994.089,00; dan
- 4) Mutasi kurang pada Dinas PUPR merupakan pelunasan Utang Aset Tetap sebesar Rp4.802.865.828,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>0,00</u>	<u>6.250.717.554,00</u>

Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 merupakan Rp0,00 karena atas Rp57.391.304.348,00 merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) yakni sisa pokok pinjaman pada Bank NTT tahun 2023 sebesar dalam bentuk *Standby Loan* senilai Rp110.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,50% Tahun dengan jatuh tempo pada 31 Desember 2024 berdasarkan addendum ke 2 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 2298/DIR-DKrkM/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022.

5.3.3. Ekuitas

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>1.934.867.214.152,54</u>	<u>2.275.649.890.638,16</u>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.275.649.890.638,16 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.934.867.214.152,54 dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Ekuitas Awal	2.275.649.890.638,16
Surplus/Defisit-LO	60.199.007.783,05
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
Koreksi Aset Lancar	(870.763.154,77)
Koreksi Investasi Permanen	(154.640.795,61)
Koreksi Aset Tetap	(8.717.583.475,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan	(390.764.516.720,29)
Koreksi Aset Tak Berwujud	(587.476.000,00)
Koreksi Akumulasi Amortisasi ATB	5.728.925,00
Koreksi Kewajiban	1.691.452,00
Koreksi Aset Lainnya	105.875.500,00
Ekuitas Akhir	1.934.867.214.152,54

Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang tercermin dalam pendapatan – LO, beban dan surplus/defisit operasional.

5.4.1. Pendapatan-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.089.974.958.345,93	972.382.321.419,09

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Manggarai yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 143. Pendapatan LO yang berakhir 31 Desember 2023

No.	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	124.746.950.084,35	97.519.540.913,09
2	Pendapatan Transfer - LO	956.840.907.318,58	808.198.279.359,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	8.387.100.943,00	66.664.501.147,00
Jumlah Pendapatan - LO		1.089.974.958.345,93	972.382.321.419,09

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
124.746.950.084,35	97.519.540.913,09

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp124.746.950.084,35 yang terdiri dari:

Tabel 144. Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2023

No.	Nama Pegawai	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	25.758.446.934,76	18.497.011.714,66
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	9.596.299.547,42	6.839.385.979,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.567.584.252,00	3.371.631.127,65
4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	83.824.619.350,17	68.811.512.091,78
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		124.746.950.084,35	97.519.540.913,09

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
25.758.446.934,76	18.497.011.714,66

Realisasi Pendapatan Pajak-LO Tahun 2023 sebesar Rp25.758.446.934,76, dengan rinciannya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 145. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian Pendapatan Pajak Daerah-LO		Saldo 2023
1.	Pajak Hotel-LO	689.900.918,00
2.	Pajak Restoran-LO	2.447.944.728,00
3.	Pajak Hiburan-LO	7.328.000,00
4.	Pajak Reklame-LO	148.425.750,00
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	6.170.069.279,59
6.	Pajak Air Tanah-LO	98.243.196,00
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	8.998.693.188,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	5.610.826.386,17
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.587.015.489,00
Jumlah		25.758.446.934,76

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 146. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah LRA	Jumlah LO	Selisih
1.	Pajak Hotel	671.848.918,00	689.900.918,00	(18.052.000,00)
2.	Pajak Restoran	2.394.095.962,00	2.447.944.728,00	(53.848.766,00)
3.	Pajak Hiburan	7.838.000,00	7.328.000,00	510.000,00
4.	Pajak Reklame	138.215.750,00	148.425.750,00	(10.210.000,00)
5.	Pajak Penerangan Jalan	5.691.999.322,59	6.170.069.279,59	(478.069.957,00)
6.	Pajak Air Tanah	41.903.377,00	98.243.196,00	(56.339.819,00)
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.964.219.356,00	8.998.693.188,00	(34.473.832,00)
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.232.201.285,17	5.610.826.386,17	(1.378.625.101,00)
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.587.015.489,00	1.587.015.489,00	0,00
Pajak Daerah		23.729.337.459,76	25.758.446.934,76	(2.029.109.475,00)

Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO dijelaskan sebagai berikut:

- Selisih Pajak Hotel-LO dan Pajak Hotel-LRA sebesar Rp18.052.000,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran piutang pajak hotel pada Tahun 2023 sebesar Rp8.799.000,00 dan penambahan atas piutang pajak hotel Tahun 2023 sebesar Rp26.851.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah;
- Selisih Pajak Restoran-LO dan Pajak Restoran-LRA sebesar Rp53.548.766,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran piutang pajak restoran pada Tahun 2023 sebesar Rp3.168.250,00 dan penambahan atas piutang pajak restoran Tahun 2023 sebesar Rp57.017.016,00 pada Badan Pendapatan Daerah;
- Selisih Pajak Hiburan-LO dan Pajak Hiburan-LRA sebesar Rp510.000,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran piutang pajak hiburan pada Tahun 2023 sebesar Rp510.000,00 pada badan Pendapatan Daerah. Tidak ada penambahan atas piutang pajak hiburan Tahun 2023;
- Selisih Pajak Reklame-LO dan Pajak Reklame-LRA sebesar Rp10.210.000,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran piutang pajak reklame pada Tahun 2023 sebesar Rp2.410.000,00 dan penambahan atas piutang pajak reklame Tahun 2023 sebesar Rp12.620.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5. Selisih Pajak Penerangan Jalan-LO dan Pajak Penerangan Jalan-LRA sebesar Rp478.069.957,00 dapat dijelaskan terdapat pengakuan piutang pajak penerangan jalan pada Tahun 2023 sebesar Rp478.069.957,00 pada Badan Pendapatan Daerah;
6. Selisih Pajak Air Tanah-LO dan Pajak Air Tanah -LRA sebesar Rp56.339.819,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran piutang pajak air tanah pada Tahun 2023 sebesar Rp572.772,00 dan penambahan atas piutang pajak air tanah Tahun 2023 sebesar Rp56.912.591,00 pada Badan Pendapatan Daerah;
7. Selisih Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA sebesar Rp34.473.832,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran piutang pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak galian C) pada Tahun 2023 sebesar Rp67.207.035,00 dan penambahan atas piutang pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak galian C) Tahun 2023 sebesar Rp101.680.867,00 pada Badan Pendapatan Daerah; dan
8. Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan-LO dan Pajak Bumi/Bangunan Pedesaan/Perkotaan- LRA sebesar Rp1.378.625.101,00, dapat jelaskan bahwa pada Tahun 2023 terdapat penyetoran atas Piutang PBB P2 sebesar Rp409.265.454,00 dan Penambahan piutang PBB P2 sebesar Rp1.787.890.555,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
9.596.299.547,42	6.839.385.979,00

Realisasi Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2023 sebesar Rp9.596.299.547,42 adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 147. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Uraian Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Saldo 2023
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.433.523.420,42
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	597.468.000,00
3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	1.100.000,00
4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	185.453.000,00
5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	255.611.000,00
6 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.146.500,00
7 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	351.021.447,00
8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	765.168.560,00
9 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.681.978.765,00
10 Retribusi Tempat Pelelangan	21.330.000,00
11 Retribusi Terminal	106.759.000,00
12 Retribusi Rumah Potong Hewan	165.440.000,00
13 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	9.055.980,00
14 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	218.658.000,00
15 Retribusi Produksi Usaha Daerah	0,00
16 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	528.780.000,00
17 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	265.895.875,00
18 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	910.000,00
Jumlah	9.596.299.547,42

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tersebut disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 148. Selisih Pendapatan Retribusi-LO dengan Pendapatan Retribusi-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA		Jumlah LRA	Jumlah LO	Selisih
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.433.523.420,42	3.433.523.420,42	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	597.468.000,00	597.468.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	185.453.000,00	185.453.000,00	0,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	255.611.000,00	255.611.000,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.146.500,00	8.146.500,00	0,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	351.021.447,00	351.021.447,00	0,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	793.379.860,00	765.168.560,00	28.211.300,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.051.694.980,00	2.681.978.765,00	(630.283.785,00)
10	Retribusi Tempat Pelelangan	21.330.000,00	21.330.000,00	0,00
11	Retribusi Terminal	106.759.000,00	106.759.000,00	0,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	165.440.000,00	165.440.000,00	0,00
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	9.055.980,00	9.055.980,00	0,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	218.658.000,00	218.658.000,00	0,00
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	535.580.000,00	528.780.000,00	6.800.000,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	265.895.875,00	265.895.875,00	0,00
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	910.000,00	910.000,00	0,00
Jumlah		9.001.027.062,42	9.596.299.547,42	(595.272.485,00)

Selisih Retribusi Jasa Usaha-LO dan Retribusi Jasa Usaha-LRA sebesar (Rp595.272.485,00) pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Selisih dari retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa retribusi rumah dinas sebesar Rp28.211.300,00 terdiri dari pelunasan piutang retribusi rumah dinas sebesar Rp28.211.300,00. Tidak ada penambahan piutang baru atas retribusi rumah dinas di Tahun 2023;
- b. Selisih dari retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar (Rp630.283.785,00) berupa retribusi pasar sebesar (Rp547.661.160,00), retribusi ruko sebesar (Rp50.730.000,00), retribusi *shopping center* sebesar (Rp9.655.125,00), retribusi pasar rakyat sebesar (Rp22.237.500,00), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Selisih dari retribusi pasar sebesar (Rp547.661.160,00) terdiri dari penambahan piutang baru atas retribusi pasar Tahun 2023 sebesar Rp706.719.150,00 dan pelunasan piutang retribusi pasar sebesar Rp159.057.990,00;
 - 2) Selisih dari retribusi ruko sebesar (Rp50.730.000,00) terdiri dari penambahan piutang baru atas retribusi ruko Tahun 2023 sebesar Rp99.222.000,00 dan pelunasan piutang retribusi ruko sebesar Rp48.492.000,00;
 - 3) Selisih dari retribusi *shopping center* sebesar (Rp9.655.125,00) terdiri dari penambahan piutang baru atas retribusi *shopping center* Tahun 2023 sebesar Rp15.111.375,00 dan pelunasan piutang retribusi *shopping center* sebesar Rp5.456.250,00; dan
 - 4) Selisih dari retribusi pasar rakyat sebesar (Rp22.237.500,00) terdiri dari penambahan piutang baru atas retribusi pasar rakyat Tahun 2023 sebesar Rp35.987.500,00 dan pelunasan piutang retribusi pasar rakyat sebesar Rp13.750.000,00; dan
- c. Selisih dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp6.800.000,00 merupakan koreksi untuk mencatat defisit atas Aset Tetap Lainnya (hewan ternak) indukan Babi afkir yang dijual sebesar Rp6.800.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
5.567.584.252,00	3.371.631.127,65

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp5.567.584.252,00 dan Rp3.371.631.127,65, yang merupakan saldo pendapatan berupa pembagian laba atas penyertaan modal pada Bank NTT. Pembagian laba tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Nomor 25 dan telah dikreditkan pada RKUD sesuai dengan Nota Debit Nomor 1534/CM-PDE/III /2023 tanggal 30 Maret 2023.

5.4.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
83.824.619.350,17	68.811.512.091,78

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp83.824.619.350,17 adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 149. Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO

Uraian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO		Saldo 2023
Lain-lain PAD yang Sah – LO		83.824.619.350,17
Jasa Giro		3.482.604.140,38
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TPTGR)		827.833.169,84
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		67.840.361,00
Pendapatan dari Pengembalian		915.299.536,26
Pendapatan BLUD		62.729.296.268,84
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		15.764.521.920,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA		37.223.953,85

Terdapat perbedaan antara Lain-Lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 150. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LRA

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA	Jumlah - LRA	Jumlah - LO	Selisih
Jasa Giro	3.488.280.627,39	3.482.604.140,38	5.676.487,01
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TPTGR)	827.833.169,84	827.833.169,84	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	27.388.696,00	67.840.361,00	(40.451.665,00)
Pendapatan dari Pengembalian	980.196.440,26	915.299.536,26	64.896.904,00
Pendapatan BLUD	65.208.938.848,84	62.729.296.268,84	2.479.642.580,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15.764.521.920,00	15.764.521.920,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	31.547.466,84	37.223.953,85	(5.676.487,01)
Jumlah	86.328.707.169,17	83.824.619.350,17	2.504.087.819,00

Selisih Lain-Lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp2.504.087.819,00 pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Selisih dari jasa giro sebesar Rp5.676.487,01 dan lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp5.676.487,01 disebabkan karena adanya reklasifikasi dari jasa giro ke lain-lain PAD yang sah lainnya;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Selisih dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum disetorkan sebesar Rp40.451.665,00 berupa temuan denda keterlambatan pekerjaan;
- c. Selisih dari pendapatan dari pengembalian sebesar Rp64.896.904,00 merupakan pengembalian Piutang lainnya (Piutang Uang Muka) yang dicatatkan sebagai Lain-Lain PAD yg sah LRA; dan
- d. Selisih dari pendapatan BLUD sebesar Rp2.479.642.580,00 merupakan pelunasan dari Piutang Pendapata BLUD.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
956.840.907.318,58	808.198.279.359,00

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp956.840.907.318,58 yang terdiri dari.

Tabel 151. Rincian Pendapatan Transfer-LO

Uraian Pendapatan Transfer-LO	Saldo 2023
PENDAPATAN TRANSFER-LO	956.840.907.318,58
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	918.582.500.520,58
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	9.503.751.132,58
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	596.218.538.347,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	131.686.954.206,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	181.173.256.835,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO	5.809.126.000,00
Dana Penyesuaian-LO	5.809.126.000,00
Transfer Antar Daerah	32.449.280.798,00
Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	32.449.280.798,00

5.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
918.582.500.520,58	769.174.349.255,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 sebesar Rp918.582.500.520,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 152. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	Saldo 2023
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	918.582.500.520,58
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	9.503.751.132,58
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	596.218.538.347,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	131.686.954.206,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	181.173.256.835,00

Terdapat perbedaan antara nilai Transfer Dana Perimbangan antara LRA dengan LO yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 153. Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan Dana Perimbangan - LRA

No.	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	9.500.617.829,00	9.503.751.132,58	(3.133.303,58)
2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	596.218.538.347,00	596.218.538.347,00	0,00
3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	131.686.954.206,00	131.686.954.206,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	LRA	LO	Selisih
4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	181.173.256.835,00	181.173.256.835,00	0,00
	Jumlah	918.579.367.217,00	918.582.500.520,58	(3.133.303,58)

Terdapat selisih antara realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LRA dan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp3.133.303,58. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan piutang baru transfer bagi hasil pajak Tahun 2023 sebesar Rp40.915.000,00. Piutang ini muncul karena pendapatan transfer bagi hasil pajak tahun 2023 baru masuk di tanggal 3 Januari Tahun 2024. Terdapat koreksi untuk mengakui TDF 2023 (Aset Lain - Lain) sesuai dengan ND Dirjen Perben Nomor ND-79/PB.2/2024 sebesar Rp1.430.759.000,00 serta koreksi atas pengurangan Piutang dan Aset Lain - Lain TA 2022 terkait penarikan dana TDF yang sebelumnya diakui seluruhnya sebagai Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.468.540.696,42.

5.4.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
5.809.126.000,00	0,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp5.809.126.000,00 yang merupakan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Insentif Daerah.

Tabel 154. Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya- LO dan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LRA

No.	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Dana Insentif Daerah - LRA	5.809.126.000,00	5.809.126.000,00	0,00
2	Dana Desa - LRA	127.982.480.000,00	0,00	127.982.480.000,00
	Jumlah	5.809.126.000,00	5.809.126.000,00	127.982.480.000,00

Terdapat selisih antara Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO dan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LRA senilai Rp127.982.480.000,00 yang merupakan Dana Desa yang tidak tercatat pada Laporan Operasional.

5.4.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
32.449.280.798,00	39.023.930.104,00

Saldo Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp32.449.280.798,00 dan Rp39.023.930.104,00 merupakan saldo dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO yang terdiri atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Rincian lebih lanjut atas saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 155. Tabel Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.631.380.631,00	6.076.265.526,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.480.911.057,00	3.398.291.747,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.741.117.496,00	12.937.851.082,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	15.302.310,00	114.023.050,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.580.569.304,00	16.497.498.699,00
	Jumlah	32.449.280.798,00	39.023.930.104,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Adapun perbandingan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dengan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 156. Perbandingan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

No.	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.929.193.338,00	1.631.380.631,00	2.297.812.707,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.556.679.576,00	1.480.911.057,00	2.075.768.519,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.921.598.755,00	5.741.117.496,00	6.180.481.259,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	44.801.082,00	15.302.310,00	29.498.772,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.938.496.261,00	23.580.569.304,00	(7.642.073.043,00)
	Jumlah	35.390.769.012,00	32.449.280.798,00	2.941.488.214,00

Selisih pada Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp2.941.488.214,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LRA dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO adalah sebesar Rp2.297.812.707,00 yang terdiri dari pelunasan piutang Tahun 2022 sebesar Rp358.075.399,00 dan penambahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp2.655.888.106,00;
2. Selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LRA dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp2.075.768.519,00 yang terdiri dari pelunasan piutang Tahun 2022 sebesar Rp1.024.139.045,00 dan penambahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp1.051.629.474,00;
3. Selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LRA dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp6.180.481.259,00 yang terdiri dari pelunasan piutang Tahun 2022 sebesar Rp2.259.767.723,00 dan penambahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp3.920.713.536,00;
4. Selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LRA dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO sebesar Rp29.498.772,00 terdiri dari pelunasan piutang Tahun 2022 sebesar Rp15.656.845,00 dan penambahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp13.841.927,00; dan
5. Selain itu terdapat penambahan piutang baru atas pajak rokok sebesar Rp7.642.073.043,00 merupakan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (Neraca) sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/73/BKUD4/2024 tentang Hutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Kepada Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur.

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>8.387.100.943,00</u>	<u>66.664.501.147,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp8.387.100.943,00 dan Rp66.664.501.147,00 yang bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 157. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO

Uraian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO	Saldo 2023
Pendapatan Hibah-LO	8.387.100.943,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	8.387.100.943,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00
Lain-lain Pendapatan-LO	0,00
Jumlah	8.387.100.943,00

Selisih Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 158. Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA

Uraian	Jumlah-LRA	Jumlah-LO	Selisih
Pendapatan Hibah	3.825.000.000,00	8.387.100.943,00	4.562.100.943,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.825.000.000,00	8.387.100.943,00	4.562.100.943,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.825.000.000,00	8.387.100.943,00	4.562.100.943,00

Selisih pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LRA dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO sebesar Rp4.562.100.943,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penambahan Hibah Peralatan dan Mesin Alat Kesehatan pada BLUD RSUD yaitu berupa Laparaskopi dengan Kamera dan Monitor sebesar Rp1.389.000.000,00 dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai sesuai Berita Acara Nomor 476/028/240/VIII/DP2KB/2023 Tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penambahan Hibah pada Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Manggarai dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp788.137.750,00 berupa Paket Pojok Baca Digital sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 5326/4.2/PLK.03.07/XII.2023 tanggal 11 Desember 2023 dan Mobil Perpustakaan Keliling sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 5566/4.2/PLK.03.03/XI.2023 tanggal 4 November 2023 serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp78.549.400,00 berupa layanan pojok baca digital sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 10934/4.2/PLK.03.07/XII.2023 tanggal 15 Desember 2023; dan
3. Penambahan Hibah Bangunan dan Gedung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu berupa dua unit bangunan homestay yang terletak di Mbaru Ceka Dusun Konggang Desa Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat dan di Palot Dusun Labuan Taur Desa Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat dengan total senilai Rp2.306.413.793,00 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 144.1/KU.09.05/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

5.4.2. Beban

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.029.008.382.009,60	941.288.551.594,66



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 159. Rincian Beban TA 2023

Uraian Beban	Saldo Beban 2023
BEBAN	
Beban Pegawai	428.737.940.982,31
Beban Barang	134.548.073.119,33
Beban Jasa	148.775.138.868,00
Beban Pemeliharaan	2.867.988.311,36
Beban Perjalanan Dinas	35.593.577.118,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	65.325.929.085,00
Beban Bunga	5.950.702.293,87
Beban Hibah	35.738.253.274,06
Beban Bantuan Sosial	2.300.370.225,00
Beban Penyisihan Piutang	1.982.560.947,08
Beban Penyusutan dan Amortisasi	167.187.847.785,59
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	65.325.929.085,00
Jumlah	1.029.008.382.009,60

5.4.2.1. Beban Pegawai

31 Desember 2023

(Rp)

428.737.940.982,31

31 Desember 2022

(Rp)

434.884.018.430,24

Beban Pegawai Kabupaten Manggarai adalah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp428.737.940.982,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 160. Beban Pegawai

Uraian Beban Pegawai	Saldo Beban 2023
Beban Pegawai	428.737.940.982,31
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	332.441.584.137,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	9.835.868.900,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68.954.415.815,31
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.686.970.458,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.021.672,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	559.680.000,00
Beban Pegawai BLUD	86.400.000,00

Selisih Belanja Pegawai dan Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 161. Perbandingan Belanja Pegawai dan Beban Pegawai

Uraian	Belanja Pegawai	Beban Pegawai	Selisih
Belanja Pegawai	429.160.625.973,00	428.737.940.982,31	422.684.990,69
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	332.296.664.957,00	332.441.584.137,00	(144.919.180,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.835.868.900,00	9.835.868.900,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.522.019.986,00	68.954.415.815,31	567.604.170,69
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.686.970.458,00	16.686.970.458,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.021.672,00	173.021.672,00	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	559.680.000,00	559.680.000,00	0,00
Belanja Pegawai BOS	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00

Selisih antara Belanja Pegawai dan Beban Pegawai sebesar Rp422.684.990,69 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Beban Gaji dan Tunjangan ASN selisih sebesar Rp144.919.180,00 merupakan koreksi untuk mengakui pelunasan piutang kelebihan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PPh 21 (Piutang Lain-lain PAD yang Sah) berupa kompensasi atas PPh 21 terutang di Tahun 2023; dan

- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LRA dengan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO sebesar Rp567.604.170,69 disebabkan karena adanya Beban pegawai berupa Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

5.4.2.2. Beban Barang

31 Desember 2023

(Rp)

134.548.073.119,33

31 Desember 2022

(Rp)

73.323.969.518,66

Saldo Beban Barang – LO per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp134.548.073.119,33 dan Rp73.323.969.518,66 yang merupakan konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang yang habis pakai, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 162. Rincian Beban Barang TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
1	Beban Barang BLUD	29.900.922.533,98	0,00
2	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.242.863.262,00	25.695.090.187,00
3	Beban Makanan dan Minuman Rapat	24.459.274.543,00	6.696.389.600,00
4	Beban Barang BOS	15.024.743.275,00	0,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.852.085.037,00	3.049.930.946,00
6	Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.514.074.312,00	6.415.902.622,00
7	Beban Ekstrakomptabel	3.964.806.613,67	0,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.736.325.500,00	1.362.535.725,00
9	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.486.500.000,00	2.547.460.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.284.772.627,00	20.022.994.849,00
11	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.834.067.052,00	2.076.144.782,00
12	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.739.564.300,00	326.940.000,00
13	Beban Obat-Obatan-Obat	1.267.350.829,80	2.030.987.290,66
14	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.239.988.600,00	2.093.060.941,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.085.680.922,00	2.186.875.200,00
16	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	787.094.249,83	81.260.560,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	760.120.013,00	1.131.372.465,00
18	Beban Natura dan Pakan-Pakan	390.163.607,96	689.854.424,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	311.415.000,09	0,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	308.189.163,00	0,00
21	Beban Barang BOP PAUD	237.501.898,00	0,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	167.149.903,00	234.203.500,00
23	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	159.885.000,00	132.220.000,00
24	Beban Bahan-Bahan Kimia	145.314.800,00	16.822.000,00
25	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	137.550.000,00	702.405.750,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	97.370.000,00	0,00
27	Beban Pakaian Adat Daerah	94.997.000,00	7.500.000,00
28	Beban Barang BOP Kesetaraan	75.409.000,00	0,00
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.709.494,00	0,00
30	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	58.075.200,00	177.280.040,00
31	Beban Pakaian Paskibraka	41.985.750,00	34.799.900,00
32	Beban Pakaian Olahraga	27.441.420,00	126.047.700,00
33	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	15.000.000,00	15.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
34	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	10.482.213,00	10.482.000,00
35	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	7.800.000,00	142.540.000,00
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.000.000,00	2.280.000,00
37	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	7.500.000,00
38	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.500.000,00	0,00
39	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.000.000,00	0,00
40	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	900.000,00	216.900.000,00
41	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	13.850.000,00
42	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	0,00	196.150.500,00
43	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	0,00	63.593.041,00
44	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	814.848.665,00
45	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	314.475.000,00
46	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	(9.079.902.003,00)
47	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	2.727.193.834,00
48	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	34.880.000,00
49	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	6.100.000,00
Jumlah		134.548.073.119,33	73.323.969.518,66

Terdapat perbedaan antara Belanja Barang dan Beban Barang. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Belanja Barang dan Beban Barang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 163. Perbandingan Belanja Barang dan Beban Barang TA 2023

No	Uraian	Belanja Barang	Beban Barang	Selisih
1	Belanja Barang BLUD	29.800.864.733,98	29.900.922.533,98	(100.057.800,00)
2	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.262.713.262,00	29.242.863.262,00	19.850.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.459.274.543,00	24.459.274.543,00	0,00
4	Belanja Barang BOS	14.112.081.783,00	15.024.743.275,00	(912.661.492,00)
5	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.816.433.859,00	6.514.074.312,00	302.359.547,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.736.325.500,00	2.736.325.500,00	0,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.486.500.000,00	2.486.500.000,00	0,00
8	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.322.068.586,00	787.094.249,83	1.534.974.336,17
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.250.567.327,00	6.852.085.037,00	(4.601.517.710,00)
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.244.810.627,00	2.284.772.627,00	(39.962.000,00)
11	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.864.200.000,00	1.739.564.300,00	124.635.700,00
12	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.834.067.052,00	1.834.067.052,00	0,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.239.988.600,00	1.239.988.600,00	0,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.085.680.922,00	1.085.680.922,00	0,00
15	Belanja Obat-Obatan-Obat	940.672.878,00	1.267.350.829,80	(326.677.951,80)
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	752.650.013,00	760.120.013,00	(7.470.000,00)
17	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	627.660.000,00	390.163.607,96	237.496.392,04
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	465.513.649,09	311.415.000,09	154.098.649,00
19	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	346.500.000,00	137.550.000,00	208.950.000,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	303.865.163,00	308.189.163,00	(4.324.000,00)
21	Belanja Barang BOP PAUD	244.960.000,00	237.501.898,00	7.458.102,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	165.974.903,00	167.149.903,00	(1.175.000,00)
23	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	159.885.000,00	159.885.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Belanja Barang	Beban Barang	Selisih
24	Belanja Bahan-Bahan Kimia	142.760.700,00	145.314.800,00	(2.554.100,00)
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	97.370.000,00	97.370.000,00	0,00
26	Belanja Pakaian Adat Daerah	94.997.000,00	94.997.000,00	0,00
27	Belanja Barang BOP Kesetaraan	75.409.000,00	75.409.000,00	0,00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.709.494,00	65.709.494,00	0,00
29	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	58.075.200,00	58.075.200,00	0,00
30	Belanja Pakaian Paskibraka	41.985.750,00	41.985.750,00	0,00
31	Belanja Pakaian Olahraga	27.441.420,00	27.441.420,00	0,00
32	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
33	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	10.482.213,00	10.482.213,00	0,00
34	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
36	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
37	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
38	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
39	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	900.000,00	900.000,00	0,00
40	Beban Barang atas Aset Ekstrakomptabel	0,00	3.964.806.613,67	(3.964.806.613,67)
Jumlah		127.176.689.178,07	134.548.073.119,33	(7.371.383.941,26)

Selisih Belanja Barang dan Beban Barang dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Belanja Barang BLUD dan Beban Barang BLUD senilai Rp100.057.800,00 karena terdapat penambahan beban atas utang penggandaan pada RSUD Ruteng senilai Rp214.057.800,00 serta terdapat belanja untuk pelunasan utang tahun sebelumnya senilai Rp114.000.000,00;
2. Selisih Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp19.850.000,00 disebabkan oleh kesalahan penganggaran jasa konsultan dan jasa pengawas atas pembangunan Aset Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp56.000.000,00. Selain itu, selisih juga disebabkan karena bertambahnya beban atas penyerahan persediaan kepada masyarakat berupa ikan senilai Rp36.150.000,00;
3. Selisih Belanja Barang BOS dan Beban Barang BOS senilai Rp912.661.492,00 disebabkan oleh penambahan beban atas pengadaan barang dan jasa melalui Belanja Hibah. Selisih ini terjadi karena terdapat kesalahan penganggaran SILPA BOS dan BOS Kinerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Selisih Belanja Bahan-Bahan Lainnya dan Beban Bahan-Bahan Lainnya senilai Rp302.359.547,00 disebabkan karena terdapat belanja untuk pelunasan utang tahun sebelumnya senilai Rp304.859.547,00 dan terdapat penambahan beban atas penggunaan bahan lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp2.500.000,00;
5. Selisih Belanja Obat – Obatan Lainnya dan Beban Obat – Obatan Lainnya senilai Rp1.534.974.336,17 terdiri dari:
 - a. Belanja atas pelunasan utang senilai Rp74.925.000,00;
 - b. Penambahan beban barang atas penggunaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) senilai Rp24.932.000,00 yang dibelanjakan melalui Belanja Modal Peralatan dan Mesin; dan
 - c. Penambahan persediaan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.484.981.336,17.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

6. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak senilai Rp4.601.517.710,00 disebabkan oleh penambahan beban atas penggunaan persediaan bahan cetak pada RSUD Ruteng senilai Rp4.384.842.517,00, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp248.275.193, Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp9.599.500,00 dan Badan Pendapatan Daerah senilai Rp48.000.000,00. Selain itu, juga terdapat penambahan persediaan bahan cetak pada RSUD Ruteng senilai Rp46.924.500,00 dan Dinas Perhubungan senilai Rp42.275.000,00;
7. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor senilai Rp39.962.000,00 karena terdapat penambahan beban atas penggunaan persediaan Alat Tulis Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Perhubungan senilai Rp44.534.000,00 dan terdapat penambahan persediaan pada RSUD Ruteng dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp4.572.000,00;
8. Selisih Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain senilai Rp124.635.700,00 disebabkan karena koreksi tambah persediaan pada SKB Randong senilai Rp124.635.700,00;
9. Selisih Belanja Obat-Obatan dan Beban Obat-Obatan senilai Rp326.677.951,80 disebabkan oleh penambahan beban atas penggunaan persediaan obat-obatan senilai Rp2.029.840.499,00, penambahan persediaan senilai Rp1.352.231.409,00 serta reklasifikasi atas beban barang menjadi defisit kegiatan non operasional senilai Rp350.931.138,20 atas obat-obatan yang kadaluarsa pada Tahun 2023;
10. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover senilai Rp7.470.000,00 disebabkan karena penambahan beban atas penggunaan persediaan kertas dan cover senilai Rp7.615.000,00 dan bertambahnya persediaan senilai Rp145.000,00;
11. Selisih Belanja Natura dan Pakan dan Beban Natura dan Pakan senilai Rp237.496.392,04 disebabkan karena penambahan beban atas penggunaan persediaan pakan senilai Rp8.153.131,96 dan bertambahnya persediaan pakan senilai Rp245.649.524,00;
12. Selisih Belanja Perabot Kantor dan Beban Perabot Kantor senilai Rp154.098.649,00 karena terdapat penambahan beban atas penggunaan perabot kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.270.000,00;
13. Selisih Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan dan Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan senilai Rp208.950.000,00 disebabkan karena terdapat penambahan beban penggunaan persediaan atas anak hewan ternak yang dijual senilai Rp146.400.000,00 pada Dinas Peternakan. Selain itu, juga terdapat penambahan persediaan berupa ikan senilai Rp34.050.000,00 pada Dinas Perikanan dan hewan ternak babi senilai Rp321.300.000,00 pada Dinas Peternakan;
14. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya senilai Rp4.324.000,00 disebabkan karena penambahan beban atas penggunaan persediaan alat kantor lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp4.324.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

15. Selisih Belanja Barang BOP PAUD dan Beban Barang BOP PAUD senilai Rp7.458.102,00 karena terdapat pengadaan Aset Peralatan dan Mesin yang menggunakan anggaran Belanja Barang;
16. Selisih Belanja Alat Listrik dan Beban Alat Listrik senilai Rp1.175.000,00 disebabkan karena terdapat penambahan beban atas penggunaan persediaan alat listrik senilai Rp1.175.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Selisih Belanja Bahan - Bahan Kimia dan Beban Bahan - Bahan Kimia senilai Rp2.554.100,00 karena terdapat penambahan beban atas penggunaan pestisida pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp2.554.100,00; dan
18. Selisih terkait dengan penambahan beban barang atas aset yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi (ekstrakomptabel) pengadaan TA 2023 senilai Rp3.964.806.613,67.

5.4.2.3. Beban Jasa

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
148.775.138.868,00	157.848.404.006,20

Saldo Beban Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp148.775.138.868,00 dan Rp157.848.404.006,20 yang merupakan konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selama TA 2023. Rincian lebih lanjut atas Beban Jasa TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 164. Beban Jasa

No.	Beban Jasa	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Jasa BLUD	36.434.456.754,00	62.865.882.064,20
2	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	27.559.719.388,00	27.159.996.566,00
3	Beban Jasa BOS	22.947.065.901,00	0,00
4	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	16.562.665.320,00	22.842.807.842,00
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	10.899.328.600,00	0,00
6	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.030.000.000,00	0,00
7	Beban Jasa Tenaga Administrasi	5.773.050.250,00	4.645.874.150,00
8	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.699.186.000,00	0,00
9	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.487.951.200,00	2.620.259.500,00
10	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.086.839.000,00	2.342.559.250,00
11	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.042.964.000,00	2.303.070.750,00
12	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.390.750.000,00	0,00
13	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.169.635.411,00	1.224.784.001,00
14	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.165.419.531,00	1.916.004.610,00
15	Beban Tagihan Listrik	853.152.178,00	530.125.956,00
16	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	798.539.500,00	990.604.750,00
17	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	418.300.000,00	367.500.000,00
18	Beban Tagihan Air	365.740.250,00	364.039.425,00
19	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	323.450.766,00	366.589.630,00
20	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	321.300.000,00	983.403.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Keamanan	294.960.000,00	136.521.000,00
22	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	294.200.000,00	0,00
23	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	284.324.785,00	0,00
24	Beban Bimbingan Teknis	272.899.000,00	573.159.500,00
25	Beban Jasa Tenaga Supir	243.210.000,00	253.989.500,00
26	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	223.556.500,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban Jasa	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
27	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	217.060.000,00	89.935.000,00
28	Beban Beasiswa	187.999.000,00	125.000.000,00
29	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	160.000.000,00	162.000.000,00
30	Beban Medical Check Up	135.032.000,00	151.240.355,00
31	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	119.470.000,00	96.650.000,00
32	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	105.207.045,00	4.509.842,00
33	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	90.576.000,00	550.900.150,00
34	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	90.000.000,00	360.000.000,00
35	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	82.900.000,00	0,00
36	Beban Paket/Pengiriman	81.903.059,00	52.127.951,00
37	Beban Jasa Pencucian Pakaian. Alat Kesenian dan Kebudayaan. serta Alat Rumah Tangga	80.000.000,00	80.000.000,00
38	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	58.900.000,00	74.500.000,00
39	Beban Jasa Iklan/Reklame Film. dan Pemotretan	57.458.150,00	0,00
40	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	51.600.000,00	83.200.000,00
41	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	50.000.000,00	0,00
42	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	48.642.000,00	57.041.500,00
43	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	48.642.000,00	48.935.000,00
44	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	35.500.000,00	51.500.000,00
45	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	28.780.000,00	67.610.000,00
46	Beban Tagihan Telepon	20.695.798,00	15.029.890,00
47	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	16.500.000,00	0,00
48	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	15.000.000,00	0,00
49	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	0,00
50	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	48.000.000,00
51	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	7.920.000,00	9.510.000,00
52	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.000.000,00	24.500.000,00
53	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	3.891.360,00	0,00
54	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air. dan Listrik	3.751.084,00	0,00
55	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.443.738,00	3.575.079,00
56	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	3.000.000,00	20.000.000,00
57	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	1.800.000,00	0,00
58	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00
59	Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	0,00
60	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	803.300,00	519.100,00
61	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	5.500.000,00
62	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia	0,00	855.550.000,00
63	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.101.347.500,00
64	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	418.184.000,00
65	Beban Honorarium Rohaniwan	0,00	5.600.000,00
66	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi. Kabupaten atau Kota	0,00	3.000.000,00
67	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	130.725.000,00
68	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	0,00	454.150.000,00
69	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	1.377.559.450,00
70	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	713.025.000,00
71	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon. Air. dan Listrik	0,00	58.328.284,00
72	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	25.000.000,00
73	Beban Jasa Iklan/Reklame. Film. dan Pemotretan	0,00	130.100.000,00
74	Beban Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan	0,00	318.863.129,00
75	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	320.187.500,00
76	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	10.802.198.400,00
77	Beban Sewa Excavator	0,00	198.245.382,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban Jasa	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
78	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	3.000.000,00
79	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	6.000.000,00
80	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	65.032.000,00
81	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	0,00	33.328.000,00
82	Beban Sewa Alat Musik	0,00	32.000.000,00
83	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	250.000.000,00
84	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	0,00	736.656.000,00
85	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	130.000.000,00
86	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0,00	7.681.000,00
87	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	2.002.488.000,00
	Jumlah	148.775.138.868,00	157.848.404.006,20

Terdapat perbedaan antara Belanja Jasa dan Beban Jasa. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Belanja Jasa dan Beban Jasa tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 165. Perbandingan Belanja Jasa dan Beban Jasa

No	Uraian	Belanja Jasa	Beban Jasa	Selisih
1	Belanja Jasa BLUD	35.834.699.136,00	36.434.456.754,00	(599.757.618,00)
2	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	27.559.719.388,00	27.559.719.388,00	0,00
3	Belanja Jasa BOS	22.947.065.901,00	22.947.065.901,00	0,00
4	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	16.562.665.320,00	16.562.665.320,00	0,00
5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.030.000.000,00	9.030.000.000,00	0,00
6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.773.050.250,00	5.773.050.250,00	0,00
7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.699.186.000,00	2.699.186.000,00	0,00
8	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.487.951.200,00	2.487.951.200,00	0,00
9	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.086.839.000,00	2.086.839.000,00	0,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.042.964.000,00	2.042.964.000,00	0,00
11	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.390.750.000,00	1.390.750.000,00	0,00
12	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.169.635.411,00	1.169.635.411,00	0,00
13	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.165.419.531,00	1.165.419.531,00	0,00
14	Belanja Tagihan Listrik	853.152.178,00	853.152.178,00	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	798.539.500,00	798.539.500,00	0,00
16	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	418.300.000,00	418.300.000,00	0,00
17	Belanja Tagihan Air	365.740.250,00	365.740.250,00	0,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	323.450.766,00	323.450.766,00	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	321.300.000,00	321.300.000,00	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	294.960.000,00	294.960.000,00	0,00
21	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	294.200.000,00	294.200.000,00	0,00
22	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	284.324.785,00	284.324.785,00	0,00
23	Belanja Bimbingan Teknis	272.899.000,00	272.899.000,00	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Supir	243.210.000,00	243.210.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Belanja Jasa	Beban Jasa	Selisih
25	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	223.556.500,00	223.556.500,00	0,00
26	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	217.060.000,00	217.060.000,00	0,00
27	Belanja Beasiswa	187.999.000,00	187.999.000,00	0,00
28	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
29	Belanja Medical Check Up	135.032.000,00	135.032.000,00	0,00
30	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	119.470.000,00	119.470.000,00	0,00
31	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	105.207.045,00	105.207.045,00	0,00
32	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	90.576.000,00	90.576.000,00	0,00
33	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
34	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	82.900.000,00	82.900.000,00	0,00
35	Belanja Paket/Pengiriman	81.903.059,00	81.903.059,00	0,00
36	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
37	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00
38	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	57.458.150,00	57.458.150,00	0,00
39	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
40	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
41	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	48.642.000,00	48.642.000,00	0,00
42	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	48.642.000,00	48.642.000,00	0,00
43	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00
44	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	28.780.000,00	28.780.000,00	0,00
45	Belanja Tagihan Telepon	20.695.798,00	20.695.798,00	0,00
46	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
47	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
48	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
49	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
50	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00
51	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
52	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
53	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	3.891.360,00	3.891.360,00	0,00
54	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	3.751.084,00	3.751.084,00	0,00
55	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.443.738,00	3.443.738,00	0,00
56	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
57	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
58	Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
59	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
60	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	803.300,00	803.300,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Belanja Jasa	Beban Jasa	Selisih
61	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	10.895.428.600,00	(10.895.428.600,00)
	Jumlah	137.279.952.650,00	148.775.138.868,00	(11.495.186.218,00)

Selisih Belanja Jasa dan Beban Jasa dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih antara Belanja Jasa BLUD dan Beban Jasa BLUD senilai Rp599.757.618,00 disebabkan oleh peningkatan utang pelayanan jasa medis senilai Rp844.475.598,00 dan utang kerjasama apotek senilai Rp161.418.520,00 serta penurunan utang kerjasama hemodialisas senilai Rp400.176.300,00 dan utang langganan daya dan jasa senilai Rp5.960.200,00; dan
2. Selisih antara Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat dan Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat senilai Rp10.895.428.600,00 merupakan belanja iuran jaminan layanan kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang salah dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial di Dinas Kesehatan.

5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.867.988.311,36	3.733.501.137,00

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.867.988.311,36. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 166. Beban Pemeliharaan

Uraian Beban Pemeliharaan		Saldo Beban 2023
Beban Beban Pemeliharaan		2.867.988.311,36
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.511.883.321,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	941.291.190,30
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.810.000,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	401.003.800,00

Tidak Terdapat perbedaan antara Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan. Rincian lebih lanjut atas perbedaan antara Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 167. Perbandingan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan

Uraian	Belanja Pemeliharaan	Beban Pemeliharaan	Selisih
Belanja Pemeliharaan	2.867.988.311,36	2.867.988.311,36	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.511.883.321,00	1.511.883.321,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	941.291.190,36	941.291.190,36	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.810.000,00	13.810.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	401.003.800,00	401.003.800,00	0,00

5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
35.593.577.118,00	58.792.169.613,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.593.577.118,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Tabel 168. Beban Perjalanan Dinas

Uraian Beban Perjalanan Dinas		Saldo Beban 2023
Beban Perjalanan Dinas		35.593.577.118,00
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.390.794.117,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	432.050.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.302.013.001,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.318.320.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	150.400.000,00

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 169. Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Belanja Perjalanan Dinas	Beban Perjalanan Dinas	Selisih
Belanja Perjalanan Dinas	35.593.577.118,00	35.593.577.118,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.390.794.117,00	13.390.794.117,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	432.050.000,00	432.050.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.302.013.001,00	20.302.013.001,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.318.320.000,00	1.318.320.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	150.400.000,00	150.400.000,00	0,00

5.4.2.6. Beban Bunga

31 Desember 2023
(Rp)

5.950.702.293,87

31 Desember 2022
(Rp)

749.758.475,50

Saldo Beban Bunga – LO per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp5.950.702.293,87 dan Rp749.758.475,50, yang merupakan alokasi pengeluaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Beban bunga merupakan Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD-Jangka Menengah.

Rincian lebih lanjut atas Beban Bunga TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 170. Rincian Beban Bunga

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD Jangka Menengah	5.950.702.293,87	749.758.475,50
Jumlah		5.950.702.293,87	749.758.475,50

Terdapat perbedaan antara Belanja Bunga dan Beban Bunga. Rincian lebih lanjut atas perbedaan antara Belanja Bunga dan Beban Bunga tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 171. Perbandingan Belanja Bunga dan Beban Bunga

Uraian	Belanja Bunga	Beban Bunga	Selisih
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) – BUMD Jangka Menengah	5.799.999.999,99	5.950.702.293,87	(150.702.293,88)
Jumlah	5.799.999.999,99	5.950.702.293,87	(150.702.293,88)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Selisih Belanja Bunga dan Beban Bunga merupakan selisih yang timbul akibat adanya pelunasan utang bunga Tahun 2023 sebesar Rp22.227.551,78 dan adanya utang bunga baru di Tahun 2023 sebesar Rp172.929.845,66.

5.4.2.7. Beban Hibah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
35.738.253.274,06	8.939.671.357,00

Beban Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.738.253.274,06.

Tabel 172. Beban Hibah-LO

Uraian Beban Pemeliharaan		Saldo Beban 2023
Beban Hibah		35.738.253.274,06
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat - LO	300.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	4.701.499.862,06
3	Beban Hibah Dana BOS - LO	30.172.474.092,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik - LO	564.279.320,00

Terdapat perbedaan antara Belanja Hibah dan Beban Hibah, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 173. Perbandingan Belanja Hibah dan Beban Hibah

Uraian	Belanja Hibah	Beban Hibah	Selisih
Belanja Hibah			
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.727.485.812,06	4.701.499.862,06	25.985.950,00
Belanja Hibah Dana BOS	31.602.392.984,00	30.172.474.092,00	1.429.918.892,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	564.279.320,00	564.279.320,00	0,00

Selisih Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO sebesar Rp1.455.904.842,00. Selisih ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat pelunasan utang belanja hibah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai sebesar Rp42.083.919,00;
2. Terdapat penambahan utang belanja hibah baru Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai sebesar Rp5.552.969,00;
3. Terdapat penghapusan aset tetap yang bersumber dari hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.545.000,00; dan
4. Terdapat belanja BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang direalisasikan melalui Belanja Hibah sebesar Rp1.429.918.892,00 dengan rincian Belanja Hibah yang menjadi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp404.531.900,00 Belanja Hibah yang menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp112.725.500,00 dan Belanja Hibah yang menjadi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp912.661.492,00.

5.4.2.8. Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
2.300.370.225,00	1.912.172.145,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp2.300.370.225,00 dan Rp1.912.172.145,00, yang merupakan beban dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Rincian lebih lanjut atas Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 174. Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	442.000.000,00	723.485.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.628.376.500,00	624.100.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan Keagamaan dan Bidang Lainnya)	30.000.000,00	764.580.870,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	199.993.725,00	(199.993.725,00)
Jumlah		2.300.370.225,00	1.912.172.145,00

Terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial dan Beban Bantuan Sosial, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 175. Perbandingan Belanja Bantuan Sosial dan Beban Bantuan Sosial

Uraian	Belanja Bantuan Sosial	Beban Bantuan Sosial	Selisih
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	442.000.000,00	442.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.523.805.100,00	1.628.376.500,00	10.895.428.600,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan Keagamaan dan Bidang Lainnya)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	199.993.725,00	(199.993.725,00)
Jumlah	12.995.805.100,00	2.300.370.225,00	10.695.434.875,00

Selisih Belanja Hibah dan Beban Hibah sebesar Rp10.695.434.875,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persediaan barang bantuan sosial pada SKB Randong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai sebesar Rp199.993.725,00; dan
2. Selisih sebesar Rp10.895.428.600,00 pada Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat merupakan belanja iuran jaminan layanan kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang direklasifikasikan menjadi Beban Jasa.

5.4.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
167.187.847.785,59	139.394.340.865,10

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp167.187.847.785,59 dan Rp139.394.340.865,10, yang merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rincian lebih lanjut atas Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 176. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.160.206.014,66	39.938.097.368,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.723.694.891,98	26.208.073.252,10
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.785.668.111,87	73.084.993.760,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.683.333,33	0,00
5	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.322.422.333,75	0,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	193.173.100,00	163.176.485,00
Jumlah		167.187.847.785,59	139.394.340.865,10

5.4.2.10. Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.982.560.947,08	278.399.741,96

Beban Penyisihan merupakan Beban Penyisihan daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.982.560.947,08. Beban Penyisihan dapat rinci sebagai berikut:

Tabel 177. Beban Penyisihan Piutang

Uraian Beban Penyisihan Piutang		Saldo Beban 2023
Beban Penyisihan Piutang		1.982.560.947,08
1	Penyisihan Piutang Pajak	1.682.153.923,25
2	Penyisihan Piutang Retribusi	285.019.706,50
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	15.387.317,33

5.4.2.11. Beban Transfer

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
65.325.929.085,00	59.936.146.308,00

Saldo Beban Transfer per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp65.325.929.085,00 dan Rp59.936.146.308,00, merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, mencakup Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Beban Transfer Bantuan Keuangan. Rincian lebih lanjut atas Beban Transfer TA 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 178. Beban Transfer Bantuan Keuangan

Uraian Beban Transfer		Saldo Beban 2023
Beban Transfer		65.325.929.085,00
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.951.164.585,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	60.374.764.500,00

1. Beban Bagi Hasil

Saldo Beban Bagi Hasil – LO per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp4.951.164.585,00 dan Rp3.847.557.908,00, yang terdiri atas Beban Bagi Hasil Pajak Daerah. Rincian lebih lanjut atas Beban Bagi Hasil TA 2023 disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 179. Rincian Beban Bagi Hasil

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.951.164.585,00	3.847.557.908,00
	Jumlah	4.951.164.585,00	3.847.557.908,00

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Bagi Hasil dan Beban Bagi Hasil, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 180. Perbandingan Belanja Bagi Hasil dan Beban Bagi Hasil

Uraian	Belanja Bagi Hasil	Beban Bagi Hasil	Selisih
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.951.164.585,00	4.951.164.585,00	-
Jumlah	4.951.164.585,00	4.951.164.585,00	-

2. Beban Bantuan Keuangan

Saldo Beban Bantuan Keuangan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp60.374.764.500,00 dan Rp56.088.588.400,00, yang merupakan Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Desa. Rincian lebih lanjut atas Beban Bantuan Keuangan TA 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 181. Rincian Beban Bantuan Keuangan

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	60.374.764.500,00	56.088.588.400,00
	Jumlah	60.374.764.500,00	56.088.588.400,00

Terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Keuangan dan Beban Bantuan Keuangan. Rincian lebih lanjut atas perbedaan antara Belanja Bantuan Keuangan dan Beban Bantuan Keuangan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 182. Perbandingan Belanja Bantuan Keuangan-LRA dan Beban Bantuan Keuangan-LO

Uraian	Jumlah LRA	Jumlah LO	Selisih
Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	188.357.244.500,00	60.374.764.500,00	127.982.480.000,00
Jumlah	188.357.244.500,00	60.374.764.500,00	127.982.480.000,00

Selisih antara belanja transfer dan beban transfer adalah sebesar Rp127.982.480.000,00 merupakan jumlah transfer dana desa yang tidak dicatat di LO.

5.4.2.12. Beban Lain - lain

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	1.495.999.997,00

Beban Lain-lain periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Beban lain-lain Tahun 2022 bersumber dari Belanja Modal Tahun 2022 yang nilainya dibawah kapitalisasi aset tetap untuk dicatat pada daftar barang ekstrakomptable. Pada Tahun 2023, belanja modal yang nilainya dibawah kapitalisasi aset dicatat sebagai beban barang.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>276.260.646,72</u>	<u>1.398.400.575,91</u>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp276.260.646,72 yang terdiri dari.

Tabel 183. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2023 (Rp)
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	2.013.994.169,00
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	722.836.913,43
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(2.460.570.435,71)
Jumlah		276.260.646,72

5.4.4. Pos Luar Biasa

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>(1.043.829.200,00)</u>	<u>(5.329.997.314,00)</u>

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Realisasi Pos Luar Biasa pada Tahun 2023 sebesar (Rp1.043.829.200,00) merupakan Beban Luar Biasa yang bersumber dari Belanja Tak Terduga Tahun 2023.

5.4.5. Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>60.199.007.783,05</u>	<u>27.162.173.086,34</u>

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023, adalah sebesar Rp60.199.007.783,05.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.5. Penjelasan atas Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah dengan arus kas bersih atau Kenaikan/Penurunan Kas selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut, sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2022 terdiri atas:

Tabel 184. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Manggarai

Uraian		2023	2022
A.	Aktivitas Operasi	231.224.767.040,87	154.313.953.073,69
B.	Aktivitas Investasi	(295.691.050.601,00)	(188.503.541.293,98)
C.	Aktivitas Pendanaan	51.140.586.794,00	6.250.717.554,00
D.	Aktivitas Transitoris	(139.662.475,00)	46.713.832,00
Arus Kas Bersih		(13.465.359.241,13)	(27.892.156.834,29)

Realisasi kas bersih dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1. Aktivitas Operasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
231.224.767.040,87	154.313.953.073,69

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 185. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022
1.	Arus Kas Masuk	1.216.206.598.172,35	1.090.365.130.064,65
2.	Arus Kas Keluar	(984.981.831.131,48)	(936.051.176.990,96)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		231.224.767.040,87	154.313.953.073,69

Realisasi arus kas dari aktivitas operasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 186. Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Arus Kas dari Aktivitas Operasi		2023	2022
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Arus Masuk Kas:			
A	Pendapatan Pajak Daerah	23.729.337.459,76	17.591.100.545,64
B	Pendapatan Retribusi Daerah	8.994.227.062,42	6.636.049.044,00
C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.567.584.252,00	3.371.631.127,65
D	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.328.707.169,17	83.124.157.028,36
E	Dana Perimbangan	918.579.367.217,00	767.706.164.638,00
F	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	-	-
G	Dana Keistimewaan	-	-
H	Dana Insentif Daerah (DID)	5.809.126.000,00	-
I	Dana Desa	127.982.480.000,00	123.185.581.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2023	2022
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
J	Pendapatan Bagi Hasil	35.390.769.012,00	28.440.368.847,00
K	Bantuan Keuangan	-	-
L	Pendapatan Hibah	3.825.000.000,00	9.297.000.000,00
M	Dana Darurat	-	-
N	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan- Contra Post	-	51.013.077.834,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.216.206.598.172,35	1.090.365.130.064,65
B	Arus Keluar Kas:		
A	Belanja Pegawai	429.160.625.973,00	416.863.482.286,24
B	Belanja Barang dan Jasa	302.918.207.257,43	267.835.774.738,00
C	Belanja Bunga	5.799.999.999,99	727.530.923,72
D	Belanja Subsidi	-	-
E	Belanja Hibah	37.194.158.116,06	60.060.498.551,00
F	Belanja Bantuan Sosial	12.995.805.100,00	2.112.165.870,00
G	Belanja Tak Terduga	3.604.625.600,00	5.329.997.314,00
H	Bagi Hasil	4.951.164.585,00	3.847.557.908,00
I	Bantuan Keuangan	188.357.244.500,00	179.274.169.400,00
Jumlah Arus Keluar Kas		984.981.831.131,48	936.051.176.990,96
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		231.224.767.040,87	154.313.953.073,69

Jumlah sebesar Rp231.224.767.040,87 merupakan selisih arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi Tahun Anggaran 2023 sedangkan arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp154.313.953.073,69.

5.5.2. Aktivitas Investasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(295.691.050.601,00)	(188.503.541.293,98)

Aliran kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas investasi yang terdiri dari.

Tabel 187. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022
1.	Arus Kas Masuk	6.800.000,00	0,00
2.	Arus Kas Keluar	(295.697.850.601,00)	(188.503.541.293,98)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(295.691.050.601,00)	(188.503.541.293,98)

Realisasi Arus Kas Aktivitas Investasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 188. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Arus Masuk Kas			
1	Penjualan atas Aset Lainnya	6.800.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		6.800.000,00	0,00
Arus Keluar Kas			
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	1.962.083.000,00
2	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	50.726.852.239,00	33.377.856.959,98
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	62.631.878.165,00	71.649.025.218,00
4	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.128.999.197,00	62.217.576.116,00
5	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	2.385.121.000,00	0,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.825.000.000,00	19.297.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		295.697.850.601,00	188.503.541.293,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(295.691.050.601,00)	(188.503.541.293,98)

Jumlah sebesar (Rp295.691.050.601,00) merupakan selisih arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2023 sementara



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

arus kas bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp188.503.541.293,98).

5.5.3. Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
51.140.586.794,00	6.250.717.554,00

Aliran kas bersih aktivitas pendanaan merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas investasi yang terdiri dari.

Tabel 189. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022
1.	Arus Kas Masuk	103.749.282.446,00	6.250.717.554,00
2.	Arus Kas Keluar	52.608.695.652,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		51.140.586.794,00	6.250.717.554,00

Pada Tahun 2023 terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp103.749.282.446,00 yang berasal dari Pinjaman pada Bank NTT. Total seluruh pinjaman pada Bank NTT adalah sebesar Rp110.000.000,00 yang ditransfer dalam dua tahap yaitu pada Tahun 2022 sebesar Rp6.250.717.554,00 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp103.749.282.446,00. Atas arus keluar sebesar Rp52.608.695.652,00 merupakan pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

5.5.4. Aktivitas Transitoris

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(139.662.475,00)	46.713.832,00

Aliran kas bersih aktivitas Transitoris merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas Transitoris yang terdiri dari.

Tabel 190. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022
1.	Arus Kas Masuk	77.500.366.227,54	62.818.787.785,99
2.	Arus Kas Keluar	77.640.028.702,54	62.772.073.953,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(139.662.475,00)	46.713.832,00

Realisasi arus kas aktivitas Transitoris yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 191. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	77.500.366.227,54	62.679.154.360,99
2	Kiriman Uang Masuk	0,00	139.633.425,00
Jumlah		77.500.366.227,54	62.818.787.785,99

Penerimaan dana pada kas daerah atas pencairan Investasi Jangka Pendek berupa Deposito Berjangka tergolong penerimaan yang dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Manggarai dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan pada Laporan Realisasi Anggaran. sehingga diakui sebagai penerimaan kas dan disajikan dalam Laporan Arus Kas pada Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris/Non Anggaran karena transaksi tersebut tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jumlah sebesar Rp77.640.028.702,54 merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum Daerah atas Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tahun Anggaran 2023. Sedangkan arus keluar kas Aktivitas Non-Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp62.772.073.953,99. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 192. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	77.500.163.227,54	62.679.154.360,99
2	Pelunasan Utang PFK BOS	139.865.475,00	92.919.593,00
Jumlah		77.640.028.702,54	62.772.073.953,99

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>(13.465.359.241,13)</u>	<u>(27.892.156.834,29)</u>

Jumlah sebesar (Rp13.465.359.241,13) merupakan Kenaikan/Penurunan kas Tahun Anggaran 2023 sementara Kenaikan/Penurunan Kas pada Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp27.892.156.834,29) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 193. Perhitungan Kenaikan/Penurunan Kas

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	231.224.767.040,87	154.313.953.073,69
2	Aktivitas Investasi	(295.691.050.601,00)	(188.503.541.293,98)
3	Aktivitas Pendanaan	51.140.586.794,00	6.250.717.554,00
4	Aktivitas Transitoris	(139.662.475,00)	46.713.832,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(13.465.359.241,13)	(27.892.156.834,29)

5.5.6. Saldo Akhir Kas

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>Rp27.223.992.145,07</u>	<u>Rp40.761.247.014,80</u>

Jumlah sebesar Rp27.223.992.145,07 merupakan saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara Operasional Sekolah dan Kas Lainnya. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.223.992.145,07 dan saldo akhir Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.761.247.014,80, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 194. Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian Mutasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo Awal Kas	40.761.247.014,80	68.653.403.849,09
2	Kenaikan/Penurunan Kas	(13.297.486.041,13)	(27.892.156.834,29)
3	Koreksi SILPA	(71.895.628,60)	0,00
Saldo Akhir Kas		27.391.865.345,07	40.761.247.014,80



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2023.

5.6.1. Ekuitas Awal

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>2.275.649.890.638,16</u>	<u>2.248.941.972.935,86</u>

Ekuitas awal Tahun 2023 sebesar Rp2.275.649.890.638,16. merupakan saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 pada Neraca *Audited*.

5.6.2. Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>60.199.007.783,05</u>	<u>27.162.173.086,34</u>

Surplus/defisit-LO TA 2023 sebesar Rp60.199.007.783,05 berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp1.089.974.958.345,93 dikurangi Beban sebesar Rp1.029.008.382.009,60 ditambah Surplus Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp276.260.646,72 dan dikurangi Defisit Pos Luar Biasa sebesar (Rp1.043.829.200,00).

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>(400.981.684.268,67)</u>	<u>(454.255.384,04)</u>

Dampak kumulatif perbedaan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp400.981.684.268,67), terdiri dari:

- 1) Koreksi kurang atas Kas sebesar Rp71.895.628,60, terdiri dari:
 - a) Koreksi tambah atas Kas Daerah sebesar Rp5,00. Koreksi tersebut disebabkan karena pada Tahun 2022 Bank NTT kurang mendebet SP2D Nomor 6110/LS/2022. Seharusnya jumlah yang didebet adalah sebesar Rp20.936.765,00 namun Bank NTT hanya mendebet sebesar Rp20.936.760,00;
 - b) Koreksi kurang atas SiLPA BOS yang disetorkan oleh Bendahara BOS ke Kasda sebesar Rp72.000.251,77; dan
 - c) Koreksi tambah atas penyesuaian Saldo Jasa Giro Sekolah dimana pencatatan yang dilakukan selama ini tidak memasukkan dua angka dibelakang koma pada 222 sekolah sebesar Rp104.618,17.
- 2) Koreksi kurang atas Piutang sebesar (Rp798.867.526,17), terdiri dari:
 - a. Koreksi tambah atas koreksi Saldo Awal Piutang Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp5.339.000,00;
 - b. Koreksi tambah atas koreksi Saldo Awal Piutang Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.168.250,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- c. Koreksi tambah atas koreksi Saldo Awal Piutang Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp65.000,00;
 - d. Koreksi tambah atas koreksi Saldo Awal Piutang Pajak Galian C pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp134.089.318,00;
 - e. Koreksi tambah atas koreksi Saldo Awal Piutang Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp572.772,00;
 - f. Koreksi tambah atas koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Rumah Dinas pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp7.702.800,00;
 - g. Koreksi tambah atas koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Pasar Rakyat pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp13.750.000,00;
 - h. Koreksi kurang atas saldo awal Piutang Lain berupa Piutang Uang Muka Pengadaan Aset Tetap pada BKPSDM sebesar (Rp7.576.796,00);
 - i. Koreksi kurang atas saldo awal Piutang dan Penyisihan Lain-Lain PAD yang Sah berupa piutang atas kelebihan setor PPh 21, atas piutang PPh 21 tersebut telah dilakukan pelunasan berupa kompensasi pajak atas PPh 21 terutang dalam SPT masa setiap tahun namun belum dicatat sebagai pengurang piutang sebesar (Rp2.568.649.860,00); dan
 - j. Koreksi tambah atas saldo awal penyisihan piutang Lain-Lain PAD yang Sah berupa piutang atas kelebihan setor PPh 21. atas piutang PPh 21 tersebut telah dilakukan pelunasan berupa kompensasi pajak atas PPh 21 terutang dalam SPT masa setiap tahun namun belum dicatat sebagai pengurang piutang sebesar Rp1.612.671.989,83.
- 3) Koreksi kurang atas Aset Tetap sebesar Rp8.717.583.475,00, terdiri dari:
- a. Koreksi kurang atas saldo awal Aset Tetap Lainnya berupa hewan ternak indukan Babi berdasarkan hasil *stock opname* dan *vouching* ke Laporan Perkembangan Indukan Babi TA 2022 sebesar Rp40.000.000,00;
 - b. Koreksi kurang atas aset Ekstrakomptabel ATL yang berasal dari pengadaan aset tahun lampau karena ada perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan perubahan minimal kapitalisasi sebesar Rp8.638.153.486,00; dan
 - c. Koreksi kurang atas aset Ekstrakomptabel PM yang berasal dari pengadaan aset PM tahun lampau dan menambah beban barang atas aset Ekstrakomptabel sebesar Rp39.429.989,00.
- 4) Koreksi tambah atas Investasi Permanen pada PT. MMI agar sesuai dengan porsi kepemilikan pada LPE PT. MMI Audited (Metode Ekuitas) sebesar Rp154.640.795,61;
- 5) Koreksi kurang atas Aset Lainnya sebesar Rp587.576.000,00 yang merupakan koreksi kurang atas ATB yang tidak memenuhi definisi sebagai ATB (merupakan belanja rutin setiap tahun) berupa buku kajian untuk pengajuan DAK setiap tahun;
- 6) Koreksi tambah atas Kewajiban sebesar Rp1.691.452,00, terdiri dari:
- a. Koreksi tambah atas saldo awal utang BLUD berupa Jamkesda sebesar Rp1.691.417,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Koreksi tambah atas Utang Jangka Panjang Lainnya berupa pengadaan Aset Tetap sebesar Rp35,00.
- 7) Koreksi tambah atas Akumulasi Penyusutan sebesar Rp390.758.787.795,00, terdiri dari:
- a. Koreksi tambah atas hasil rekalkulasi Akumulasi Penyusutan ATL dikarenakan adanya perubahan kebijakan akuntansi (metode *retrospektif*) dari bulanan menjadi tahunan sebesar Rp461.233.533,33;
 - b. Koreksi tambah atas hasil rekalkulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya perubahan kebijakan akuntansi (metode *retrospektif*) sebesar Rp29.023.353.006,67;
 - c. Koreksi tambah atas hasil rekalkulasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya perubahan kebijakan akuntansi (metode *retrospektif*) sebesar Rp31.946.231.320,38;
 - d. Koreksi tambah atas hasil rekalkulasi Akumulasi Penyusutan JIJ dikarenakan adanya perubahan kebijakan akuntansi (metode *retrospektif*) sebesar Rp329.361.158.763,31;
 - e. Koreksi kurang atas Reklasifikasi atas ATB yang seharusnya merupakan bagian perencanaan dari aset tetap (kapitalisasi pada Aset Gedung dan Bangunan) sebesar Rp833.292,00;
 - f. Koreksi kurang atas ATB yang tidak memenuhi definisi sebagai ATB (merupakan belanja rutin setiap tahun) berupa buku kajian untuk pengajuan DAK setiap tahun sebesar Rp4.895.633,00;
 - g. Koreksi kurang atas aset Ekstrakomptabel ATL yang berasal dari pengadaan aset tahun lampau karena ada perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan perubahan minimal kapitalisasi sebesar Rp530.000,00;
 - h. Koreksi kurang atas aset Ekstrakomptabel PM yang berasal dari pengadaan aset PM tahun lampau dan menambah beban barang atas aset ekstrakomptabel sebesar Rp24.293.653,40; dan
 - i. Koreksi kurang atas penghapusan Akumulasi Penyusutan PM atas barang yang dihibahkan sebesar Rp2.636.250,00.
- 8) Koreksi kurang atas penghapusan Akumulasi Penyisihan Aset Lainnya Tagihan Kerugian Daerah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang tidak mengatur penyisihan aset lainnya sebesar Rp105.875.500,00.

5.6.4. Ekuitas Akhir

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>1.934.867.214.152,54</u>	<u>2.275.649.890.638,16</u>

Saldo Ekuitas Akhir konsolidasi Tahun 2023 sebesar Rp1.934.867.214.152,54.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 terdapat informasi keuangan maupun non-keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif. Hal-hal tersebut adalah:

- a. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai sejak tahun 2015, dimana dana kapitasi JKN dikelola secara langsung oleh entitas tanpa melalui mekanisme APBD, maka untuk meningkatkan kualitas dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan diperlukan koordinasi dan rekonsiliasi data yang intensif antara FKTP sebagai penyelenggara dan Dinas Kesehatan sebagai entitas akuntansi.
- b. Tahun 2023 Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tidak disalurkan melalui RKUD. Selama ini penyaluran BOK dilakukan dari RKUN ke RKUD, untuk 2023 penyaluran dana BOK atas 23 Puskesmas di Kabupaten Manggarai dilakukan dari RKUN langsung ke rekening puskesmas, hal ini bertujuan untuk akselerasi penyaluran dan pemanfaatan BOK utk pelayanan masyarakat.
- c. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan penggunaan langsung oleh sekolah memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus oleh pihak penanggung jawab dan SDM yang terlibat baik dalam hal perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan keuangan Dana BOS sehingga diharapkan pengelolaan dana dapat dilakukan dengan baik sesuai target dan rencana yang diharapkan serta dapat menyajikan pelaporan keuangan dana BOS secara tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan. Untuk Tahun Anggaran 2023 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) mencakup Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, PAUD Swasta dan Pendidikan Kesetaraan Swasta.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menyampaikan Laporan Keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih jauh dari sempurna dan atas kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Manggarai untuk periode yang akan datang.

 Bupati Manggarai,
Herybertus G. L. Nabit, SE., MA